



Panduan Teknis

Pendayagunaan Dana ZIS-WAF



Untuk Akses Air Minum dan Sanitasi Aman

Panduan Teknis Pendayagunaan Dana ZIS-WAF

Untuk Akses Air Minum dan Sanitasi Aman

Pokja AMPL Provinsi NTB

Panduan Teknis

Pendayagunaan Dana ZIS-WAF

Untuk Akses Air Minum dan Sanitasi Aman

Penyusun :

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si (Bappeda Provinsi NTB)
Taufiq Hari Suryanto, SKM (Bappeda Provinsi NTB)
Denny Apriyanto, S.Gz., M.Gizi (Bappeda Provinsi NTB)
Dr. TGH Said Gozali Lc.MA (BAZNAS NTB)
Dr. H. Abdul Hakim (BAZNAS NTB)
Burhanudin, SKM (Dinas Kesehatan NTB)
Rizal Smith, ST (Dinas Kesehatan NTB)
Indah. ST., MT (Dinas PUPR NTB)
Samsul Huda (PPSP NTB)
Husnuzzoni (Mitra Samya)
Rostia La Ode Pado (UNICEF)
Yayat Hidayat (Konsultan SMS/UNICEF)

Kontributor

Dinas PMPD NTB
Dinas Perkim NTB
Dinas LHK NTB
BAZNAS NTB
BAZNAS Kabupaten/Kota se NTB
PAMSIMAS NTB
Muhammad Zainal (UNICEF)
Maraita Listyasari (UNICEF)
Bagus Aryawa (Mitra Samya)
Arif Prayadi (Fasilitator KSB)
L. Agus Supardi (Fasilitator Kabupaten Lombok Timur)

Editor :

Purnama Sidhi (Mitra Samya)
Eko Widodo (Tenaga Ahli Sanitasi Lingkungan)

Desain/Layout :

Ahmad Fadlan

KETUA BAZNAS PROVINSI NTB

Bismillahi Wa Bihamdihi

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Air Minum dan Sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Ajaran Islam menempatkan air sebagai sarana yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang (*ath thuhuuru syathruliiman*). Islam mengharuskan pemeluknya suci dari segala hadas dan najis (*thaharah*) melalui wudlu atau mandi (*ghusl*) sebagai syarat sahnya berbagai aktivitas ibadah.

Penyediaan sarana sanitasi dan sarana air bersih bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud dari *Hifzu an-nafs*. Berbagai program diluncurkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Salah satunya adalah Program Buang Air Sembarangan Nol (BASNO) yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2013. Namun keterbatasan pendanaan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencapaian target Program BASNO, dan memaksa pemerintah untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD.

Terbatasnya akses terhadap air minum dan sanitasi lebih banyak dirasakan oleh kaum dhuafa, sehingga pada Musyawarah Nasional tahun 2015 Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat. Fatwa tersebut mengamanatkan agar BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya dalam proses pendistribusian perlu melakukan ikhtiar nyata guna menjawab kebutuhan masyarakat, antara lain dengan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat muslim yang membutuhkan.

Menindaklanjuti fatwa MUI tersebut, sejak tahun 2017 BAZNAS Provinsi NTB melakukan kerjasama dengan Pokja AMPL NTB untuk mendukung percepatan pencapaian program BASNO melalui pendayagunaan dana ZIS (Program BAZNAS – BASNO). BAZNAS Provinsi NTB melalui BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan pembangunan sarana jamban dan rumah layak huni (Mahyani). Lokasi pembangunan diarahkan pada 100 desa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah

Provinsi NTB. Ke depan, program ini akan diperluas dengan kegiatan penyediaan sarana air minum dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program, BAZNAS NTB bersama Pokja AMPL NTB dengan dukungan Mitra Samya dan UNICEF telah menyusun Panduan Teknis Pendayagunaan Dana ZIS untuk Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Aman. Buku Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Acuan BAZNAS Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya dalam melaksanakan pendayagunaan ZIS untuk pembangunan sarana sanitasi, sarana penyediaan air minum dan rumah layak huni.
2. Memicu BAZNAS Kabupaten/Kota mengalokasikan Dana ZIS untuk pembangunan sarana sanitasi, sarana penyediaan air minum dan rumah layak huni agar manfaatnya lebih merata dirasakan oleh mustahik di wilayah NTB. Lokasi pembangunan diarahkan pada desa-desa miskin yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota atau mendukung desa-desa yang menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi NTB.
3. Mendorong kemandirian program antara BAZNAS Provinsi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dengan program yang sama.
4. Menumbuhkan semangat *Fastabiqul Khairat* dalam mensejahterakan mustahik melalui pengelolaan ZIS sehingga dampak zakat semakin terasa manfaatnya masyarakat NTB.

Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga buku panduan teknis ini dapat diselesaikan. Semoga buku ini bermanfaat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi, namun juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pendayagunaan dana ZIS.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh.

Mataram, Desember 2020

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KETUA,

DR. TGH. M. SAID GAZHALI, LC., MA

Kata Pengantar

POKJA AMPL PROVINSI NTB

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

Alhamdulillah, BAZNAS Provinsi NTB bersama Pokja AMPL Provinsi NTB dan Mitra Samya dengan dukungan UNICEF telah selesai menyusun buku Panduan Teknis Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) untuk pembangunan Air Minum dan Sanitasi. Buku Panduan Teknis ini merupakan salah satu inovasi yang diharapkan akan lebih menggerakkan pendayagunaan dana ZIS untuk mengisi ruang-ruang pembangunan di NTB, khususnya di bidang air minum dan sanitasi.

Menurut Data BPS 2019, Angka Kemiskinan di NTB masih sekitar 13,88%, artinya sebanyak 705.860 jiwa penduduk Provinsi NTB adalah masyarakat miskin, dimana akses yang rendah terhadap sarana penyediaan air minum dan sarana sanitasi menyumbang terhadap angka kemiskinan tersebut. Untuk meningkatkan akses terhadap sarana air minum dan sarana sanitasi khususnya sistem pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya membangun sarana dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan. Bahkan untuk meningkatkan akses jamban dan mendorong pencapaian ODF, sejak tahun 2013 telah meluncurkan program Buang Air Sembarangan Nol (BASNO).

Terbitnya Fatwa MUI NO 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Dana ZISWAF untuk Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi telah mendorong kerjasama Pokja AMPL Provinsi NTB dengan BAZNAS Provinsi NTB selaku badan pengelola Zakat, Infak dan Sedekah di Provinsi NTB untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Sejak tahun 2017, BAZNAS NTB telah membangun jamban keluarga dan rumah layak huni (Mahyani) bagi para mustahik di NTB. Lokasi pembangunan disepakati dilakukan di 100 desa miskin yang menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi NTB.

Untuk mendorong BAZNAS Kabupaten/Kota mereplikasi upaya-upaya yang dilakukan di tingkat Provinsi, Pemerintah Provinsi NTB melalui Surat Edaran Gubernur NTB No. 050/85/Bappeda/2020, meminta perhatian kepada Bupati/Walikota dan Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota se NTB untuk mendayagunakan Pengelolaan ZIS dalam pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi masyarakat di wilayah NTB; serta

memprioritaskan dan menyediakan dana dampungan dari ZIS yang dikelola oleh Baznas Kab/Kota Se-NTB untuk upaya peningkatan akses air minum dan sanitasi.

Semoga dengan hadirnya buku Panduan Teknis ini dapat menjadi acuan BAZNAS Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya yang ada di wilayah NTB dalam mengembangkan dan melaksanakan program pendayagunaan dana ZIS untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.

Wassalaamuáaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN (AMPL) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS,

DR. IR. H. AMRI RAKHMAN, M.SI

Kepala Bappeda Litbang Provinsi NTB

Pengantar PENULIS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

Alhamdulillahirobbil'alamiin, berkat rahmat Allah SWT akhirnya buku Panduan Teknis Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah untuk pembangunan Air Minum dan Sanitasi Aman ini dapat kami selesaikan. Buku Panduan Teknis ini memberi penjelasan tentang penerapan distribusi dan pendayagunaan harta Zakat, Infaq dan Sedekah untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Panduan ini terdiri dari 5 BAB dan 5 Lampiran yang berisi penjelasan teknis.

BAB 1. PENDAHULUAN : memberikan informasi tentang pentingnya akses sarana penyediaan air minum dan sanitasi khususnya Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Tujuan, Manfaat dan siapa saja siapa saja Pengguna Panduan ini; BAB 2. GAMBARAN UMUM : memberi informasi tentang Strategi dan Capaian Akses Air Minum dan Sanitasi di Provinsi NTB, Profil BAZNAS dan LAZ serta potensinya dalam percepatan ODF menuju sanitasi aman di Provinsi NTB; serta Landasan Teori tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); BAB 3. LANDASAN HUKUM DAN PERUNDANGAN : berisi informasi tentang Landasan Syariat dan Landasan Perundangan yang terkait dengan Pendayagunaan Dana ZIS untuk Pembangunan Air Minum dan Sanitasi;

BAB 4. PENDAYAGUNAAN DANA ZIS UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI : berisi informasi tentang maksud, tujuan, azas, sasaran, bentuk dukungan dan strategi dalam pendayagunaan dana ZIS untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi;

BAB 5. PELAKSANAAN : berisi informasi tentang tahapan pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan dana ZIS untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Panduan ini berhasil tersusun dari kontribusi berbagai pihak, terutama dari BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB, Pokja AMPL Provinsi NTB, Mitra Samya (Lembaga Studi Partisipasi, Demokrasi dan Ekonomi), UNICEF dan berbagai pemangku kepentingan yang sudah memberi input dalam Konsultasi Publik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tentunya Panduan ini masih banyak kekurangannya, karena itu saran dan masukan sangat diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Atas dukungan yang telah diberikan, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakaatuh.

Mataram, Desember 2020

Daftar isi

KATA PENGANTAR KETUA BAZNAS PROVINSI NTB

KATA PENGANTAR POKJA AMPL PROVINSI NTB

KATA PENGANTAR PENULIS

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN DAB ISTILAH

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB 1. PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

1.3. Manfaat Panduan

1.4. Pengguna Panduan

BAB 2. GAMBARAN UMUM

7

2.1. Percepatan ODF Menuju Sanitasi Aman di Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.2. Profil BAZNAS dan LAZ di Provinsi NTB

2.3. Potensi BAZNAS dan LAZ dalam Percepatan ODF Menuju Sanitasi Aman di Provinsi NTB

2.4. Landasan Teori

BAB 3. LANDASAN HUKUM DAN PERUNDANGAN**29**

- 3.1. Landasan Syari'at
- 3.2. Landasan Perundang - Undangan

BAB 4. PENDAYAGUNAAN DANA ZIS UNTUK PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI**37**

- 4.1. Maksud dan Tujuan
- 4.2. Azas
- 4.3. Sasaran
- 4.4. Bentuk Dukungan
- 4.5. Strategi

BAB 5. PELAKSANAAN**49**

- 5.1. Persiapan
- 5.2. Pembangunan Sarana
- 5.3. Pengadaan Barang dan Jasa
- 5.4. Pengelolaan Keuangan
- 5.5. Pelaporan
- 5.6. Pemantauan
- 5.7. Uji Fungsi
- 5.8. Serah Terima Sarana
- 5.9. Paska Konstruksi

Daftar Lampiran

- Lampiran 1.** Metode pengujian dengan BI-WAS
- Lampiran 2.** Metode Targeting 'Peringkat Kesejahteraan'.
- Lampiran 3** Opsi-opsi Desain Sarana Sanitasi Aman
- Lampiran 4.** Tata Cara Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Lampiran 5** Opsi-opsi dan Tata Cara Pelaksanaan Konstruksi Sarana Penyediaan Air Minum

Daftar Singkatan dan Istilah

A

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

BABINSA	Bintara Pembina Desa
BABS	Buang air besar sembarangan
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bappeda Litbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Penelitian dan Pengembangan
BASNO	Buang Air Besar Sembarangan Nol
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional
BI-WAS	<i>BAZNAS Index for Sustainable Water and Sanitation</i>
BWI	Badan Wakaf Indonesia

C

CSR	<i>Coorporate Social Responsibility</i>
-----	---

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
Dinas Perkim	Dinas Perumahan dan Permukiman
Dinas PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dinkes	Dinas Kesehatan

I

IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPLT	Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu
ISPA	Infeksi Saluran Pernafasan Akut

K

KORAMIL	Komando Rayon Militer
KPBU	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPSPAM	Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum

L

LAZ	Lembaga Amil Zakat
-----	--------------------

M

MCK	Mandi Cuci Kakus
MDG's	Milenium Development Goals
MUI	Majelis Ulama Indonesia
Malnutrisi	Malnutrisi adalah kondisi gizi yang tidak seimbang. Ini berarti, malnutrisi tidak hanya mengacu pada kondisi kekurangan asupan makan. Istilah malnutrisi juga bisa digunakan untuk menggambarkan orang yang makan dengan cukup, tapi nutrisinya tidak seimbang, serta individu dengan kelebihan berat badan.

N

NTB	Nusa Tenggara Barat
Neonatal	Neonatal merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan

pertama pada bayi. Kehidupan pertama yang dialami oleh bayi tersebut biasanya pada usia 28 hari.

Dalam Neonatal bayi harus menyesuaikan keadaan yang ada pada luar rahim. Mengingat bahwa selama ini bayi hidup dalam rahim pada saat lahir seluruh organ tubuh pada bayi harus bisa melakukan penyesuaian dengan keadaan di luar rahim.

P

Pokja AMPL	Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Pokja PPAS	Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi
PUSKAS BAZNAS	Pusat Kajian Strategis BAZNAS
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat

R

Riskesmas	Riset Kesehatan Dasar
RKAT	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

S

Sanitasi Aman	Fasilitas sanitasi digunakan oleh rumah tangga sendiri, bangunan tengah menggunakan kloset leher angsa, bangunan bawah berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir, atau tersambung dengan sistem perpipaan untuk mengalirkan air limbah domestiknya ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
SBS/ODF	Stop Buang Air Besar Sembarangan/ <i>Open Defecation Free</i>
SDG's	Sustainable Development Goals
SDM	Sumberdaya Manusia
SIMBA	Sistem Informasi BAZNAS
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPALD	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
SPALD-S	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
SPALD-T	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.

W

WHO The World Health Organization

Z

ZIS Zakat, Infaq, Sedekah

ZISWAF Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf

Daftar Tabel

- Tabel 1.** Data Capaian STBM/BASNO per Desember 2019
- Tabel 2.** Capaian indikator SDGs Nusa Tenggara Barat tahun 2019
- Tabel 3.** Target dan Capaian Penerimaan ZIS BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2020
- Tabel 4.** Kegiatan Persiapan Implementasi Fatwa MUI di Provinsi NTB Tahun 2017
- Tabel 5.** Sebaran Distribusi Rehab Rutilahu (Mahyani) 2017 – 2020
- Tabel 6.** Sebaran Distribusi Jamban Keluarga 2017 – 2020
- Tabel 7** Peran dan Tanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan
- Tabel 8** Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi Aman
- Tabel 9** Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum

Daftar Gambar

- Gambar 1.** Alur Proses Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Aman
- Gambar 2.** Tahapan-tahapan pengolahan air limbah domestik
- Gambar 3.** Opsi Pembangunan Sarana Sanitasi (SPALD)
- Gambar 4.** Opsi Pembangunan Sarana Air Minum (SPAM)
- Gambar 5.** Skema Kolaborasi Pelaku
- Gambar 6.** Tahapan Proses Pembangunan Sarana Air Minum dan/atau Sanitasi Aman Melalui dana ZIS
- Gambar 7.** Skema Pelaksanaan Pendayagunaan Dana ZIS untuk Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Aman oleh BAZNAS Provinsi

BAB 1

Pendahuluan



1.1. LATAR BELAKANG

Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab bersama. Rendahnya akses air minum dan sanitasi yang aman dapat menyebabkan timbulnya penyakit berbasis lingkungan seperti pneumonia, diare dan komplikasi *neonatal* yang merupakan pembunuh utama anak-anak. Anak yang sering terkena diare akan mengalami infeksi usus yang berakibat pada berkurangnya kemampuan usus untuk menyerap nutrisi makanan. Dampaknya, anak-anak akan menderita *malnutrisi* dan mudah terserang penyakit, sehingga mengalami keterlambatan pertumbuhan baik secara fisik maupun kecerdasannya (*stunting*).

Pada tahun 2019, penduduk Indonesia yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS) sebanyak 7,47%, dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 13,36% (BPS, 2019). Angka stunting pada bayi dibawah dua tahun di Indonesia masih mencapai 30,8%, sedangkan Provinsi NTB mencapai 33,49% (Riskesmas 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bappenas, angka korelasi antara akses sanitasi dan stunting sebesar 0,99%.

Dampak lain dari buruknya sanitasi adalah kerugian ekonomi, dimana pada tahun 2006 perkiraan kerugian tersebut mencapai Rp 56 triliun per tahun, yang dihitung dari hilangnya waktu produktif, menurunnya kunjungan wisatawan, biaya pengobatan dan pengolahan air baku (WSP-EAP, 2008).

Kondisi tersebut diatas mendorong pemerintah menjadikan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 - 2025. RPJMN 2020-2024 menetapkan target sanitasi layak sebesar 90% dan 15% diantaranya adalah sanitasi aman. Data Susenas KOR 2018 menunjukkan bahwa akses sanitasi layak baru mencapai 74,58% dan sanitasi aman baru dirasakan oleh 7,42% masyarakat Indonesia.

Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan target layanan sanitasi layak Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 84% dan 11% diantaranya adalah sanitasi aman. Capaian sanitasi layak Provinsi NTB pada tahun 2018 mencapai 75,66% dan meningkat menjadi 90,18% pada tahun 2019 (Statistik Kesra NTB 2019). Sedangkan angka sanitasi aman Provinsi NTB pada tahun 2018 baru mencapai 4,68% (BPS, diolah oleh Bappenas), sehingga masih ada gap sebesar 6,32%.

Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota di NTB berkomitmen untuk meningkatkan layanan sanitasi. Komitmen Pemerintah Provinsi ditunjukkan antara lain dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO) yang dimutakhirkan pada tahun 2020. Pergub tersebut telah diperbaharui dengan keluarnya Pergub Nomor 70 Tahun 2020.

Keterbatasan pendanaan menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan sarana air minum dan sanitasi. Indikasi pembiayaan untuk pembangunan sanitasi dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 140,9 Trilyun Rupiah, dengan alokasi APBN sebesar 73,5 Trilyun Rupiah. Sedangkan indikasi pembiayaan untuk peningkatan akses air minum perpipaan melalui pembangunan 10 Juta sambungan rumah sebesar 123,5 Trilyun Rupiah dengan Alokasi APBN sebesar 77,9 Trilyun Rupiah.

Kekurangan pembiayaan sektor air minum dan sanitasi dilakukan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta, non-pemerintah dan masyarakat. Adapun sumber dana yang dapat dioptimalkan meliputi sumber dana dari pemerintah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, serta mendorong partisipasi swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pembiayaan mikro, dan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam sekaligus instrumen wajib bagi kaum muslim di dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada Allah SWT yang memberikan implikasi di ranah sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Zakat dapat dilihat sebagai salah satu sumber daya dan sumber pendanaan dalam hal-hal yang meliputi di dalam 8 ashnaf, sebagaimana ketentuannya di dalam Al-Quran khususnya surat At-Taubah ayat 60 (9:60). Pembacaan terhadap ayat tersebut, pada prakteknya telah diaplikasikan ke dalam aktifitas berupa program-program

sosial, ekonomi, pemberdayaan, advokasi, dll. Oleh karena itu Zakat sering dianggap sebagai sumber daya sekaligus sumber dana potensial di dalam pelaksanaan program-programnya dengan harapan dapat memberi dampak dan perubahan positif bagi mereka yang menerimanya khususnya dalam kerangka pengentasan kemiskinan.

Peluang dukungan pembiayaan melalui dana ZISWAF dimungkinkan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional tahun 2015, menetapkan Fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Pada tahun 2017, Fatwa ini ditindaklanjuti dengan kesepakatan kerjasama berupa MoU antara Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam memberikan dukungan pada program penyediaan air bersih dan sanitasi.

Kesepakatan kerjasama ini disambut baik oleh parapihak. Sejak tahun 2017, BAZNAS Provinsi NTB melakukan kerjasama dengan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi NTB untuk mendukung gerakan BASNO. Pendayagunaan dana ZIS diarahkan untuk membantu mustahik membangun sarana sanitasi khususnya sarana pengelolaan limbah domestik di berbagai desa model di Provinsi NTB. Disebut desa model karena pelaksanaan kegiatan masih bersifat *learning by doing*, belum ada panduan baku yang menjadi acuan pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan sinergitas pendayagunaan dana ZIS dengan program Pemerintah dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi aman melalui peran aktif masyarakat, dibutuhkan panduan teknis yang akan diacu oleh BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya, Pemerintah serta stakeholders lainnya. Adapun sanitasi yang dimaksudkan dalam panduan teknis ini terbatas hanya pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

Tujuan

Tujuan dari penyusunan Panduan Teknis Pendayagunaan ZISWAF untuk Percepatan ODF Menuju Sanitasi Aman adalah:

- 1) Memberikan acuan tatacara dalam melakukan penilaian terhadap wilayah (kelurahan/desa) terhadap tingkat kebutuhan dukungan BAZNAS atau LAZ lainnya di wilayah sasaran

- 2) Memberikan acuan tatacara dalam melakukan pemeringkatan kesejahteraan mustahik dan menetapkan mustahik prioritas mendapatkan bantuan melalui BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat lainnya
- 3) Memberikan acuan dalam memilih opsi teknologi sarana prasarana air minum dan air limbah domestik sesuai kebutuhan dan kriteria mustahik.

1.2. MANFAAT PANDUAN

Sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) hal yang diharapkan tercapai dengan adanya panduan teknis ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

Ada kesamaan pandang antara pelaku di berbagai tataran mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dicapai.

- 1) Ada tuntunan bagi para pelaku dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana air minum dan sanitasi di desa.
- 2) Ada standar baku mutu untuk pencapaian hasil kerja di desa sehingga memudahkan untuk dilakukan evaluasi
- 3) Memudahkan replikasi atau adopsi terkait implementasi oleh para pihak.

1.3. PENGGUNA PANDUAN

Secara umum panduan teknis ini diperuntukkan bagi para pelaku pelaksana/pengelola dana ZIS tentang cara memanfaatkan dana tersebut untuk mendukung pembangunan sarana air minum dan sanitasi di masyarakat. Secara rinci pengguna Panduan Teknis ini sebagai berikut :

- 1) **BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya**
 - Memahami secara menyeluruh program air minum dan BASNO menuju sanitasi aman
 - Acuan merencanakan pelaksanaan program
 - Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan program di tingkat masyarakat
 - Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaan program
- 2) **Pokja AMPL/Pokja PPAS**
 - Memahami mekanisme pendayagunaan dana ZIS untuk mendukung akses air minum dan BASNO menuju sanitasi aman

- Menyusun rencana dan strategi optimalisasi dukungan BAZNAS dan atau LAZ lainnya untuk program air minum dan BASNO menuju sanitasi aman
- Memantau dan evaluasi kemajuan program

3) Tim Pengelola Kegiatan

- Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga dan kelompok masyarakat
- Membangun transparansi dan akuntabilitas
- Acuan operasional dan teknis

4) Warga Masyarakat dan Kelompok-Kelompok Masyarakat

- Memahami berbagai aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan
- Memahami berbagai peluang yang ditawarkan
- Membangun Kontrol Sosial

Gambaran Umum

BAB 2

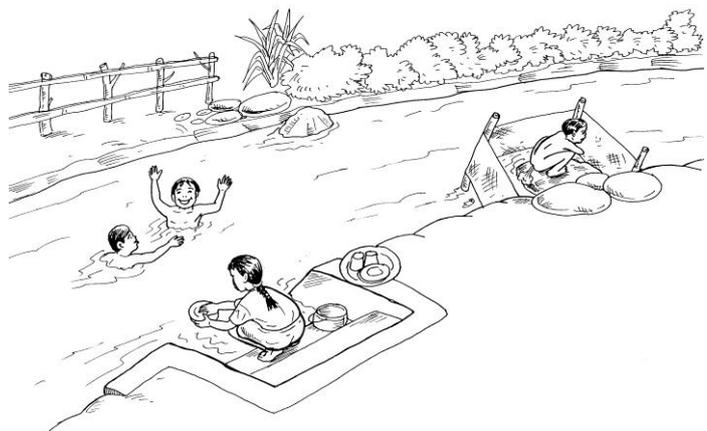
2.1. PERCEPATAN ODF MENUJU SANITASI AMAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau besar yaitu pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 20.153,15km², terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, 116 Kecamatan, 1.137 Desa/kelurahan/kelurahan (DDA NTB Tahun 2012) dengan jumlah penduduk 4.955.578 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 2.405.080 jiwa dan perempuan 2.550.498 jiwa. Berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) secara Nasional, nilai IKA Provinsi NTB berada pada peringkat kedua terendah dengan nilai 20,25. Salah satu factor utama adalah parameter Biologi yaitu E. Coli. Berdasarkan IPM, NTB menduduki posisi 29 dari 34 provinsi. Salah satu indikator agregat yang digunakan mengukur IPM adalah sector kesehatan terdiri dari Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, yang nampak masih tinggi, mencapai (24 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2017). Kasus gizi buruk di NTB juga nampak masih tinggi, mencapai 274 kasus gizi buruk dari Januari-Desember 2019 (Dikes NTB, 2019). Hal tersebut disebabkan karena rendahnya akses sanitasi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam mengantisipasi berbagai kasus tersebut, maka Provinsi NTB dalam pengelolaan sanitasi memiliki kebijakan spesifik dan khusus, yaitu gerakan Buang Air Besar Sembarangan nol (BASNO), hingga menuju sanitasi aman.

2.1.1. Gerakan BASNO

BASNO (Buang Air Sembarangan Nol) merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan saniter di masyarakat dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Gerakan ini lahir karena keprihatinan dengan kondisi akses masyarakat pedesaan terhadap sanitasi NTB yang tidak bertambah secara signifikan dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir. Pemerintah Provinsi NTB mengindikasikan bahwa target tujuan pembangunan SDG's untuk sanitasi sebagai suatu sasaran yang memerlukan perhatian khusus, sehingga harus ditemukan metode-metode yang lebih cepat,



mudah dan berkelanjutan untuk percepatan peningkatan akses sanitasi yang layak di Provinsi NTB.

Gerakan BASNO dilaksanakan sejak tahun 2010, dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2013 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO) dan telah diperbaharui menjadi Pergub No. 70 Tahun 2020.

1) Tujuan Gerakan BASNO

- a. Meningkatkan martabat kemanusiaan melalui penerapan nilai-nilai keagamaan khususnya dalam hal “menutup aurat” dan “bersuci”
- b. Menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan (gizi kurang) dari berbagai hal yang diakibatkan oleh penyakit berbasis lingkungan.
- c. Menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama Diare, ISPA. Secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan angka kematian.

2) Manfaat Gerakan BASNO

Gerakan BASNO mempunyai manfaat yang berimplikasi luas dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Merubah kesadaran masyarakat terhadap perilakunya untuk tidak Buang Air Besar Sembarangan
- b. Berkurangnya angka kecacangan pada anak sehingga produktifitas serta prestasi belajar dapat meningkat
- c. Lingkungan menjadi lebih bersih dari pencemaran yang diakibatkan oleh tinja manusia
- d. Prevalensi penyakit berbasis lingkungan menjadi menurun signifikan yang pada gilirannya dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita, angka kematian ibu melahirkan, prevalensi gizi buruk , dan stunting (pertumbuhan badan tidak optimal).
- e. Mengandalkan partisipasi dan perubahan perilaku masyarakat untuk membangun jamban secara swadaya sehingga anggaran pemerintah lebih optimal.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pengeluaran masyarakat untuk biaya kesehatan karena sakit berkurang

3) Definisi

Dalam Roadmap BASNO 2013-2017 terdapat beberapa istilah yang definsinya sebagai berikut :

- a. Desa Intervensi STBM adalah desa yang sudah melakukan pemicuan minimal 1 satu dusun, memiliki tim kerja masyarakat dan telah mempunyai rencana tindak lanjut menuju sanitasi total
- b. Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang mempunyai syarat kesehatan antara lain dilengkapi closet leher angsa dan tanki septik.
- c. Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit, yaitu :
 - Memutus rantai kontaminasi dari sumber penyakit ke manusia
 - Mencegah kontak antara manusia dengan tinja
 - Menghindari bau yang tidak sedap
 - Membuat tinja tersebut tidak dapat dihindangi serangga dan binatang lainnya.
 - Dudukannya dibuat baik bagi pengguna
- d. Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan kriteria antara lain:
 - Semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban sehat termasuk kotoran bayi
 - Tidak terlihat dan tercium tinja manusia di lingkungan sekitar.
 - Ada penerapan sanksi peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian buang air besar di sembarang tempat
 - Ada mekanisme monitoring umum yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban layak
 - Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.
- e. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas :
 - Tidak buang air besar (BAB) sembarangan,
 - Mencuci tangan pakai sabun,
 - Mengelola air minum dan makanan yg aman
 - Mengelola sampah dengan benar,
 - Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

4) Data Capaian STBM/BASNO

Wilayah Provinsi NTB terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota, 1.137 Desa/Kelurahan (995 Desa dan 142 Kelurahan), 116 Kecamatan, 169 Puskesmas/Pustu. Data per Desember 2019 dalam konteks STBM untuk BASNO menunjukkan seperti tabel berikut.

Tabel 1. Data capaian STBM/BASNO per Desember 2019

NO	ITEM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Desa dan Kelurahan sudah dipicu hingga akhir 2019	1.125	99 %
2.	Desa, Kecamatan dan Kabupaten ODF		
	2.1. Desa/Kelurahan ODF	650	57 %
	2.2. Kecamatan ODF	10	8.6 %
	2.3. Kabupaten ODF	1	10 %
3.	Akses Sanitasi (KK)	1.301.765	88,89 %
	3.1. Jumlah KK menggunakan cubluk/ tangki septik individual tidak layak (JSSP)	151.322	10,42 %
	3.2. Jumlah KK menggunakan tangki septik individual layak (JSP)	932.240	64,19 %
	3.3. Jumlah KK menggunakan jamban bersama	199.757	13,75 %
	3.4. Jumlah KK yang masih BABS	168.943	11,63 %
4.	Wirausaha Sanitasi (WUSAN)	40	Aktif
5.	Regulasi		
	5.1. Pergub NTB No 9/2013 tentang Gerakan BASNO	1	
	5.2. Perda Bima No. 6/2011 tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM).	1	
	5.3. Perda Dompus No.8/2012 tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM).	1	
	5.4. Perbup Lombok Tengah No.30/2017 tentang Gerakan Pembangunan Sanitasi Masyarakat (GERBANG SAMAS)	1	
	5.5. Perbup Sumbawa Barat No 20/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program STBM di Kabupaten Sumbawa Barat	1	
	5.6. Perda Kabupaten Lombok Tengah No. 3/2017 tentang Air Limbah Domestik	1	
6.	Cakupan Layanan IPAL	357	4,07%
7.	Jenis Jamban terbangun		
	7.1. Jamban Sehat Permanen (JSP)	944,601	64,76%
	7.2. Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	156,859	10,14%

2.1.2. Kondisi Capaian Akses Sanitasi & Air Minum di Provinsi NTB

Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi NTB Tahun 2017 menjadi gambaran awal pencapaian target indikator dari SDGs. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (RPJMD 2019-2023) mengamanatkan pencapaian target pembangunan sanitasi yaitu Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak tahun 2018 = 69.53 % dan Akhir RPJMD (2023) sebesar 85 %, (Jumlah Penambahan Kepala Keluarga (KK)) yang menggunakan jamban. Sedangkan untuk target pembangunan sarana air minum, jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum aman pada tahun 2023 sebesar 81,66 %.

Adapun capaian indikator SDGs Nusa Tenggara Barat tahun 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Capaian indikator SDGs Nusa Tenggara Barat tahun 2019

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2019	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/ Kegiatan
Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua					
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.					
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	BPS : Susenas	%	80,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas PU	Liter/ detik		Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas PU	%	73,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
Target 6.2 Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.					
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	BPS : Susenas (Modul Kesehatan dan Perumahan)	%	52,3	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2019	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/ Kegiatan
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	BPS : Susenas	%	67,39	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Desa/ Kelurahan	1137	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.2.1.(d)	Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas PU	Kab/ Kota	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
Target 6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.					
6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat	Kab/ Kota	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur

Sumber: Bappeda Litbang Provinsi NTB.

Data BPS, 2019 menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS) sebanyak 13,36%, masih diatas angka Nasional sebesar 7,47%. Capaian sanitasi layak Provinsi NTB pada tahun 2018 mencapai 75,66% dan meningkat menjadi 90,18% pada tahun 2019 (Statistik Kesra NTB 2019). Angka ini lebih tinggi dari capaian Nasional sebesar 74,58% (Data Susenas KOR 2018). Sedangkan angka sanitasi aman Provinsi NTB pada tahun 2018 baru mencapai 4,68% (BPS, diolah oleh Bappenas), lebih rendah dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar 7,42%.

RPJMN 2020-2024 menetapkan target sanitasi layak sebesar 90% dan 15% diantaranya adalah sanitasi aman. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan target layanan sanitasi layak Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 84% dan 11% diantaranya adalah sanitasi aman, sehingga masih ada gap sebesar 6,32%.

Keterbatasan pendanaan menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan sarana air minum dan sanitasi. Memperkuat sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta, non-pemerintah dan masyarakat menjadi strategi untuk mengatasi kekurangan pembiayaan. Adapun sumber dana yang dapat dioptimalkan meliputi sumber dana dari pemerintah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, serta mendorong partisipasi swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pembiayaan mikro, dan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf).

2.2. PROFIL BAZNAS DAN LAZ DI PROVINSI NTB

Sejak tahun 2017, BAZNAS Provinsi NTB melakukan kerjasama dengan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi NTB untuk mendukung gerakan BASNO.

BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari BAZNAS Republik Indonesia yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengusung Visi : “Menjadikan Amil BAZNAS yang Amanah, Profesional, Jujur, Disiplin dan Adil”, yang dijabarkan dalam Misi :

- 1). Intensifikasi Pengumpulan dan efektifitas penyaluran.
- 2). Pemanfaatan Tehnologi Informasi dalam pengelolaan zakat.
- 3). Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam rangka digitalisasi muzaki
- 4). Amil pelaksana yang profesional atau memiliki keahlian, dan memiliki kejujuran dalam pengelolaan zakat.
- 5). Menjadikan tehnologi informasi sebagai sokoguru (tiang tengah) dalam pengelolaan zakat

BAZNAS juga terdapat di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. BAZNAS Kabupaten/Kota bersifat mandiri dengan visi dan misi serta program yang bervariasi sesuai kondisi Kabupaten/Kota. Secara struktural, hubungan BAZNAS Kabupaten/Kota dengan BAZNAS Provinsi bukanlah hubungan hierarkis tetapi bersifat koordinatif. BAZNAS Provinsi NTB mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, program dan pelaporan dari BAZNAS Kabupaten/Kota.

Selain BAZNAS, di Provinsi NTB juga terdapat berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diprakarsai masyarakat dan memiliki legalitas. BAZNAS NTB juga berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan, program dan pelaporan dari LAZ tersebut. Saat ini tercatat 3 (tiga) Lembaga Amil Zakat yang rutin melakukan koordinasi dengan BAZNAS NTB yaitu DASI NTB, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan Rumah Yatim.

2.3. POTENSI BAZNAS DAN LAZ DALAM PERCEPATAN ODF MENUJU SANITASI AMAN DI PROVINSI NTB

Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Dalam Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dikeluarkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dijelaskan, potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp 462 triliun (setara 3,4 persen PDB tahun 2017) bila diterapkan kebijakan zakat sebagai insentif pajak yang ideal. Namun, sayangnya penghimpunan zakat yang tergarap masih sangat kecil dibandingkan potensi penghimpunan zakat yang dirumuskan. Tahun 2018 penerimaan zakat baru mencapai Rp 8,2 triliun. Namun dalam 5 tahun terakhir terlihat rata-rata pertumbuhan per tahunnya mencapai 24 persen.

2.3.1 Potensi Penerimaan ZIS di NTB

BAZNAS Provinsi NTB dan BAZNAS Kabupaten/Kota di NTB mengembangkan berbagai program dan strategi untuk pengumpulan ZIS. Sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 realisasi penerimaan ZIS pada BAZNAS Provinsi NTB melebihi target penerimaan, bahkan mencapai 169,57% pada tahun 2018. Sedangkan realisasi penerimaan dana ZIS tahun 2020, sampai bulan November 2020 telah mencapai 80,34% dari yang direncanakan. Sementara itu, dana ZIS yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten/Kota pada tahun 2017 – 2019 bervariasi antara 52,50% - 152,67%, dan tahun 2020 sampai dengan bulan November berkisar antara 46,23 - 129,13%.

Jumlah dana ZIS yang diterima oleh BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB (kecuali kabupaten Dompu) adalah sebesar Rp. 54.358.426.156 pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan sebesar 26,86 % atau Rp. 68.956.948.637 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 jumlah penerimaan kembali mengalami peningkatan sebesar 11,19% atau Rp. 76.674.995.072. Sampai dengan bulan November 2020 penerimaan dana ZIS mencapai Rp. 65.052.997.312 atau mengalami penurunan sebesar 15,16% dari penerimaan tahun sebelumnya.

Secara terinci, Target dan Capaian Penerimaan ZIS BAZNAS Provinsi NTB dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Target dan Capaian Penerimaan ZIS BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2020

No.	Provinsi Kab/Kota	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Nusa Tenggara Barat	2017	10.000.000.000	16.957.368.435	169,57
		2018	16.200.000.000	21.631.578.408	133,53
		2019	23.800.000.000	26.066.934.052	109,52

No.	Provinsi Kab/Kota	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		2020	29.000.000.000	23.299.890.910	80,34
2.	Kota Mataram	2017	4.800.000.000	4.747.932.081	98,92
		2018	5.000.000.000	5.713.326.508	114,27
		2019	5.000.000.000	4.492.098.247	89,84
		2020	6.000.000.000	3.123.026.197	52,05
3.	Lombok Barat	2017	3.000.000.000	2.943.914.217	98,13
		2018	5.000.000.000	2.625.190.548	52,50
		2019	3.000.000.000	2.565.333.096	85,51
		2020	3.000.000.000	1.386.860.972	46,23
4.	Lombok Tengah	2017	3.600.000.000	2.684.839.000	74,58
		2018	12.000.000.000	11.210.180.000	93,42
		2019	12.000.000.000	11.701.698.000	97,51
		2020	14.500.000.000	11.052.998.000	76,23
5.	Lombok Timur	2017	18.140.844.150	12.478.760.673	68,79
		2018	12.848.522.879	10.837.624.414	84,35
		2019	18.000.000.000	11.548.550.627	64,16
		2020	13.000.000.000	8.155.396.873	62,73
6.	Lombok Utara	2017	1.138.169.626	735.229.673	64,60
		2018	1.902.973.421	1.656.588.758	87,05
		2019	1.926.023.019	1.670.171.336	86,72
		2020	2.029.300.956	1.401.765.516	69,08
7.	Sumbawa	2017	1.349.000.000	1.749.353.058	129,68
		2018	2.970.000.000	1.786.860.449	60,16
		2019	4.039.000.000	2.560.841.788	63,40
		2020	4.064.000.000	2.113.617.829	52,01
8.	Sumbawa Barat	2017	1.500.000.000	2.290.120.695	152,67
		2018	4.000.000.000	2.443.395.474	61,08
		2019	4.500.000.000	4.396.825.995	97,71
		2020	3.500.000.000	4.519.441.015	129,13
9.	Kota Bima	2017	5.000.000.000	4.230.455.973	84,61
		2018	5.500.000.000	4.751.432.856	86,39
		2019	6.330.000.000	4.734.906.493	74,80
		2020	6.000.000.000	4.000.000.000	66,67
10.	Bima	2017	6.164.000.000	5.540.452.351	89,88
		2018	7.419.400.000	6.300.771.222	84,92
		2019	8.952.322.000	6.937.635.438	77,50
		2020	10.000.000.000	6.000.000.000	60,00
11.	Dompu	Belum ada data			

Keterangan : Tahun 2020, data penerimaan dana ZIS sampai dengan bulan November 2020

Sumber : BAZNAS Prvinsi dan Kabupaten di NTB

2.3.2 BAZNAS – BASNO

Kesepakatan kerjasama berupa MoU antara Bappenas, BAZNAS, BWI dan MUI dalam memberikan dukungan pada program penyediaan air bersih dan sanitasi sebagai tindak lanjut ditetapkan Fatwa MUI No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 disambut baik oleh parapihak.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Pokja AMPL NTB secara intens melakukan komunikasi dengan BAZNAS NTB untuk mendukung Gerakan BASNO sebagai wujud implementasi Fatwa MUI tersebut. Rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai bagian persiapan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Kegiatan Persiapan Implementasi Fatwa MUI di Provinsi NTB Tahun 2017

NO	KEGIATAN DAN WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA/ PARTISIPAN	HASIL
1.	Rapat koordinasi Kemiskinan NTB (Juni 2017)	Bappeda NTB, BPKAD, DPMPD, dan TKPKD	BAZNAS berperan /berkontribusi dalam upaya penurunan angka Kemiskinan non-komoditi yaitu indikator akses air bersih, jamban dan perumahan layak huni.
2.	Roadshow Tim Bappeda NTB ke anggota Pokja AMPL NTB (Juni – Juli 2017)	Bappeda NTB, Dinas PU, Dikes, Dinas PERKIM	informasi tentang kebutuhan OPD terkait rencana implementasi fatwa MUI tersebut
3.	Koordinasi Bappeda NTB dengan BAZNAS NTB	Bappeda NTB, BAZNAS NTB, UNICEF	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil roadshow tentang kebutuhan OPD terkait upaya penurunan angka kemiskinan • Upaya Pemprov NTB mengimple-mentasikan Fatwa MUI No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 • Penyusunan dokumen kerjasama antara Unicef dan BAZNAS NTB
4.	Rapat koordinasi Pokja AMPL dengan BAZNAS NTB (Juli 2017)	Bappeda NTB, BAZNAS NTB, UNICEF	<ul style="list-style-type: none"> • Bertujuan untuk koordinasi dan konfirmasi OPD tentang kebutuhan penanggulangan kemiskinan yang akan disupport oleh BAZNAS. • Berdasarkan FATWA MUI dan program BAZNAS NTB, terdapat 3 program yang akan BAZNAS dukung yaitu : a) Program Air bersih; b) Program Sanitasi; dan c) Program Pembangunan Rumah Layak Huni
5.	Pengolahan Data	Bappeda NTB	<p>Proses pengolahan data dan atau penentuan desa yang akan di dukung oleh BAZNAS NTB melalui dana ZIS adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengacu pada Basis Data terpadu kemiskinan • Prioritaskan desa yang menjadi pilot project kemiskinan yang menjadi wewenang DPMPD • Lihat status desa pada website STBM mengenai status ODF/BASNO dan capaian akses jambannya
6.	Rapat Koordinasi Penentuan desa intervensi berbasis data BDT dan data spasial (Juli 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Pokja AMPL NTB • Bidang Litbang Bappeda NTB 	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan desa yang akan mendapat dukungan BAZNAS NTB (Bidang Litbang Bappeda NTB : konfirmasi data spasial Desa Miskin; TKPKD NTB : konfirmasi data Basis Data Terpadu Kemiskinan)

NO	KEGIATAN DAN WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA/ PARTISIPAN	HASIL
		<ul style="list-style-type: none"> TKPKD NTB Unicef (fasilitator) 	Kenapa harus berbasis Desa? <ul style="list-style-type: none"> Untuk mengoptimalkan Peran Desa Atas usulan BAZNAS untuk memudahkan memantau progress dan mengukur keberhasilan dan kegagalan program
7.	Rapat Koordinasi Pokja AMPL dengan BAZNAS, (Juli 2017)	Pokja AMPL NTB, BAZNAS NTB	Ekspose usulan desa penerima bantuan BAZNAS NTB
8.	Workshop Implementasi Fatwa MUI Melalui Program BAZNAS – BASNO (Sept. 2017)	Pokja AMPL NTB, BAZNAS NTB	Penandatanganan MoU untuk program BAZNAS – BASNO

Sumber : Bappeda Litbang NTB

Rangkaian kegiatan tersebut menghasilkan BAZNAS – BASNO sebagai salah satu strategi implementasi program BAZNAS NTB. Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTILAHU) atau Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) menjadi bagian dari Program BAZNAS NTB PEDULI, dan Pembangunan Jamban Keluarga (JAGA) menjadi bagian dari Program BAZNAS NTB SEHAT.

Dalam rentang waktu 4 tahun (2017 – 2020), BAZNAS NTB telah mendistribusikan bantuan Rehab RUTILAHU yang dilengkapi dengan sarana sanitasi sebanyak 927 unit dengan nilai Rp. 15.000.000.- per unit. Sedangkan Jamban Keluarga sudah didistribusikan sebanyak 1.407 unit dengan nilai Rp. 3.000.000.- per unit.

Sebaran distribusi Rehab RUTILAHU dan pembangunan Jamban Keluarga BAZNAS Provinsi NTB, seperti tabel berikut :

Tabel 5. Sebaran Distribusi Rehab Rutilahu (Mahyani) 2017 – 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1.	Kota Mataram	20	20	21	25
2.	Lombok Barat	30	30	26	30
3.	Lombok Tengah	30	30	25	30
4.	Lombok Timur	42	42	43	40
5.	Lombok Utara	0	0	0	0
6.	Sumbawa	25	25	25	30
7.	Sumbawa Barat	25	25	20	30
8.	Kota Bima	20	20	21	25
9.	Bima	15	15	21	25
10.	Dompu	15	15	21	25
TOTAL		222	222	223	260

Sumber : BAZNAS Provinsi NTB, data diolah

Tabel 6. Sebaran Distribusi Jamban Keluarga 2017 – 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1.	Kota Mataram	32	32	21	22

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
2.	Lombok Barat	42	42	43	31
3.	Lombok Tengah	42	42	35	31
4.	Lombok Timur	44	44	45	41
5.	Lombok Utara	0	0	169	26
6.	Sumbawa	37	37	38	26
7.	Sumbawa Barat	35	35	20	0
8.	Kota Bima	32	32	33	21
9.	Bima (Kabupaten)	33	33	32	21
10.	Dompu	52	52	33	21
	TOTAL	349	349	469	240

Sumber : BAZNAS Provinsi NTB, data diolah

Strategi BAZNAS – BASNO ternyata belum banyak diikuti oleh BAZNAS Kabupaten/Kota di NTB. Dalam rentang waktu 2017 sampai dengan 2020 tercatat alokasi untuk Rehab RUTILAHU yang dilengkapi dengan sarana jamban keluarga dan pembangunan jamban keluarga di Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 2.478.000.000; pembangunan jamban keluarga di Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp. 765.000.000; dan pembangunan jamban keluarga di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 228.000.000.

Di bidang air minum, tercatat BAZNAS Kota Bima mendistribusikan air minum sebanyak 223 tangki dengan nilai Rp. 32.148.000; Kabupaten Sumbawa Barat mendistribusikan 100 tangki air minum senilai Rp. 75.000.000; dan pengadaan pipa air minum di desa Pusu Kecamatan Langgudu senilai Rp. 12.000.000 oleh BAZNAS Kabupaten Bima.

Dibandingkan dengan penerimaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi NTB jumlah dana ZIS yang dialokasikan untuk pembangunan sanitasi dan air minum masih berpotensi untuk ditingkatkan. Panduan Teknis ini diharapkan dapat memicu BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mengembangkan program pendayagunaan ZIS untuk pembangunan sarana penyediaan air minum dan sanitasi aman agar kebutuhan dasar mustahik dalam mengakses air minum dan sanitasi aman dapat segera terpenuhi.

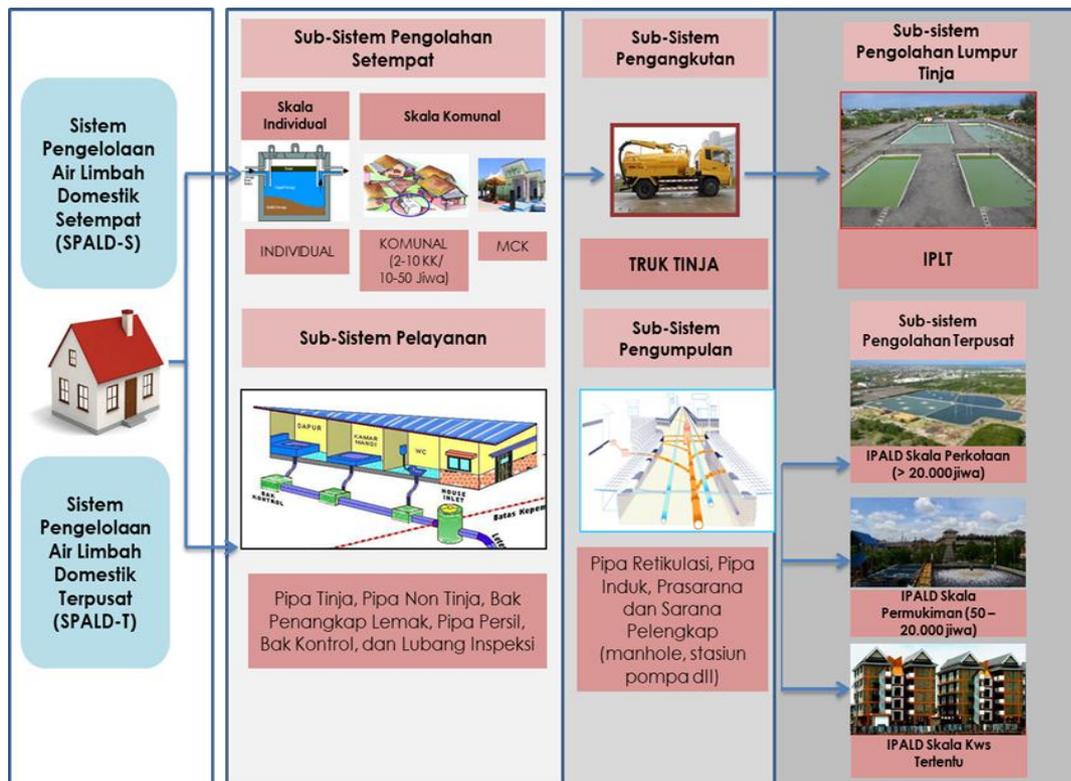
Pada tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Mataram, telah dilakukan penandatanganan Deklarasi Dukungan dalam rangka pencapaian Akses Sanitasi Layak dan Aman serta Akses Air Minum melalui pendanaan dari ZIS. Penandatanganan dilakukan oleh 10 perwakilan BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dan perwakilan LAZ DASI NTB dan LAZ BMH NTB yang disaksikan oleh Ketua BAZNAS NTB serta Bappeda Litbang NTB. Deklarasi Dukungan ini memberi harapan baru untuk mempercepat pencapaian *universal access* di Provinsi NTB. Opsi Pendayagunaan ZIS yang dapat dilakukan meliputi pembangunan

Sarana Penyediaan Air Minum, pembangunan Sanitasi Aman dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2.4. LANDASAN TEORI

2.4.1 SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)

Mengacu pada Permen PUPR No. 4 Tahun 2017, pengelolaan air limbah domestik yang aman bisa dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Proses Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Aman

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

SPALD-S terdiri dari 3 Sub-sistem yang saling mendukung yaitu :

- a. **Sub-sistem Pengolahan Setempat**, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber. Berdasarkan kapasitas pengolahan Sub-sistem Pengolahan Setempat terdiri atas:

- a) **Skala individual**, 1 unit per rumah tinggal, dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.

Pembangunan Tangki Septik dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja, persyaratan teknis dan kriteria desain sesuai dengan standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2398:2017, septic tank harus kedap air. Septic tank juga perlu memiliki lubang kontrol, ventilasi, pipa masuk-keluar serta harus dikuras isinya, untuk dibuang ke IPLT dengan truk tinja secara reguler (Addi M Idhom, 2019)

Lebih lanjut Addi M Idhom menjelaskan ketentuan SNI 2398:2017 lainnya mengharuskan septic tank memiliki bagian penampungan dan pengolah air limbah dengan kecepatan aliran lambat. Tujuannya memberi kesempatan pengendapan benda padat agar terjadi penguraian menjadi bahan larut air dan gas. Air yang keluar dari septic tank harus dialirkan ke tempat pengolahan lanjutan yang bisa berupa tiga macam bentuk, sesuai dengan kondisi lokasi, yaitu bidang resapan, sumur resapan pada daerah air tanah rendah; sistem penyaringan dengan up flow filter pada daerah air tanah tinggi; dan taman sanita pada daerah air tanah rendah dan air tanah tinggi

Puslitbang Perumahan dan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian PUPR, 2016., menjelaskan jenis teknologi pengolahan lanjutan air limbah adalah sebagai berikut :

1. Tangki Septik dengan Sumur/Bidang Resapan

Proses pengolahan limbah domestik yang terjadi pada tangki septik adalah proses pengendapan dan stabilisasi secara anaerobik. Tangki septik merupakan proses pengolahan awal (primer). Jarak antara resapan dan sumber air disyaratkan minimum 10 m (tergantung aliran air tanah dan porositas tanah). Peresapan berfungsi untuk meresapkan cairan yang keluar dari tangki septik ke tanah secara horisontal dan vertikal melalui pori-pori tanah. Air limbah umumnya akan meresap ke dalam tanah dan akhirnya masuk ke dalam air tanah sedangkan sebagian akan bergerak keatas akibat gaya kapiler selanjutnya menguap serta diserap tanaman. Peresapan disini berfungsi sebagai pengolahan sekunder dan pembuangan akhir. Jenis peresapan yang dapat digunakan sebagai berikut:

- **Bidang resapan**

Jenis peresapan ini dibuat dengan bentuk seperti parit (arah horisontal atau memanjang) sehingga kelemahannya adalah memerlukan banyak tempat, namun jenis tersebut efektivitasnya lebih tinggi dibanding sumur resapan.

- **Sumur peresapan**

Jenis peresapan ini dibuat dengan bentuk sumur (arah vertikal), dengan dinding yang bisa meresapkan air (dinding berlubang) dengan dasar tanah (tanpa perkerasan). Jenis ini digunakan jika ketersediaan tanah tidak memungkinkan dibuat bidang resapan dan kedalaman muka air tanah tertinggi saat musim hujan minimum 1,5 m dari dasar sumur resapan.

2. Tangki Septik Upflow Filter

Merupakan tangki septik konvensional yang telah dimodifikasi yaitu pada kompartemen terakhir menggunakan media kerikil untuk filtrasi air limbah yang telah diendapkan. Media pada kompartemen terakhir dapat menggunakan kerikil dengan ukuran 1-3 cm. 2/3 P 1/3 P P Lubang pemeriksaan Pipa PVC 110 mm Pipa PVC 110 mm T Lubang udara Beton bertulang. Air olahan dari tangki septik-upflow filter dapat dibuang langsung ke sungai atau diresapkan ke tanah

3. Lahan Basah Buatan/Taman Sanita

Lahan Basah Buatan (aliran horizontal di bawah permukaan) adalah saluran yang diisi pasir dan kerikil yang ditanami dengan vegetasi air. Sistem ini memiliki dasar dengan lapisan atau saluran yang diisi dengan pasir atau media (batu, kerikil, pasir, tanah). Saluran atau mangkuk dilapisi dengan penghalang yang tidak tembus air (tanah liat atau geotekstil) untuk mencegah rembesan air limbah. Pada media taman sanita ditanami vegetasi semi akuatik seperti papyrus, canna, bambu air, cattail, alang-alang dan/atau sulur-sulur.

b) **Skala komunal** diperuntukkan 2 sampai dengan 10 unit rumah tinggal dan/atau bangunan, dan Mandi Cuci Kakus/MCK, dapat berupa permanen dan non permanen (mobile toilet).

MCK terdiri dari: a) bangunan atas : berupa kamar mandi, ruang cuci dan kakus; b) bangunan bawah berupa tangki septik sesuai dengan SNI; c) prasarana dan sarana pendukung, berupa: saluran drainase, bangunan reservoir, sistem perpipaan, pompa dan sarana air bersih.

a. Sub-sistem Pengangkutan adalah kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus sebagai sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Pada Sub-sistem Pengangkutan dimulai dari proses penyedotan lumpur tinja di fasilitas sub-sistem pengolahan setempat

individual maupun komunal, selanjutnya diangkut dengan alat angkut berupa truk sedot tinja, atau motor sedot tinja (roda tiga).

- b. **Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja** berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yaitu instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.

Untuk mencapai sanitasi aman, lumpur tinja yang mengendap dalam tangki septic harus disedot (2-3 tahun sekali). Lumpur tinja hasil penyedotan diangkut ke unit pengolahan, serta IPLT yang berfungsi dengan baik untuk kemudian diolah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan. IPLT merupakan salah satu upaya terencana untuk meningkatkan pengolahan dan dan pembuangan limbah yang ramah lingkungan

2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Ditinjau dari komponennya, SPALD-T memiliki tiga sub-sistem, yakni Sub-sistem Pelayanan; Sub-sistem Pengumpulan; dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

a. Sub-sistem Pelayanan

Sub-sistem pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber, baik toilet maupun dapur, melalui perpipaan persil ke sub-sistem pengumpulan. Sub-sistem pelayanan berada di pekarangan rumah yang menjadi tanggung jawab masyarakat dalam pengoperasian dan perawatannya. Sub-sistem pelayanan terdiri dari pipa tinja, pipa nontinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, bak kontrol, dan bak inspeksi. Perencanaan sub-sistem pelayanan memerlukan survei yang detail karena setiap rumah memiliki kondisi yang berbeda dan akan berpengaruh secara langsung terhadap sub-sistem pengumpulan.

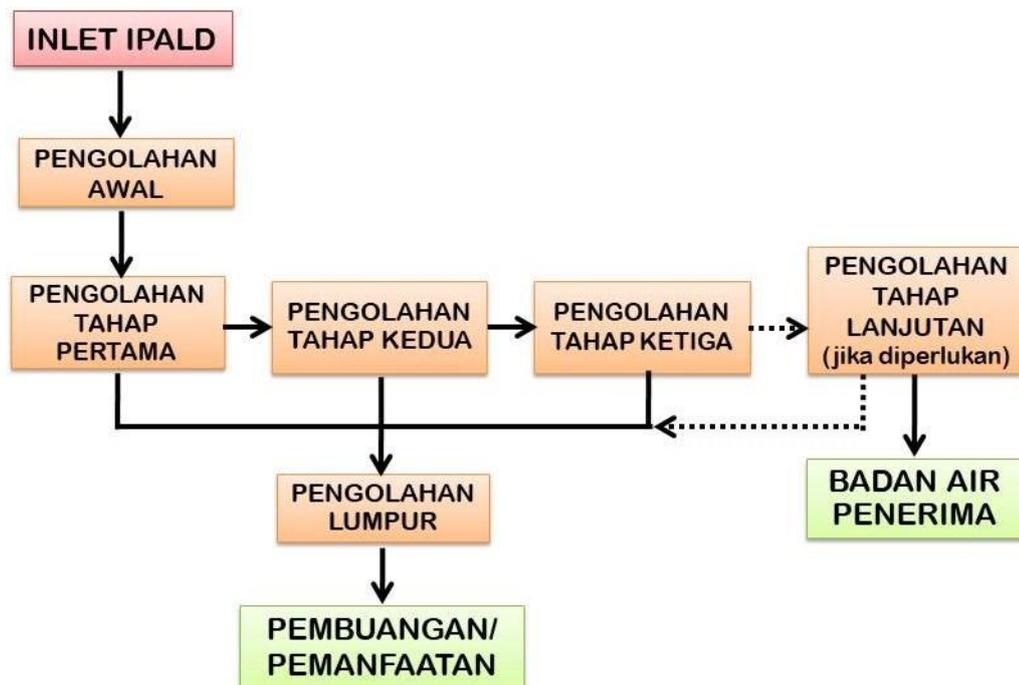
b. Sub-sistem Pengumpulan

Sub-sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat. Secara umum, prasarana dan sarana sub-sistem pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, serta prasarana dan sarana pelengkap.

c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Sub-sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan. Perencanaan sub-sistem pengolahan terpusat dilakukan dengan mempertimbangkan skala atau cakupan pelayanan.

Secara umum, terdapat beberapa tahapan dalam proses pengolahan air limbah domestik di sub-sistem pengolahan terpusat. Adapun tahapan-tahapan pengolahan air limbah domestik dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Tahapan-tahapan pengolahan air limbah domestik

Adapun tahapan-tahapan pengolahan tersebut, yakni:

1. Pengolahan Tahap Pertama

Pengolahan tahap pertama merupakan proses pengolahan fisik yang ditujukan untuk menyisahkan material kasar berupa sampah, pasir, dan material tersuspensi (*suspended solid*) dengan menggunakan metode pengolahan fisik. Terdapat beberapa teknologi yang digunakan dalam pengolahan tahap awal, yakni saringan sampah (*screen*), bak penyisih pasir (*grit chamber*), dan bak sedimentasi pertama (*primary sedimentation*). Proses pengendapan padatan tersuspensi dilakukan dengan menggunakan prinsip gravitasi di mana padatan yang memiliki massa yang lebih berat akan jatuh ke dasar kolam. Pada tahapan ini, teknologi yang digunakan yaitu unit sedimentasi pertama (*primary sedimentation*).

2. Pengolahan Tahap Kedua

Pengolahan tahap kedua merupakan proses biologi yang berfungsi untuk penguraian bahan organik yang terkandung dalam air limbah domestik oleh jasad renik/bakteri sehingga siap dan aman dibuang ke lingkungan. Tujuan pengolahan air limbah domestik secara biologis adalah untuk menghilangkan dan menstabilkan zat-zat pencemar organik terlarut yang memanfaatkan peran jasad renik di dalam air limbah domestik. Jasad renik tersebut dapat berupa bakteri, jamur, algae, protozoa, dan lain-lain. Dalam pengolahan ini, bahan pencemar organik yang dapat diuraikan secara biologis (biodegradable) bisa segera terurai karena merupakan makanan bagi bakteri dan menghasilkan lumpur biologis sebagai endapan. Tahap kedua terdiri dari dua unit pengolahan, yakni unit pengolahan biologi dan unit sedimentasi kedua. Unit sedimentasi kedua berfungsi untuk mengendapkan biological flock. Secara umum, terdapat tiga metode dalam pengolahan biologi, yakni pengolahan anaerob, pengolahan aerob, serta pengolahan kombinasi anaerob dan aerob.

3. Pengolahan Tahap Ketiga

Pengolahan tahap ketiga perlu dipertimbangkan jika masih terdapat parameter-parameter yang belum memenuhi baku mutu lingkungan yang berlaku sehingga diperlukan unit pengolahan tambahan agar dapat memenuhinya. Salah satu contoh yakni pada parameter total coliform. Jika hasil pengolahan pada tahap kedua masih menghasilkan nilai total coliform di atas nilai baku mutu lingkungan, maka diperlukan tambahan unit pengolahan desinfektan sehingga dapat menurunkan konsentrasi total coliform. Selain itu, terdapat parameter lain yang berpotensi masih melebihi baku mutu lingkungan yakni amonia. Jenis unit pengolahan pada tahap ketiga sangat bergantung pada parameter yang direncanakan untuk diolah.

4. Pengolahan Lumpur

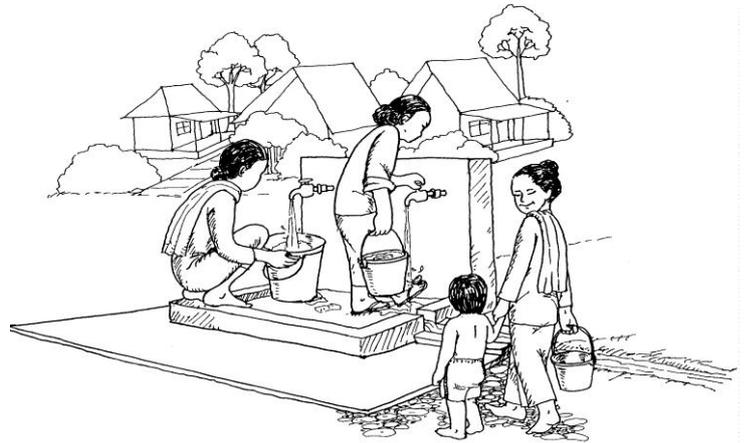
Pengolahan lumpur merupakan tahapan pengolahan yang ditujukan untuk mengolah lumpur yang timbul dari proses tahap pertama, tahap kedua, maupun tahap ketiga. Secara umum, proses pengolahan lumpur dapat dilakukan secara fisik, biologi, maupun kimia.

5. Pengolahan Lanjutan

Pengolahan lanjutan ditujukan jika direncanakan adanya pemanfaatan terbatas atas air hasil olahan dari IPALD. Tahapan ini tidak diwajibkan ada di setiap IPALD. Teknologi pengolahan lanjutan direncanakan sesuai dengan tujuan pemanfaatan.

2.4.2 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Aspek teknis terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan sedangkan aspek non teknis mencakup keuangan, sosial dan institusi.



Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdapat beberapa pengertian yaitu:

- a. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
- b. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- c. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- d. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
- e. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
- f. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
- g. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari penyelenggara.

Dalam pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007

tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang dimaksud dengan:

- a. Tingkat Pelayanan adalah presentasi jumlah penduduk yang dilayani dari total jumlah penduduk daerah pelayanan, dimana besarnya tingkat pelayanan diambil berdasarkan survey yang dilakukan oleh PDAM terhadap jumlah permintaan air minum oleh masyarakat atau dapat juga dilihat berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh PDAM untuk menyediakan air minum.
- b. Unit Air Baku adalah sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, peralatan pengukuran dan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan pembawa serta kelengkapannya.
- c. Unit Produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi meliputi bangunan pengolahan dan kelengkapannya, perangkat operasional, peralatan pengukuran dan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
- d. Unit Distribusi adalah sarana untuk mengalirkan air minum dari pipa transmisi air minum sampai ke unit pelayanan.
- e. Unit Pelayanan adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.
- f. Jaringan Pipa Transmisi Air Baku adalah ruas pipa pembawa air dari sumber air sampai unit produksi.
- g. Jaringan Pipa Transmisi Air Minum adalah ruas pipa pembawa air minum dari unit produksi/bangunan penangkap air sampai ke reservoir atau batas distribusi.
- h. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air dari sumber air ke instalasi pengolahan atau pipa pembawa air bersih dari instalasi pengolahan ke unit distribusi utama atau reservoir.
- i. Pipa Distribusi adalah pipa yang dipergunakan untuk mendistribusikan air minum dari reservoir ke daerah pelayanan atau konsumen.
- j. Pipa Pelayanan adalah pipa yang menghubungkan jaringan distribusi dengan sambungan rumah.
- k. Katup adalah suatu alat yang berfungsi untuk membuka dan menutup aliran dalam pipa.
- l. Reservoir adalah tempat penyimpanan air sementara sebelum didistribusikan kepada konsumen.
- m. Sambungan Rumah adalah jenis sambungan pelanggan yang mensuplai air langsung ke rumah-rumah, biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi air melalui meter air dan instalasi pipa di dalam rumah.

Komponen Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan

Komponen-komponen sistem penyediaan air minum secara umum meliputi (Triatmadja, 2009):

- a) Sumber air dan Broncapturing adalah bangunan penangkap air baku dari mata air.
- b) Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah suatu kesatuan bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih atau air minum.
- c) Reservoir.
- d) Pipa Transmisi.
- e) Pipa Distribusi.
- f) Pompa adalah suatu mesin yang digunakan untuk memindahkan zat cair dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui media pipa (saluran) secara kontinyu dengan cara menambah energi pada cairan yang dipindahkan.
- g) Tangki (Bak) Pelepas Tekan adalah bangunan penunjang pada jaringan transmisi atau distribusi yang berfungsi untuk menghilangkan tekanan yang berlebihan pada aliran yang dapat menyebabkan pipa pecah.
- h) Katup.
- i) Pengukur Volume (Debit) Air atau Flowmeter adalah alat untuk mengukur jumlah atau laju aliran dari suatu fluida yang mengalir dalam pipa atau saluran terbuka.
- j) Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi yang pengisian airnya dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.

Kualitas Air

Air minum yang dikonsumsi masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan perlu ditetapkan kesehatan kualitas air minum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum disebutkan:

- a) Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Pasal 1 ayat 1).
- b) Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum (Pasal 1 ayat 2).
- c) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi prsyaratana fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan (Pasal 3 ayat 1).

- d) Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP (Pasal 4 ayat 2).
- e) Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini (Pasal 4 ayat 3).
- f) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum (Pasal 7)

Kualitas air dapat dikategorikan sesuai standar yang berlaku. Penggolongan air menurut UU No. 20 TAHUN 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air menetapkan standar kualitas air baku yang dibedakan dalam 4 kategori sebagai berikut:

- Golongan A: Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu;
- Golongan B: Air yang dapat digunakan air baku air minum;
- Golongan C: Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan;
- Golongan D: Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik tenaga air.

Mengacu pada Peraturan Menteri PU NOMOR: 01/PRT/M/2009 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan, dalam penyediaan air minum bukan perpipaan, berikut adalah beberapa opsi teknologi yang dikembangkan yaitu:

- Hidran umum (HU);
- Terminal air;
- Mobil tangki air;
- Penampungan air hujan (PAH);
- Perlindungan mata air (PMA);
- Sumur dalam;
- Sumur pompa tangan (SPT);
- Sumur gali;
- Instalasi pengolahan air minum sederhana (IPAS);
- Saringan rumah tangga;
- Destilator surya atap kaca; dan
- Instalasi pengolahan air minum dengan reverse osmosis.

Landasan Hukum dan Perundangan

BAB 3

3.1 LANDASAN SYARI'AT

3.1.1 Pengertian Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)

Zakat Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam sekaligus instrumen wajib bagi kaum muslim di dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada Allah SWT yang memberikan implikasi di ranah sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Kewajiban zakat disampaikan dalam QS At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Infaq Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedekah Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Wakaf Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Dengan pengertian ini maka wakaf (harta benda wakaf tidak bergerak maupun bergerak) dapat digunakan untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Namun peruntukannya (mauquf 'alaih) mesti jelas. Dalam hal ini wakif perlu membuat ikrar wakafnya itu jelas peruntukannya untuk pembangunan sarana air minum & sanitasi.

Pendayagunaan wakaf diatur dalam UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan pengelolaannya dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Karena sifatnya yang khusus, maka **Panduan Teknis ini tidak mengatur pendayagunaan dana wakaf untuk pembangunan air minum dan sanitasi.**

3.1.2 Penetapan Fatwa ZISWAF Untuk Air Bersih dan Sanitasi

Mengingat pentingnya penyediaan pendanaan yang diperlukan masyarakat luas dalam meningkatkan akses air dan sanitasi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat¹

Penetapan fatwa ini tidak hanya menunjukkan komitmen para ulama untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah, tetapi juga sangat tepat karena air, selain merupakan kebutuhan pokok manusia, juga merupakan sarana utama untuk kebersihan dan kesucian. Dalam kehidupan sehari-hari, air amat diperlukan untuk bersuci, mencuci, mandi, memasak dan minum, sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan kebutuhan pokok manusia. Sebegitu pentingnya air bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa air adalah kehidupan itu sendiri. Orang yang mencemari sumber air, mengotori air dan membuat polusi terhadap air berarti merusak kehidupan itu sendiri.

Allah SWT berfirman:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” (Qs. al-Anbiya (21):30)

¹ Fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 ditetapkan pada Musyawarah Nasional MUI tahun 2015 di Surabaya tanggal 27 Agustus 2015. Fatwa ini ditandatangani oleh Komisi Fatwa MUI : Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA (Ketua) dan Dr. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (Sekretaris)

Memelihara air agar tetap bersih dan suci merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim, karena berwudhu atau mandi harus dengan air yang bersih dan suci. Karena itu Rasulullah SAW melarang mencemari air seperti dengan membuang kotoran di tepi sungai khususnya, sebagaimana tercantum dalam hadits-hadits berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَلَّى الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، وَنَهَى أَنْ يُتَخَلَّى عَلَى ضَفَّةِ نَهْرٍ جَارٍ»

Dari Ibn Umar ia berkata bahwa Rasulullah saw melarang seseorang buang air di bawah pohon berbuah dan ditepi sungai yang mengalir. (HR. Ibn Umar)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ "

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw bersabda "Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang diam yang tidak mengalir, kemudian ia berwudu di air tersebut." (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ "، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ "

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw bersabda "Hati-hatilah menjadi dua orang yang dimaki. Sahabat bertanya, apa itu dua orang yang dimaki ? Beliau menjawab, "Yaitu yang buang air di jalan, dan ditempat berlindung (dari panas)." (HR. Muslim).

Terkait dengan penjagaan atas kebersihan air dan lingkungan, maka aspek sanitasi perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari kalangan kaum muslimin pada tataran praktek kehidupan sehari-hari.

WHO mendefinisikan sanitasi sebagai suatu usaha yang mengawasi bebe-rapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Sanitasi pada prinsipnya merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Bahan buangan tersebut diantaranya adalah tinja manusia serta bahan buangan domestik seperti air cucian, air seni dan bahan buangan mandi. Oleh karenanya, sanitasi terkait erat dengan upaya penyehatan lingkungan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman :

وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

“Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu.” (al-‘Anfal: (8) 11)

Bagi manusia pada umumnya, air bermanfaat untuk minum, menjaga kebersihan tubuh seperti mandi, mencuci tangan, kaki atau mencuci benda dan berbagai peralatan serta untuk memandikan hewan ternak.

Khusus bagi kaum beriman, air disamping untuk kebersihan dan kesucian lahir, juga bermanfaat bagi kesucian batin seperti untuk berwudu dan mandi besar seperti mandi dari haidh dan nifas serta mandi junub.

Konsep kesucian yang digariskan al-Quran tidak hanya menjadi pengetahuan dan pemahaman yang bersifat kognitif, tetapi menjadi sikap, perilaku dan budaya bersih di kalangan kaum muslimin, baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya

Al-Quran mendorong kebersihan dan pola hidup yang bersih. Setiap pribadi muslim seharusnya memiliki pola hidup yang bersih dan menjadi mujahid yang gigih dalam mewujudkan pribadi yang bersih dan lingkungan yang bersih, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Muddatsir (74): 1-7).

Bahkan Rasulullah saw menghubungkan kebersihan dengan Iman. Sabda beliau:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّشَعْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Dari Abi Malik al-Asy'ari bahwa Rasulullah saw bersabda bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. (HR. Muslim dan Imam Ahmad).

Terdapat hubungan yang erat antara masalah sanitasi dan penyediaan air di satu sisi, sementara di sisi lain sanitasi berhubungan langsung dengan masalah kesehatan, penggunaan air, dan alokasi biaya.

Dari segi pembiayaan, Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan QS. Al-‘Araf (7) : 50, beliau mengatakan bahwa ayat tersebut adalah dalil bahwa memberi air termasuk amal yang utama. Begitu juga jawaban sahabat Ibn Abbas ketika ditanya tentang shadaqah apa yang utama? Ia menjawab memberi air.

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَقِي الْمَاءِ»

Dari Sa'ad bin Ubadah ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah shadaqah apa yang paling utama? Rasulullah saw menjawab “memberi air”.

Bahkan dalam riwayat al-Bukhari diceritakan ada seseorang yang masuk surga karena memberi minum anjing. Memberi minum kepada anjing saja dapat menjadi penyebab seseorang masuk surga dan diampuni dosa-dosanya, apalagi jika memberi minum kepada manusia.

3.2 LANDASAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.2.1 Undang-undang

1) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, pemerintah telah menerbitkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, khusus di dalam Pasal 3 di UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Dalam Undang-undang ini, Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sehingga mendapat perlakuan khusus dalam penyusunan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran di pusat dan di daerah. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang SPM, pengelolaan air minum dan air limbah domestik termasuk dalam standar pelayanan minimal bagi pemerintah daerah. Dimana dalam implementasinya, Pemerintah Daerah bisa berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam memenuhi amanat tersebut, yang salah satunya dengan BAZNAS maupun LAZ lainnya.

3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, hal ini menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia. Selain itu, limbah tersebut perlu dikelola dengan baik dan dengan mengurangi seoptimal mungkin resiko

pencemaran lingkungan. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang ini secara khusus menyatakan bahwa setiap orang diizinkan untuk membuang air limbah ke lingkungan hanya jika mereka memenuhi persyaratan berikut: (i) standar kualitas lingkungan dan (ii) telah memperoleh izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat demi pencapaian derajat kesehatan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Pemda diwajibkan mengalokasikan 10% anggaran APBD di luar gaji untuk bidang kesehatan dan 2/3 dari anggaran tersebut diperuntukan untuk kegiatan preventif termasuk di dalamnya melalui pembangunan air minum dan sanitasi.

3.2.2 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Selain Undang-undang yang menjadi pijakan dalam pengelolaan zakat serta pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi, maka dalam operasionalnya juga telah ditetapkan beberapa peraturan perundangan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri PU NOMOR: 01/PRT/M/2009 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan
- 2) PP 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- 3) Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- 5) PP No. 112 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air minum;
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- 7) Permen PUPR 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 8) Permen LHK No. 68/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- 9) Permen PU No. 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- 10) PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 11) Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024, ditetapkan sasaran sektor

Sanitasi yaitu : meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% (termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman);

3.2.3 Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Beberapa regulasi di tingkat Provinsi NTB yang merupakan turunan dari regulasi nasional sebagai pijakan dalam pengelolaan zakat serta pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi, yaitu:

- 1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 9 Tahun 2013 Tentang Gerakan Buang Air Sembarangan Nol
- 2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31/ 2014 tentang Roadmap Sanitasi 2015-2019
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Pemerataan Akses Air Bersih
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
- 5) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1 Tahun 2019. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2017 - 2022 Provinsi NTB

BAB 4

Pendayagunaan Dana ZIS untuk Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

4.1. MAKSUD DAN TUJUAN

4.1.1. Maksud

Mewujudkan keterpaduan yang sinergis dalam pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dengan program Pemerintah dalam penyediaan akses sarana air minum dan sanitasi aman yang mandiri dan berkesinambungan terutama melalui peran aktif masyarakat

4.1.2. Tujuan

Pengelolaan dana ZIS untuk pembangunan air minum dan sanitasi bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan, pengelolaan dan pendayagunaan ZIS untuk pembangunan air minum dan sanitasi;
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Mendukung program pemerintah untuk meningkatkan martabat kemanusiaan melalui penerapan nilai-nilai keagamaan khususnya dalam hal “menutup aurat” dan “bersuci”



4.2. AZAS

Penyelenggaraan dan pengelolaan dana ZIS untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi aman berdasarkan pada azas :

- 1) **Syariat Islam;**
- 2) **Amanah;** pengelola zakat harus dapat dipercaya
- 3) **Kemanfaatan;** pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada mustahik
- 4) **Keadilan;** pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil
- 5) **Kepastian Hukum;** dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki
- 6) **Terintegrasi;** pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendaya-gunaan zakat
- 7) **Akuntabilitas;** pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat
- 8) **Keselarasan;** pemanfaatan dana ZISWAF selaras dengan program pemerintah serta peraturan pendukung

4.3. SASARAN

4.3.1. Sasaran Program

Pembangunan sarana air minum dan sanitasi diarahkan kepada ashnaf fakir miskin. Pendayagunaan dana ZIS untuk kepentingan mustahik harus mendahulukan mustahik yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan hidupnya

4.3.2. Sasaran Lokasi

Pendayagunaan dana ZIS untuk pembangunan air minum dan sanitasi akan dilaksanakan diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. BAZNAS Provinsi NTB akan memprioritaskan 100 desa miskin yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi NTB. Sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota diharapkan untuk memprioritaskan desa/kelurahan miskin yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. Untuk tujuan mempercepat pencapaian ODF, BAZNAS Kabupaten/Kota juga dapat berkolaborasi dengan melakukan pembangunan sarana sanitasi dan air minum di desa/kkelurahan yang diintervensi oleh BAZNAS Provinsi.

Secara umum, dukungan akan diprioritaskan kepada mustahik yang tinggal di desa/kelurahan, dengan kriteria sebagai berikut :

- Angka kemiskinan tinggi

- Angka stunting tinggi
- Pernah dilakukan pemicuan
- Belum berstatus desa ODF, diutamakan desa yang capaian ODFnya sudah mencapai minimal 70%
- Tingkat sanitasi aman (penggunaan tangki septik dan penyedotan lumpur tinja) rendah
- Memenuhi kriteria BAZNAS Index for Sustainable Water and Sanitation (BI-WAS).

4.4. BENTUK DUKUNGAN

Bentuk dukungan yang akan diberikan kepada mustahik dalam Pendayagunaan dana ZIS untuk pembangunan air minum dan sanitasi diarahkan pada pencapaian akses aman, sebagai berikut :

4.4.1. Pembangunan Sarana Sanitasi (SPALD)

Untuk mencapai akses sarana sanitasi atau pengelolaan air limbah domestik yang aman, kebutuhan setiap Mustahik dapat berbeda satu dengan lainnya, sehingga perlu dibangun kesepakatan bersama dengan mustahik sebelum dilakukan pembangunan. Beberapa opsi bantuan ZIS untuk akses sanitasi aman, sebagai berikut :



Gambar 3. Opsi Pembangunan Sarana Sanitasi (SPALD)

1) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Beberapa opsi yang dapat dipilih untuk pembangunan SPALD Setempat, yaitu :

a. Pembangunan jamban dan tangki septik individual/komunal

Diprioritaskan bagi mustahik yang tidak memiliki jamban dan sarana pengolahan air limbah domestik. Mustahik dapat menerima bantuan berupa bangunan atas : kloset leher angsa; bangunan bawah : tangki septik; bangunan pendukung (bersifat optional, jika fasilitas jamban/kloset dan tangki septik sudah terpenuhi) : tembok, pintu, atap.

Pada wilayah-wilayah padat penduduk seperti daerah perkotaan, desa penyangga kota dan perkampungan padat penduduk lainnya, ketersediaan lahan untuk pembangunan tangki septik menjadi tantangan.

Jika 2-10 rumah tinggal mustahik berada dalam 1 lingkungan permukiman padat, kemungkinan dibangun 1 tangki septik komunal. Jika mustahik lebih dari 10 rumah tinggal, perlu dipertimbangkan untuk membangun tangki septik komunal yang berbeda untuk mempermudah operasional dan pemeliharaan sarana. Opsi ini perlu mempertimbangkan ketersediaan lahan dan biaya pemeliharannya. Selain itu persiapan terkait pengelolaan sarana pasca konstruksi harus dilakukan.

Untuk menjaga keberlanjutan sarana, jika opsi tangki septik komunal menjadi pilihan perlu dibangun pemahaman dan kesepakatan bahwa operasi dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab bersama. Kesepakatan antar pemanfaat yang mengatur hak dan kewajiban warga ini kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Status lahan untuk membangun tangki septik komunal harus jelas dan tertulis, apakah pinjam pakai, hibah atau wakaf.

b. Perbaikan jamban dan atau tangki septik individual/komunal;

Opsi ini diperuntukkan bagi mustahik yang sudah memiliki sarana SPALD komunal namun masih memerlukan perbaikan tangki septik dan/atau mustahik yang sudah memiliki sarana SPALD namun masih memerlukan peningkatan pada satu atau lebih bagian sarana sebagai berikut :

- a) Perbaikan sarana jamban/kloset jika belum menggunakan kloset leher angsa atau jamban yang sudah ada dan/atau lantai perlu diperbaiki.

- b) Jika sarana penampungan awal belum kedap, bocor atau belum memenuhi standar aman maka dilakukan penggantian tangki septik.
- c) Perbaiki bangunan pendukung jika tembok, pintu atau atap memerlukan perbaikan atau belum memenuhi kebutuhan pengguna (bersifat opsional/tersier jika fasilitas pada poin a dan b telah terpenuhi).

c. Penyedotan Lumpur Tinja;

Opsi ini diperuntukkan bagi mustahik yang sudah memiliki sarana tangki septik yang sesuai standar namun tidak memiliki biaya untuk melakukan penyedotan tangki septik secara rutin (2-3 tahun sekali).

BAZNAS dapat melakukan kerjasama dengan operator penyedotan tinja, baik pihak swasta yang sudah bersertifikat maupun operator dari pemerintah. Mustahik akan diberikan bantuan dalam bentuk voucher, yang nanti akan diserahkan kepada operator setelah melakukan sedot tinja. Penagihan pembayaran akan dilakukan oleh operator kepada BAZNAS dengan melampirkan bukti voucher.

CUBLUK KEMBAR

Pada daerah-daerah yang masih belum terjangkau layanan sedot tinja, dimungkinkan untuk membangun bak penampungan tinja berupa cubluk kembar. Cubluk merupakan unit pengolahan setempat dari SPALD-S yang paling sederhana. Terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan batu bata berongga, sistem berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk. Bentuk cubluk dapat berupa bujur sangkar atau silinder. Sistem cubluk dilengkapi dengan kloset leher angsa agar dapat mencegah bau menyebar dan berkembang biaknya lalat dan serangga lainnya di dalam perpipaan atau ruang cubluk itu.

Perencanaan cubluk kembar dilaksanakan dengan persyaratan teknis dan kriteria desain berikut ini.

- Kepadatan Penduduk kurang dari 25 jiwa/hektar
- Jarak dengan sumber air minimal 10 meter
- Ketinggian muka air tanah lebih tinggi dari 2 meter
- Umur penggunaan 5 – 10 tahun

2) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Beberapa opsi yang dapat dipilih untuk pembangunan SPALD Terpusat, yaitu :

a. Pembangunan IPALD skala permukiman berbasis masyarakat dan jaringan perpipaan

Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu dapat dibangun IPALD skala permukiman.

Opsi ini membutuhkan biaya dan sumberdaya yang memadai, sehingga jika opsi ini menjadi pilihan maka dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, swasta, pihak lainnya serta masyarakat. Persiapan di masyarakat harus dilakukan dengan baik mengikuti tahapan Zakat Community Development (ZCD) yang disiapkan oleh BAZNAS Pusat. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan operasi dan pemeliharannya. Pada tahap perencanaan, masyarakat sebagai pengambil keputusan. Pada tahap pelaksanaan, kontribusi masyarakat berupa *in cash* (uang tunai) maupun *in kind* (tenaga dan kontribusi lainnya) menjadi prasyarat untuk menumbuhkan rasa memiliki. Masyarakat juga harus disiapkan agar dapat melakukan pengoperasian dan pemeliharaan paska pembangunan sarana.

b. Pembangunan jamban dan penambahan sambungan rumah pada IPALD eksisting

Jika di lingkungan tempat tinggal mustahik terdapat tangki septik komunal (eksisting) atau IPALD Permukiman/Perkotaan dan masih ada kapasitas yang dapat dimanfaatkan dalam sistem (*idle capacity*), maka opsi yang paling mungkin adalah membangun sambungan rumah (SR), selama persyaratan teknis Mustahik terpenuhi, antara lain: jarak persil dengan jaringan perpipaan (pipa servis) dan kemiringan pipa sesuai ketentuan teknis.

3) Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

Promosi PHBS merupakan salah satu komponen penting dalam mempercepat pencapaian akses air minum dan sanitasi aman. Promosi yang dapat dilakukan misalnya :

- membuat media promosi kesehatan yang dapat digunakan oleh parapihak termasuk pemerintah desa;
- pengembangan materi dakwah atau khutbah Jumat; dan

- pelatihan promosi kesehatan dan pemucuan bagi para da'i atau santri.

4.4.2. Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum

Sarana air minum yang dibangun diupayakan memenuhi unsur 4K sebagai berikut :

- **Kualitas;** yaitu air minum harus sesuai dengan standard kesehatan
- **Kuantitas;** yaitu jumlah air yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan air minimum 60 liter/hari/orang (kuantitas);
- **Kontinuitas;** yaitu air minum tersebut dapat diakses selama 24 jam
- **Keterjangkauan;** Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk iuran bulanan dan/atau pemeliharaan tidak lebih dari 4% pendapatan rumah tangga (keterjangkauan).

Beberapa opsi bantuan ZIS untuk pembangunan SPAM seperti akses air minum, sebagai berikut :



Gambar 4. Opsi Pembangunan Sarana Air Minum (SPAM)

1) Jaringan Perpipaan

a. Pemasangan sambungan rumah pada jaringan perpipaan eksisting;

Sambungan rumah diperuntukkan bagi mustahik yang wilayah tempat tinggalnya sudah ada jaringan perpipaan baik yang dikelola oleh BUMD/PDAM, BUMDes, Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) atau nama lain melalui *tapping* jaringan perpipaan. Pemilihan opsi ini harus memperhitungkan kemampuan mustahik membayar

iuran bulanan. Pada pembangunan sambungan rumah, BAZNAS dapat melakukan kerjasama dengan pengelola SPAM tersebut.

b. Pembangunan hidran umum pada jaringan perpipaan eksisting;

Seperti opsi sambungan rumah, pembangunan hidran umum juga mensyaratkan adanya jaringan perpipaan eksisting, kesediaan masyarakat untuk membayar dan kerjasama dengan pengelola SPAM. Berbeda dengan sambungan rumah, hidran umum digunakan bersama oleh beberapa rumah tangga sehingga pembangunan hidran umum membutuhkan persiapan masyarakat yang lebih lama untuk menyepakati lokasi pembangunan dan mekanisme operasional dan perawatan, termasuk sistem pembayaran iuran. Selain itu status lahan tempat membangun sarana juga harus jelas apakah hibah atau wakaf dan diperkuat dengan dokumen pendukung.

c. Pembangunan jaringan perpipaan baru

Pembangunan SPAM jaringan perpipaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum masyarakat melalui pembangunan jaringan perpipaan. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan meliputi pembangunan sarana dan prasarana unit air baku; unit produksi; unit distribusi; dan unit pelayanan.

Opsi ini membutuhkan biaya dan sumberdaya yang memadai, sehingga jika opsi ini menjadi pilihan maka dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, swasta, pihak lainnya serta masyarakat. Persiapan di masyarakat harus dilakukan dengan baik mengikuti tahapan Zakat Community Development (ZCD) yang disiapkan oleh BAZNAS Pusat. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaannya. Pada tahap perencanaan, masyarakat sebagai pengambil keputusan. Pada tahap pelaksanaan, kontribusi masyarakat berupa *in cash* (uang tunai) maupun *in kind* (tenaga dan kontribusi lainnya) menjadi prasyarat untuk menumbuhkan rasa memiliki. Masyarakat juga harus disiapkan agar dapat melakukan pengelolaan SPAM paska pembangunan sarana. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.

2) Bukan Jaringan Perpipaan

a. Sumur dangkal

Sumur dangkal atau lebih dikenal dengan nama Sumur Gali (SGL) diperuntukkan bagi mustahik yang wilayah tempat tinggalnya memiliki air tanah dangkal namun mempunyai kualitas yang baik, daerah bebas banjir dan belum tersedia penyediaan air minum dengan sistem perpipaan. Kedalaman sumur dangkal ini biasanya berkisar antara 5 s/d 15 meter dari permukaan tanah.

Kelemahan utama sumur dangkal adalah mudahnya jenis sumur ini terkontaminasi oleh air limbah yang berasal dari kegiatan mandi, cuci, dan kakus. Agar terhindar dari pencemaran maka harus diperhatikan jarak sumur minimal 15 meter dan lebih tinggi dari sumber pencemaran seperti jamban, lubang galian untuk air limbah, kandang ternak, tempat sampah dan sumber-sumber pencemaran lainnya.

b. Sumur pompa

Opsi ini diutamakan bagi mustahik yang wilayah tempat tinggalnya belum dilayani SPAM dengan jaringan perpipaan dan sulit memperoleh air minum.

Pada wilayah dengan air tanah dangkal (≤ 20 meter) dan angka penyakit menular khususnya penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera dan penyakit perut lainnya cukup tinggi, dapat dibangun sumur pompa tangan, yaitu sarana penyediaan air minum berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu (minimal 7 m dari permukaan tanah) sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan. Pengambilan air dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa tangan.

Pada wilayah dengan air tanah dalam (≥ 30 meter) dapat dibangun sumur bor dalam yang dilengkapi dengan pompa bertenaga listrik untuk pengambilan air. Pembangunan sumur bor dalam hanya bisa dilakukan pada wilayah yang masuk dalam peta cekungan air tanah (Peta CAT) yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Selain itu terlebih dahulu harus dilakukan uji geolistrik untuk mengetahui kondisi batuan dalam tanah sehingga titik pengeboran yang berpotensi memiliki air tanah dapat ditentukan.

Opsi sumur pompa pada air tanah dalam membutuhkan biaya dan sumberdaya yang memadai, sehingga jika opsi ini menjadi pilihan maka dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, swasta, pihak lainnya serta masyarakat. Persiapan di masyarakat harus

dilakukan dengan baik mengikuti tahapan Zakat Community Development (ZCD) yang disiapkan oleh BAZNAS Pusat. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaannya.

c. Bak penampung air hujan

Menampung air hujan dari atap rumah adalah cara lain untuk memperoleh air baku. Cara yang cukup mudah ini memungkinkan dilakukan pada rumah dengan atap genteng atau seng bergelombang, dengan memasang talang air sepanjang sisi atap dan mengalirkan air hujan itu ke dalam tempat penyimpanan. Bak penampungan air hujan harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.

Opsi ini diperuntukkan bagi mustahik yang tinggal di daerah pedesaan dengan waktu dan curah hujan hanya sedikit, kering serta persediaan air tanah menurun pada musim kemarau. Pada kondisi ini, waktu dan tenaga lebih banyak digunakan untuk mengambil air bersih, karena sumber air biasanya terletak jauh dari tempat tinggal.

d. Terminal air

Terminal air merupakan sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air. Terminal air harus dibangun di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

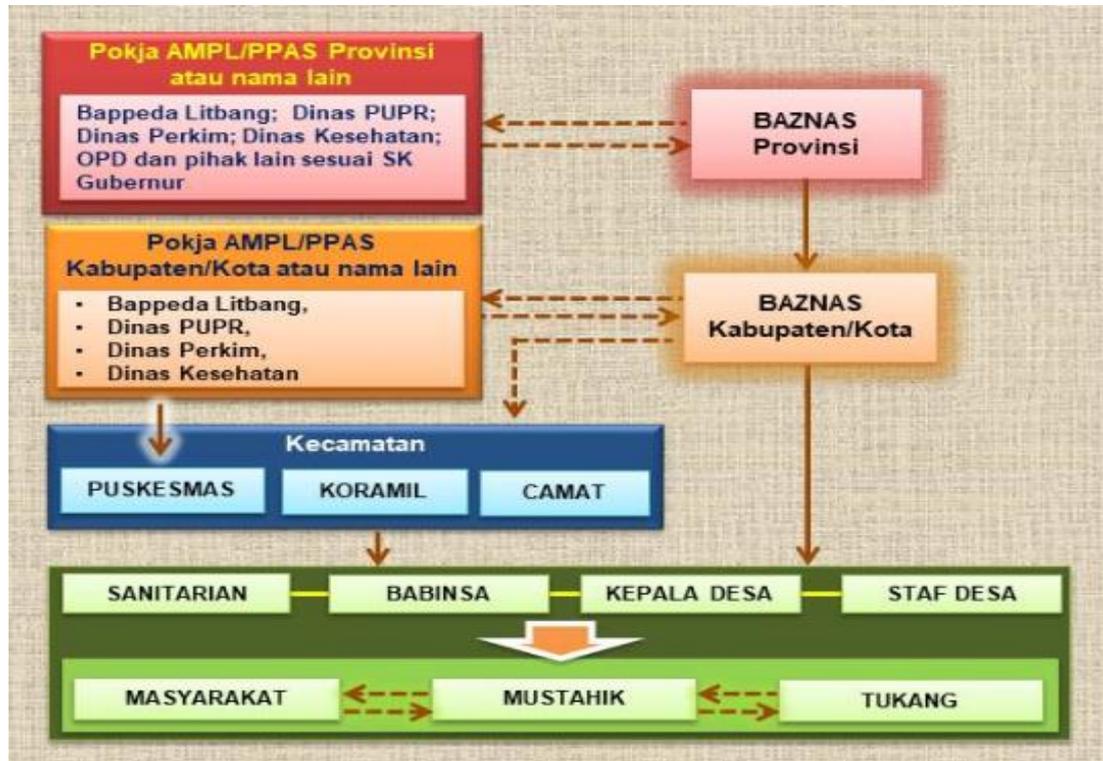
Opsi ini diperuntukkan bagi mustahik yang tinggal di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.

e. Bangunan penangkap mata air

Bangunan penangkap mata air merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran. Bangunan penangkap mata air dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

4.5. STRATEGI

4.5.1. Kolaborasi Pelaku



Gambar 5. Skema Kolaborasi Pelaku

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan dana ZIS dalam pembangunan sarana air minum dan sanitasi, kolaborasi antar pelaku dalam kerangka membangun keterpaduan dan sinergitas menjadi penting untuk dilakukan di setiap tingkatan. Kolaborasi Pelaku seperti dalam Gambar 5.

Tingkat Provinsi;

BAZNAS Provinsi NTB bersama dengan Pokja AMPL Provinsi NTB terutama dari unsur Bappeda Litbang, Dinkes, Dinas PUPR dan Dinas Perkim menentukan desa yang sesuai kriteria dan melakukan pengujian dengan BAZNAS Index for Sustainable Water and Sanitation (BI-WAS); melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi dan usulan Kabupaten/Kota yang masuk; melakukan monitoring dan evaluasi

Tingkat Kabupaten;

BAZNAS Kabupaten/Kota dan Pokja AMPL Kabupaten/Kota bersama-sama memastikan mustahik penerima manfaat dan desain sarana yang akan

dibangun sudah memenuhi standar PU/SNI; melakukan monitoring dan evaluasi

Tingkat Desa;

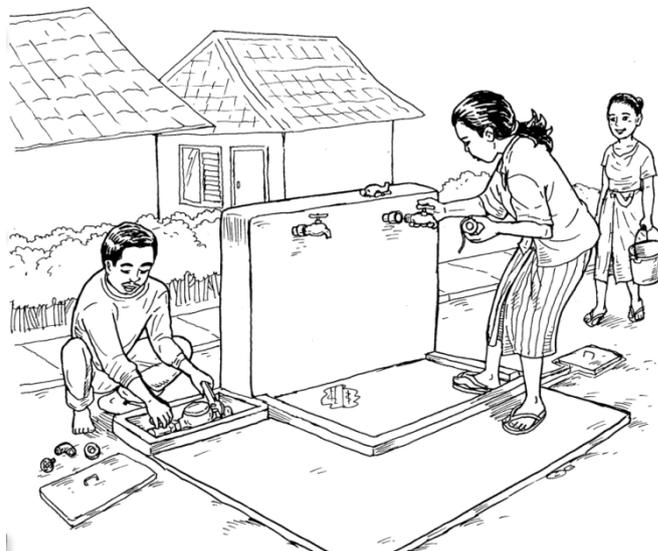
Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (BABINSA) dan Sanitarian Puskesmas bersama-sama memastikan pembangunan sarana air minum dan sanitasi tepat waktu dan sesuai desain; menggerakkan partisipasi masyarakat dan memastikan keberlanjutan/OP sarana

4.5.2. Kolaborasi Pembiayaan

Untuk mempercepat pencapaian akses air minum dan sanitasi aman perlu dilakukan kolaborasi pembiayaan antara BAZNAS Provinsi dengan BAZNAS Kabupaten dan LAZ lainnya. Jika dalam proses verifikasi ditemukan jumlah mustahik melebihi quota yang ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi, diharapkan BAZNAS Kabupaten dan LAZ lainnya dapat membantu pembangunan sarana air minum dan sanitasi aman bagi sebagian dan/atau seluruh mustahik yang tidak masuk dalam quota BAZNAS Provinsi.

4.5.3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial perlu dibangun. Dengan arahan dari tim pelaksana, pekerjaan-pekerjaan seperti penggalian lubang tangki septik, langsir material ataupun pekerjaan lainnya yang tidak membutuhkan keahlian khusus dapat dilaksanakan melalui gotong royong. Selain memupuk silaturahmi seperti dianjurkan dalam ajaran Islam, gotong royong juga dapat mempercepat proses pembangunan dan dana ZIS bisa dioptimalkan penggunaannya



Delaksanaan Pendayagunaan ZISWAF

BAB 5

Pendayagunaan dana ZIS untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi aman dapat dilakukan oleh BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini menjadi bagian dari program BAZNAS NTB SEHAT.

Prosesnya diawali dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dilakukan 4 bulan sebelum tahun berjalan berakhir (September - Oktober). Dalam RKAT, BAZNAS Provinsi sudah menetapkan quota sarana air minum dan atau sanitasi aman yang akan dibangun di masing-masing Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan berbagai indikator, diantaranya luas wilayah, jumlah penduduk dan proporsi penduduk miskin, usulan program dari masyarakat, serta estimasi penerimaan dana ZIS tahun berikutnya. Satu (1) bulan sebelum tahun berjalan berakhir (November), RKAT BAZNAS Provinsi dikirimkan ke BAZNAS PUSAT dan RKAT BAZNAS Kabupaten/Kota dikirim ke BAZNAS Provinsi untuk mendapatkan pengesahan.

USULAN MASYARAKAT

Masyarakat melalui Kelompok Masyarakat dapat mengusulkan bantuan dana ZIS untuk pembangunan sarana air minum dan/atau sanitasi aman. Sarana yang diusulkan **bukan sarana umum**, dan mutahik yang diusulkan sebagai penerima ZIS jelas nama dan alamatnya. Usulan masyarakat disampaikan kepada OPD terkait (Bidang Clpta Karya/Dinas Perkim) dan di CC-kan ke Pokja AMPL/Pokja PPAS. Jika dinilai layak untuk mendapatkan bantuan dari Baznas, OPD terkait (Bidang Clpta Karya/Dinas Perkim) akan membuat Surat Pengantar dengan kop surat resmi berisikan permohonan bantuan dana dan bentuk bantuan yang diharapkan.

Usulan masyarakat disampaikan dalam bentuk proposal yang berisi :

1. Cover Proposal yang berisi Judul Proposal, Logo Kelompok Pengusul dan Desa Lokasi
2. Pemaparan yang menguraikan : Latar Belakang; Tujuan; Lingkup Kegiatan; Pengelolaan Program (perencanaan, pelaksana, pengawasan, penerima manfaat); dan Rencana Usulan Biaya; serta Jadwal dan Penutup

3. Lampiran : Gambar DED; Fotocopy Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sering disebut Basis Data Terpadu (BDT); Surat Keterangan dari Pemerintah Desa yang menyatakan bahwa KK calon penerima manfaat benar-benar miskin; Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga calon penerima manfaat
4. Proposal ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok masyarakat pengusul dan mengetahui Kepala Desa.

Sumber : <https://youtu.be/9lYf7Ra54cl>; Video Pembelajaran Baznas-Tata Cara Pengajuan Bantuan Dana Baznas; pamsimas pusat

Pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS Provinsi dilakukan setelah disahkannya RKAT, dengan berpedoman pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120); dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 15) dan Peraturan lain yang relevan.

Dalam setiap tahapan proses, BAZNAS Provinsi NTB selalu melibatkan parapihak baik dari Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota, BAZNAS Kabupaten/Kota, Sanitarian Puskesmas, BABINSA, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat termasuk Mustahik. Strategi pelibatan parapihak ini selain membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasarnya, juga membantu pencapaian program pemerintah. Pelibatan parapihak juga bermanfaat untuk mendorong proses pemantauan bersama sehingga kualitas sarana yang dibangun sesuai dengan yang direncanakan.

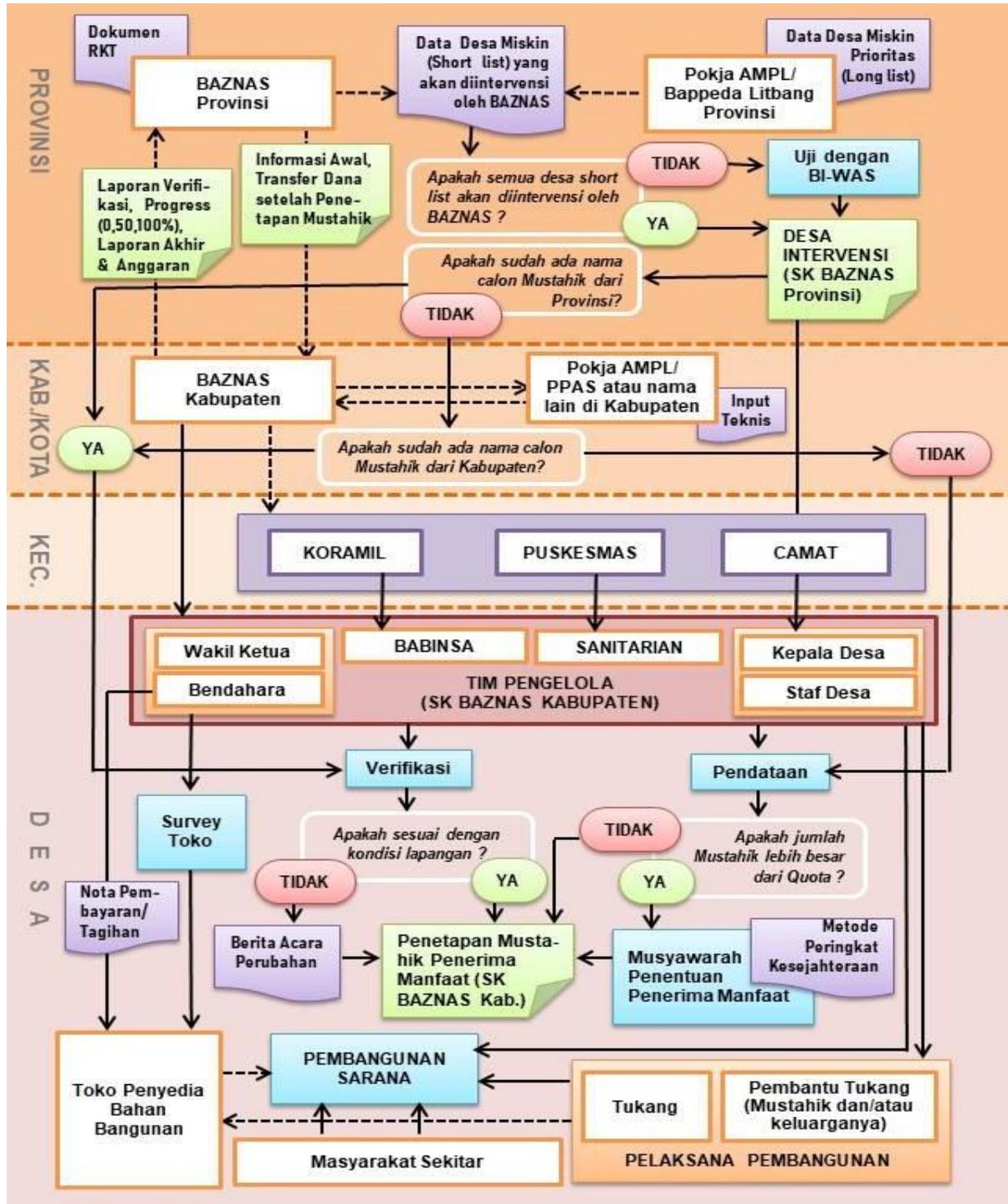
Tahapan proses pembangunan sarana air minum dan sanitasi yang dilaksanakan seperti Gambar 6.



Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana non perpipaan baik sarana air minum maupun sanitasi, BAZNAS NTB menargetkan seluruh pekerjaan harus sudah selesai dalam waktu 60 hari sejak ditransfernya dana pembangunan dari BAZNAS Provinsi ke rekening BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk pembangunan sarana air minum dan SPALD dengan system perpipaan ditargetkan harus selesai dalam waktu 120 hari. Untuk dapat memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan tersebut, BAZNAS Kabupaten/Kota dan Tim Pengelola Kegiatan harus mempersiapkan jadwal dan timeline dengan baik. Beberapa tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara paralel dalam satu satuan waktu, misalnya pembentukan tim pengelola tidak harus menunggu sampai dengan selesainya penetapan mustahik penerima manfaat.

Keterlibatan parapihak digambarkan dalam Skema Pelaksanaan, seperti **Gambar 7**.

Gambar 7 Skema Pelaksanaan Pendayagunaan Dana ZIS untuk Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Aman oleh BAZNAS Provinsi



Tahapan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1. PERSIAPAN

5.1.1. Penetapan Desa/Kelurahan Intervensi

1) Koordinasi dengan Pokja AMPL Provinsi

- BAZNAS Provinsi berkoordinasi dengan Pokja AMPL Provinsi untuk mendapatkan nama-nama Desa/Kelurahan yang akan diintervensi dengan dana ZIS untuk pembangunan sarana air minum dan/atau sanitasi aman di masing-masing Kabupaten/Kota.
- Pokja AMPL memberikan data Desa/Kelurahan yang menjadi prioritas (longlist). Penetapan Desa/Kelurahan-Desa/Kelurahan prioritas didasarkan kepada 100 Desa/Kelurahan miskin NTB yang menjadi tanggungjawab Provinsi.
- BAZNAS dan Pokja AMPL Provinsi menyepakati jadwal penetapan Desa/Kelurahan lokasi intervensi

2) Pemilihan Desa/Kelurahan Intervensi

- BAZNAS bersama dengan Pokja AMPL Provinsi bersama-sama menyusun data shortlist Desa/Kelurahan calon lokasi intervensi.
- Data longlist Desa/Kelurahan diuji dengan instrumen Indeks BAZNAS untuk Keberlanjutan Air Bersih dan Sanitasi/BAZNAS Index for Sustainable Water and Sanitation (BI-WAS) yang dikembangkan oleh PUSKAS BAZNAS. Data capaian akses air minum dan sanitasi di desa menggunakan data Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kabupaten yang dihimpun dari sanitarian.

Hasil pengujian dengan BI-WAS akan menentukan posisi Desa/Kelurahan, apakah keberadaan program BAZNAS sangat dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Secara rinci, metode pengujian dengan BI-WAS seperti pada **Lampiran 1**.

- Hasil pengujian dengan BI-WAS dan kesepakatan Desa/Kelurahan lokasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan BAZNAS dan Pokja AMPL.
- BAZNAS Provinsi menginformasikan nama Desa/Kelurahan beserta quota Kabupaten/Kota kepada BAZNAS Kabupaten/Kota

POKJA AMPL

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) adalah kelompok kerja berstatus lembaga adhoc yang terdiri dari para pemangku kepentingan pembangunan sektor air minum dan sanitasi. Di beberapa wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pokja AMPL sudah berubah menjadi Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air dan Sanitasi (*Pokja PPAS*), dengan cakupan kerja yang lebih luas.

Koordinasi dengan Pokja AMPL/Pokja PPAS atau nama lain dalam kegiatan pendayagunaan ZIS untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi sangat dianjurkan bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya. Selain mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian ODF, juga memudahkan melakukan pencatatan untuk input data capaian akses air minum dan sanitasi.

5.1.2. Penetapan Mustahik

1) Koordinasi BAZNAS Kabupaten/Kota dengan Pokja AMPL

Kabupaten/Kota

- BAZNAS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pokja AMPL Kabupaten/Kota untuk :
 - a. Menginformasikan rencana dukungan BAZNAS untuk pembangunan sarana air minum dan/atau sanitasi aman, Desa/Kelurahan lokasi intervensi dan quota yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi
 - b. Mendapatkan data calon mustahik (nama dan alamat)
 - c. Mendapatkan informasi kebijakan dan strategi Kabupaten/kota dalam membangun akses air minum dan/atau sanitasi yang aman
 - d. Mendapatkan informasi tentang opsi-opsi teknis air minum dan/ atau sanitasi aman dan memenuhi standar SNI atau standar PU, yang sesuai dengan karakteristik Desa/Kelurahan
 - e. Membangun dukungan dari Pokja AMPL dalam pelaksanaan pembangunan sarana air minum dan/atau sanitasi yang dibiayai melalui dana ZIS
- BAZNAS Kabupaten/Kota bersama Pokja AMPL Kabupaten/Kota menyepakati agenda dan jadwal pelaksanaan pembangunan sarana air minum dan/atau sanitasi, termasuk di dalamnya agenda pemantauan bersama.

2) Koordinasi BAZNAS Kabupaten/Kota dengan Camat, Danramil dan Puskesmas

- BAZNAS Kabupaten/Kota menginformasikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Camat, Danramil dan Kepala Puskesmas, sekaligus memintakan izin pelibatan Sanitarian Puskesmas dan BABINSA dalam pelaksanaan kegiatan

3) Survey dan Verifikasi Data

- BAZNAS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kelurahan lokasi pembangunan sarana air minum dan/atau sanitasi aman
- BAZNAS Kabupaten/Kota bersama Kepala Desa/Kelurahan, Sanitarian Puskesmas dan dibantu oleh BABINSA melakukan verifikasi data mustahik calon penerima manfaat. Keterlibatan Sanitarian sangat diperlukan karena memiliki data rumah tangga yang belum memiliki akses sarana air minum dan sanitasi aman di wilayah kerjanya.
- Jika sudah ada data mustahik yang berasal dari Pokja AMPL Provinsi dan/atau Pokja AMPL Kabupaten/Kota, verifikasi dilakukan menggunakan data tersebut.
- Bilamana terjadi perbedaan data dengan kondisi riil di lapangan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh BAZNAS Kabupaten/ Kota, Kepala Desa/Kelurahan dan Sanitarian.
- Jika sebelumnya tidak ada data mustahik calon penerima manfaat, maka dilakukan pendataan mustahik dengan menggunakan indikator kemiskinan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dikombinasikan dengan indikator mustahik dari BAZNAS
- Jika hasil pendataan ditemukan jumlah mustahik lebih banyak dibandingkan dengan quota, maka untuk memilih mustahik yang paling berhak dilakukan melalui musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan
- Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan dan berpotensi menimbulkan konflik, penentuan mustahik dilakukan dengan menggunakan metode targeting 'Peringkat Kesejahteraan'.
- Secara rinci metode targeting 'Peringkat Kesejahteraan' dijelaskan dalam **Lampiran 2**.
- Jika jumlah mustahik lebih banyak dibandingkan quota, BAZNAS Kabupaten/Kota disarankan melakukan kolaborasi pendanaan dengan alokasi dana zakat dari BAZNAS Kabupaten/Kota dan atau pihak lainnya (Dana Desa/Kelurahan, CSR, LAZ lainnya dll)

4) Laporan Verifikasi dan Penetapan Mustahik

- Setelah verifikasi awal selesai dilakukan, BAZNAS Kabupaten/Kota menyusun Pelaporan yang disampaikan kepada BAZNAS Provinsi dan Pokja AMPL Provinsi.

Laporan Hasil Verifikasi minimal berisi :

- a. Data hasil verifikasi
 - b. Usulan pergantian lokasi dan/atau mutahik calon penerima manfaat yang dilengkapi dengan Berita Acara hasil verifikasi
 - c. Opsi kegiatan yang akan dibiayai melalui dana ZIS (sambungan rumah air minum; pembangunan sarana sanitasi baru; peningkatan sarana sanitasi yang sudah ada : bangunan bawah, bangunan atas dan bangunan pendukung; penyedotan lumpur tinja)
- Laporan Hasil Verifikasi disampaikan dalam bentuk soft file dan dikirimkan melalui email kepada BAZNAS Provinsi
 - BAZNAS Provinsi bersama Pokja AMPL Provinsi akan melakukan verifikasi untuk finalisasi sasaran mustahik dan menyampaikan hasilnya kepada BAZNAS Kabupaten/Kota
 - BAZNAS Kabupaten/Kota segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Mustahik Penerima Manfaat sesuai hasil verifikasi BAZNAS Provinsi.

5.1.3. Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan

Tim Pengelola Kegiatan terdiri dari berbagai unsur yaitu BAZNAS Kabupaten/Kota (Ketua, Wakil Ketua dan Bendahara BAZNAS), Kepala Desa/Kelurahan dan 1 orang Staf Desa/Kelurahan, BABINSA dan Sanitarian Puskesmas. Peran dan tanggung-jawab masing-masing, seperti **Tabel 7.**

Tabel 7. Peran dan Tanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan

No	Unsur	Jabatan	Keterangan
1.	Pokja AMPL Kabupaten/Kota dari unsur Bappeda Litbang, Dinas PUPR/Perkim dan Dinas	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa pemanfaatan dana ZIS sejalan dengan program prioritas pemerintah daerah • Memberikan arahan teknis untuk pembangunan sarana

No	Unsur	Jabatan	Keterangan
	Kesehatan		
2.	Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota	Penanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab pada seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/ Kota
3.	Wakil Ketua II BAZNAS (Bidang Pendistribusian) Kabupaten/Kota	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana berjalan sesuai rencana dan tepat waktu Memastikan pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai aturan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas Memastikan Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan (0%; 50% dan 100%), Laporan Akhir dan Laporan Keuangan masing-masing Desa/Kelurahan disusun dan disampaikan tepat waktu Menyusun Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi di tingkat Kabupaten/Kota
4.	Bendahara BAZNAS Kabupaten/Kota	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> Menerima transfer dana dari Bendahara BAZNAS Provinsi Melakukan pembayaran barang dan jasa Membuat laporan keuangan.
5.	Sanitarian Puskesmas	Pengawas Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan survey awal Melakukan Uji Kualitas Air Minum Quality Control sarana yang dibangun memenuhi syarat aman Memastikan Mustahik memanfaatkan sarana yang dibangun dan dapat melakukan OP Berkoordinasi dengan operator IPLT bila ada opsi penyedotan tangki septik Lokasi kerja : Desa/Kelurahan-Desa/Kelurahan intervensi di wilayah kerjanya
6.	Bintara Pembina	Pengawas Pembangu	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan pelaksanaan pembangunan sarana tepat waktu

No	Unsur	Jabatan	Keterangan
.	Desa/Kelurahan (BABINSA)	n-an	dan sesuai dengan rencana <ul style="list-style-type: none"> • Menggerakkan partisipasi masyarakat. • Lokasi kerja : Desa/Kelurahan-Desa/Kelurahan intervensi di wilayah kerjanya
7.	Kepala Desa/Kelurahan	Penanggung jawab Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan fisik sarana
8.	Staf Desa/Kelurahan	Petugas Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengarsipkan dokumen termasuk dokumen pengadaan, nota pembayaran dan dokumentasi proses pembangunan • Membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan (0%, 50% dan 100%) • Petugas Administrasi bertanggungjawab kepada Bendahara BAZNAS Kabupaten/Kota.

Tim Pengelola Kegiatan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota. Dana operasional Tim Pengelola Kegiatan diatur sesuai ketentuan dalam pengelolaan ZIS.

SANITARIAN

Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi, dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 373/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Sanitarian, disebutkan bahwa peran sanitarian adalah sebagai pelaksana pengamatan dan pengawasan kesehatan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan agar dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Pelibatan Sanitarian dalam proses pendayagunaan ZIS untuk pembangunan sarana sanitasi sangat dianjurkan karena perannya cukup strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

PEMBANGUNAN SARANA

5.1.4. Pembangunan Sarana Sanitasi Aman

Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi Aman meliputi beberapa kegiatan yaitu :

- 1) Survey Teknis
- 2) Pengembangan Desain
- 3) Promosi Sanitasi dan Kebersihan
- 4) Tahap Konstruksi
- 5) Ujicoba Sarana

Pilihan teknologi sanitasi dan kelayakan lokasi pemasangan sarana sanitasi ditentukan melalui Survey Teknis. Termasuk diantaranya adalah memastikan status lahan tempat pemasangan, apakah milik mustahik atau tidak. Berdasarkan pilihan teknologi, kemudian dilakukan pengembangan desain sarana, baik dengan memilih dari opsi desain yang tersedia ataupun mengembangkan desain baru yang lebih sesuai. Opsi-opsi gambar Desain Sarana Sanitasi Aman seperti **Lampiran 3**

Promosi Sanitasi dan Kebersihan merupakan suatu tahapan penting dalam pembangunan sarana sanitasi aman, karena berdampak terhadap keberlanjutan sarana. Tahapan ini idealnya sudah harus dilakukan sebelum tahap konstruksi dimulai.

Untuk memastikan sarana jamban yang akan dibangun dimanfaatkan oleh mustahik penerima manfaat perlu dilakukan kegiatan pemicuan. Pemicuan merupakan proses membangkitkan dan memberdayakan masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi di masyarakat itu sendiri, dan memulai aksi lokal bersama untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan menerapkan perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Pemicuan dilakukan dengan menggunakan metode Community Led Total Sanitation (CLTS).

Pada tahap konstruksi harus dipastikan bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan sudah tersedia. Pekerjaan-pekerjaan persiapan seperti penggalian lubang tangki septik, penggalian jalur pipa air bersih/sanitasi, langsir material didorong untuk dilaksanakan melalui gotong royong masyarakat sekitar. Upaya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat ini menjadi peran Kepala Desa/Kelurahan dan BABINSA.

Pembangunan sarana sanitasi aman menjadi bagian Tata Cara Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No.4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik. Tata Cara Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik seperti **Lampiran 4**.

Pembangunan sarana sanitasi aman dinyatakan selesai setelah dilakukan uji coba untuk memastikan bahwa sarana berfungsi dengan baik sesuai perencanaan, dan dapat diserahkan kepada mustahik penerima manfaat. Selesaiannya pekerjaan pembangunan dan serah terima ditandai dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Mustahik Penerima Manfaat, Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas.

Kegiatan pembangunan sarana sanitasi aman dapat dilihat pada **Tabel 8**, sebagai berikut :

Tabel 8. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi Aman

LANGKAH-LANGKAH	TUJUAN	URAIAN	HASIL	PELAKU
Survey Teknis	Mengumpulkan informasi untuk menentukan jenis teknologi yang akan digunakan dan menentukan lokasi pemasangan	<p><u>SPALD-S</u></p> <p>Tim survey didampingi mustahik mendatangi lokasi dan mencari informasi tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kondisi tanah dan arah aliran air, • ketersediaan lahan termasuk status kepemilikan lahan, • kondisi sumber air disekitar (jenis dan jarak sumber air dari rencana pemasangan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis teknologi yang akan digunakan • Lokasi pemasangan sarana 	Sanitarian bersama Babinsa, Kepala Desa/Kelurahan dan mustahik calon penerima manfaat.
		<p><u>SPALD-T/SAMBUNGAN RUMAH</u></p> <p>Tim survey didampingi mustahik mendatangi lokasi dan mencari informasi tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevasi persil mustahik • kapasitas sumber air IPALD Permukiman/Perkotaan, • kapasitas sisa yang tidak digunakan (<i>idle capacity</i>), • kondisi jaringan perpipaan, • jarak dari jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelayakan penyambungan jaringan SR (elevasi, jarak pipa servis ke persil mustahik) 	

LANGKAH-LANGKAH	TUJUAN	URAIAN	HASIL	PELAKU
		eksisting ke rumah mustahik (pipa servis),		
Promosi Sanitasi dan Kebersihan	Mempersiapkan masyarakat atau mustahik penerima manfaat menggunakan sarana yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> • Pemicuan perubahan perilaku • Jika masyarakat atau mustahik penerima manfaat sudah paham mengenai pentingnya sanitasi dan sepakat dengan jenis sarana yang akan dibangun, maka yang disampaikan adalah materi-materi tentang operasi dan pemeliharaan sarana. 	Komitmen masyarakat untuk menggunakan dan merawat sarana sanitasi yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> • Sanitarian • Da'i sanitasi yang sudah dilatih. • BABINSA yang sudah dilatih
Pengembangan Desain	Mengembangkan acuan pelaksanaan dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan pilihan teknologi yang akan digunakan, dipilih gambar desain sarana sanitasi aman yang akan dibangun. • Gambar Desain meliputi seluruh bagian yang akan dibangun, misalnya gambar bangunan atas, bangunan bawah dan bangunan pendukung untuk pembangunan sarana sanitasi aman yang baru. • Gambar dipilih dari opsi Desain yang diberikan oleh Dinas PUPR/Perkim pada saat koordinasi awal. • Jika diperlukan, tim pelaksana di tingkat desa dapat berkonsultasi dengan Dinas PUPR/Perkim Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Gambar desain teknis sarana yang akan dibangun • Informasi tentang kebutuhan material dan jenis-jenis pekerjaan teknis dan non teknis yang akan dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pengelola Kegiatan • Dinas PUPR atau Dinas Perkim Kabupaten
Tahap Konstruksi	Konstruksi sarana sanitasi yang dibangun, sesuai standar dan spesifikasi teknis yang ditentukan	<p>Tahap konstruksi terdiri dari beberapa tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahapan persiapan konstruksi, meliputi penyiapan lahan, penempatan patok dan mobilisasi/pengadaan bahan bangunan. 	Terbangunnya sarana sanitasi aman sesuai dengan jadwal, biaya, dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan	Tukang terlatih selaku pelaksana pembangunan dan masyarakat dengan pendampingan dari Tim Pengelola

LANGKAH-LANGKAH	TUJUAN	URAIAN	HASIL	PELAKU
		2) Tahapan konstruksi bangunan atas 3) Tahapan konstruksi bangunan bawah 4) Tahapan konstruksi sumur/bidang peresapan 5) Tahapan konstruksi bangunan pendukung		Kegiatan

5.1.5. Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum

Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- 1) Survey Teknis
- 2) Pengembangan Desain
- 3) Tahap Konstruksi
- 4) Uji Kualitas Air
- 5) Pengujian Kualitas Sarana

Pada pembangunan sarana penyediaan air minum perpipaan, survey bertujuan untuk mengumpulkan informasi kemampuan jaringan perpipaan yang ada memenuhi unsur 4K jika dilakukan pembangunan sambungan rumah yang baru. Sedangkan pada pembangunan sarana penyediaan air minum non perpipaan, survey bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kelayakan pembangunan sarana. Termasuk diantaranya adalah memastikan status lahan tempat pembangunan, apakah milik mustahik atau tidak. Berdasarkan hasil survey, kemudian dilakukan pengembangan desain sarana, baik dengan memilih dari opsi desain yang tersedia ataupun mengembangkan desain baru yang lebih sesuai.

Pada tahap konstruksi harus dipastikan bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan sudah tersedia. Pekerjaan-pekerjaan non teknis seperti pembersihan lokasi, penggalian jalur pipa, langsir material didorong untuk dilaksanakan melalui gotong royong masyarakat sekitar. Upaya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat ini menjadi peran Kepala Desa/Kelurahan dan BABINSA. Opsi-opsi sarana penyediaan air minum dan tata cara pelaksanaan konstruksi sarana penyediaan air minum seperti **Lampiran 5**

Uji Kualitas Air dilakukan terutama pada sarana penyediaan air minum non perpipaan untuk memastikan bahwa air yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi sebagai air minum. Pengujian meliputi uji fisik seperti warna, bau dan rasa, serta uji biologis di laboratorium. Uji kualitas air dilakukan oleh sanitarian.

Pembangunan sarana penyediaan air minum dinyatakan selesai setelah dilakukan uji coba untuk memastikan bahwa sarana berfungsi dengan baik sesuai perencanaan. Selesaiannya pekerjaan pembangunan dan serah terima ditandai dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Mustahik Penerima Manfaat, Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas.

Kegiatan pembangunan sarana sanitasi aman dapat dilihat pada **Tabel 9**, sebagai berikut :

Tabel 9. Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum

LANGKAH-LANGKAH	TUJUAN	URAIAN	HASIL	PELAKU
Survey Teknis	Mengumpulkan informasi kelayakan pembangunan sarana	<p><u>SPAM PERPIPAAN/SAMBUNGAN RUMAH</u></p> <p>Tim survey didampingi mustahik mendatangi lokasi dan mencari informasi tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • debit air di sumber, • kapasitas sumber air, • sisa kapasitas air yang tidak digunakan (<i>idle capacity</i>), • kondisi jaringan perpipaan, • jarak dari jaringan eksisting ke rumah mustahik (pipa distribusi), 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelayakan pembangunan sarana • Lokasi pemasangan sarana 	<p>Pengelola SPAMS (Tim PDAM atau KPSPAMS atau Pengurus PAMDES) bersama Babinsa, Kepala Desa/ Kelurahan dan mustahik calon penerima manfaat.</p>
		<p><u>SPAM NON PERPIPAAN</u></p> <p>Tim survey didampingi mustahik mendatangi lokasi dan mencari informasi tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kondisi tanah dan arah aliran air, • ketersediaan lahan termasuk status kepemilikan lahan untuk prasarana SPAM (sumur, terminal air atau PAH) • kondisi SPAM/sumur di lingkungan sekitar (muka air 		<p>Sanitarian bersama Babinsa, Kepala Desa/ Kelurahan dan mustahik calon penerima manfaat.</p>

LANGKAH-LANGKAH	TUJUAN	URAIAN	HASIL	PELAKU
		<p>tanah, kualitas air)</p> <ul style="list-style-type: none"> • jarak lokasi dengan sumber pencemaran seperti jamban, lubang galian untuk air limbah, kandang ternak, tempat sampah dan sumber-sumber pencemaran lainnya 		
Pengembangan Desain	Mengembangkan acuan pelaksanaan dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil survey dikembangkan gambar desain SPAM yang akan dibangun. • Gambar Desain meliputi seluruh bagian yang akan dibangun termasuk sarana pembuangan air limbah pada SPAM non perpipaan • Gambar dipilih dari opsi Desain yang diberikan oleh Dinas PUPR/Perkim pada saat koordinasi awal. • Jika diperlukan, tim pelaksana di tingkat desa dapat berkonsultasi dengan Dinas PUPR/Perkim Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Gambar desain teknis sarana yang akan dibangun • Informasi tentang kebutuhan material dan jenis-jenis pekerjaan teknis dan non teknis yang akan dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pengelola Kegiatan • Dinas PUPR atau Dinas Perkim atau PDAM Kabupaten
Tahap Konstruksi	Konstruksi sarana air minum yang dibangun, sesuai standar dan spesifikasi teknis yang ditentukan	Kegiatan meliputi: Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tahapan yang ditentukan dalam jadwal pelaksanaan	Terbangunnya sarana air minum sesuai dengan jadwal, biaya, dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan	Pelaksanaan Pembangunan (tukang terlatih/ KPSPAM) dan masyarakat dengan pendampingan dari Tim Pengelola Kegiatan
Uji Kualitas Air	Memastikan air minum yang dihasilkan dari pembangunan SPAM memenuhi kualitas	<p>Uji kualitas meliputi uji fisik (rasa, bau, warna) serta memastikan air tersebut tidak tercemar oleh bakteri</p> <p>Selanjutnya pemantauan kualitas air harus dilakukan secara periodik (minimal setiap 3 bulan) melalui Dinas Kesehatan</p>	Informasi air yang dihasilkan memenuhi unsur kualitas	Sanitarian

LANGKAH-LANGKAH	TUJUAN	URAIAN	HASIL	PELAKU
Uji Coba Sarana	Memastikan seluruh sarana berfungsi dengan baik sesuai dengan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengujian dengan mencoba seluruh sarana air minum yang dibangun berfungsi dengan baik. Sebagai contoh air mengalir cukup (kuantitas, kualitas, tekanan, dan sebagainya). Jika setelah ujicoba dan/atau dilakukan perbaikan sarana berfungsi dengan baik, maka pekerjaan pembangunan dinyatakan selesai dan dapat dilakukan serah terima kepada Mustahik penerima manfaat. 	Sarana berfungsi dengan baik dan siap untuk digunakan	Pelaksana Pembangunan (tukang terlatih/ KPSPAM) dan masyarakat dengan pendampingan dari Tim Pengelola Kegiatan

5.2. PENGADAAN BARANG DAN JASA

5.2.1. Pengadaan Jasa Tukang/Pelaksana Kegiatan

- Untuk pembangunan sarana sanitasi dan SPAM Non Perpipaan, sebagai pelaksana kegiatan pembangunan ditunjuk tukang berpengalaman dari Desa/Kelurahan setempat.
- Sebagai pembantu tukang (peladen) diutamakan mustahik penerima manfaat dan/atau keluarganya.

5.2.2. Untuk pembangunan sarana air minum (sambungan rumah) pelaksanaan penyambungan dikerjasamakan dengan kelompok pengelola, baik yang dikelola oleh KPSPAMS, PAMDES, BUMDES atau oleh PDAMPengadaan Barang

1) Penunjukan Toko Penyedia Bahan Bangunan

- Untuk memastikan ketersediaan bahan material, BAZNAS Kabupaten/Kota bersama Kepala Desa/Kelurahan melakukan survey harga bahan bangunan.
- Survey dilakukan di 3 toko bahan bangunan yang ada di Desa/Kelurahan setempat, paling jauh sampai ke kota kecamatan.
- Pemilik toko mengajukan penawaran yang dilengkapi dengan spesifikasi material dan harganya. Harga yang ditawarkan tidak

boleh melebihi standar harga satuan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

- Toko yang memberikan penawaran terendah dengan spesifikasi standar (SNI) ditunjuk sebagai penyedia bahan bangunan.
- Mustahik dan/atau Pelaksana Pembangunan mengambil bahan bangunan sesuai dengan kebutuhan pada toko yang sudah ditunjuk dengan menyerahkan rincian kebutuhan yang dibiayai melalui dana ZIS.
- Rincian kebutuhan (rangkap 2) ditandatangani oleh Pelaksana Pembangunan dan diketahui oleh Pengawas. Setelah ditandatangani oleh pemilik toko, satu rangkap diserahkan kepada petugas administrasi Desa/Kelurahan dan satu rangkap lagi diserahkan kepada pemilik toko.

2) Pengadaan Material Lokal

- Jika Desa/Kelurahan bersangkutan memiliki sumber material lokal seperti batu, pasir dan bata, maka pengadaannya didorong untuk diswadayakan melalui kegiatan gotong royong dan/atau diserahkan kepada pengusaha lokal atau toko yang telah ditunjuk sebagai penyedia bahan bangunan dengan harga maksimal sesuai harga pasar di Desa/Kelurahan tersebut.
- Jika Desa/Kelurahan bersangkutan tidak memiliki sumber material lokal, untuk pengadaannya dapat ditunjuk pengusaha lokal atau toko yang telah ditunjuk sebagai penyedia bahan bangunan dengan harga maksimal sesuai harga pasar di Desa/Kelurahan tersebut.

WIRA USAHA SANITASI

Jika di Desa/Kelurahan, kecamatan bahkan Kabupaten/Kota yang bersangkutan terdapat Wira Usaha Sanitasi, Tim Pengelola disarankan untuk melakukan kerjasama dengan Wira Usaha Sanitasi tersebut, dengan catatan kualitas sarana yang ditawarkan sesuai dengan standar PU/SNI dan harga yang ditawarkan terjangkau.

Kerjasama ini akan dapat mempercepat proses dan adanya jaminan kualitas karena mereka sudah berpengalaman dalam membangun sarana sanitasi. Partisipasi masyarakat masih tetap dibutuhkan untuk mengurangi pembiayaan.

PENGELOLAAN KEUANGAN

5.2.3. Transfer Dana

- Setelah menerima keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota tentang penetapan mustahik penerima manfaat, BAZNAS Provinsi mentransfer seluruh dana yang dibutuhkan kepada BAZNAS Kabupaten/Kota sebagai dana hibah program
- Dana yang diterima dari BAZNAS Provinsi melalui rekening BAZNAS Kabupaten/Kota kemudian dicantumkan dalam lampiran 2 RKAT pada nomor 1.4.1. penerimaan dari dana sosial keagamaan lainnya, dan pada lampiran 4 pada nomor 2.4.2 kesehatan dan 2.4.3 penyaluran DSKL untuk kemanusiaan.
- Pengelolaan dana dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota. Bantuan diberikan kepada mustahik dalam bentuk barang dan jasa.

5.2.4. Pembayaran

- Pembayaran oleh bendahara disesuaikan dengan transaksi yang terjadi dan diajukan tertulis oleh pelaksana dan diketahui pengawas
- Pembayaran akhir dilakukan setelah pekerjaan selesai yang dibuktikan oleh adanya berita acara yang ditanda tangani pelaksana dan pengawas
- Tanda bukti pembayaran oleh bendahara adalah kwitansi yang ditanda tangani mustahik penerima manfaat dilampirkan faktur dari toko penyedia bahan bangunan
- Untuk kelancaran pengelolaan dana ditunjuk seorang bendahara khusus pengeluaran dan seorang tenaga administrasi dan ditetapkan dengan keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota
- Bendahara yang dibantu tenaga administrasi menyelenggarakan buku kas umum dan buku pembantu sesuai kebutuhan

5.3. PELAPORAN

- Staf administrasi Desa/Kelurahan membuat laporan realisasi fisik (0%, 50% dan 100%) dan disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten/Kota
- Pada akhir pekerjaan, bendahara wajib membuat Laporan Akhir (realisasi fisik dan keuangan), mengetahui Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota dengan melampirkan :
 - a. Buku kas umum Bendahara
 - b. Laporan realisasi fisik (0%, 50% dan 100%) dan keuangan dari bendahara

- c. Tanda bukti berupa kwitansi yang dilampirkan faktur dari toko penyedia bahan bangunan
- Laporan dari BAZNAS Kabupaten/Kota kemudian direkap dan BAZNAS Provinsi kemudian melakukan audit dengan menggunakan jasa auditor eksternal
- Rekomendasi hasil audit kemudian disampaikan ke BAZNAS Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti

5.4. PEMANTAUAN

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan kegiatan pembangunan sarana air minum dan sanitasi aman sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, baik dari segi waktu pelaksanaan maupun kualitas sarana yang dibangun. Hasil kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan.

5.4.1. Jenis Kegiatan Pemantauan

1) Pemantauan oleh Masyarakat.

- Pemantauan oleh masyarakat sekitar dapat dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, termasuk didalamnya adalah kesesuaian target penerima (mustahik) dan kesesuaian dengan perencanaan teknis. Manfaat lain adalah adanya proses edukasi kepada masyarakat sekitar tentang pembangunan jamban/MCK layak menuju sanitasi aman.
- Para Muzakki, Munfiq, Mutashaddiq dan masyarakat lainnya dapat melakukan pemantauan melalui media sosial seperti facebook dan/atau Website yang dikelola oleh BAZNAS.

2) Pemantauan oleh Tim Pengelola.

- Pemantauan oleh Tim Pengelola berkaitan dengan kinerja pelaksana pembangunan terutama ketepatan waktu, kesesuaian dengan Desa/Kelurahan dan kualitas pekerjaan.
- Untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi di tingkat Desa/Kelurahan dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan (maksimal 60 hari setelah transfer dana), Tim Pengelola dapat memberi input strategi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan.

3) Pemantauan oleh BAZNAS dan/atau Pokja AMPL

- Pemantauan pelaksanaan pembangunan oleh BAZNAS dan/atau Pokja AMPL dilakukan minimal 3 kali selama pembangunan sarana berlangsung, yaitu pada awal, pertengahan dan akhir.
- Pemantauan dilakukan melalui laporan perkembangan fisik yang disampaikan oleh Tim Pengelola (0%, 50%, dan 100%) atau melalui media sosial seperti facebook dan/atau Website yang dikelola oleh BAZNAS.
- Pemantauan juga dapat dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke lapangan.

5.4.2. Instrumen Pemantauan

1) Media Sosial dan/atau Website Resmi yang dikelola oleh BAZNAS

BAZNAS mulai dari tingkat pusat sampai Kabupaten/Kota mengelola Website bahkan media sosial lainnya seperti facebook. Media-media ini dapat dioptimalkan pemanfaatannya dengan memuat informasi perkembangan pembangunan sarana air minum dan sanitasi aman di masyarakat, sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaannya. Khusus untuk media sosial, pengelola dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat yang melakukan pemantauan, termasuk menerima pengaduan masyarakat atas hasil pemantauan yang dilakukan.

2) Laporan Perkembangan dan Laporan Akhir

Tim Pengelola Pembangunan Sarana melalui BAZNAS Kabupaten/Kota diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) pada tahap awal, pertengahan dan akhir (0%, 50% dan 100%) serta Laporan Akhir setelah pelaksanaan pembangunan berakhir. Laporan dilengkapi dengan foto-foto kegiatan dan kondisi sarana yang dibangun.

3) Website STBM

Website resmi yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan ini memuat perkembangan jumlah sarana dan pemanfaat sanitasi aman. Website ini juga memuat informasi per Desa/Kelurahan dan informasinya diupdate oleh sanitarian, sehingga dapat digunakan untuk memantau pembangunan sarana sanitasi yang dibiayai dengan dana ZIS. Sanitarian Puskesmas wajib melakukan input data jumlah jamban terbangun pada website monev STBM.

4) Kunjungan Lapangan

Kegiatan pemantauan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung di masing-masing Desa/Kelurahan lokasi, untuk melakukan pengendalian tentang status pelaksanaan kegiatan dan coaching yang dibutuhkan, serta monitoring terhadap pemanfaatan dana ZIS yang sudah dicairkan untuk memastikan kualitasnya tercapai, serta memastikan transparansi dan akuntabilitasnya

Jika dalam proses pemantauan ditemukan penyimpangan dalam proses pembangunan, penanganannya akan dilakukan secara berjenjang.

5.5. UJI FUNGSI

Jika pembangunan sarana sudah selesai dilakukan, tim pelaksana bersama BAZNAS Kabupaten/Kota dan Pokja AMPL/Pokja PPAS akan melakukan uji fungsi untuk memastikan bahwa sarana yang dibangun sudah sesuai dengan rencana dan dapat berfungsi dengan baik. Rekomendasi uji fungsi akan menjadi bahan perbaikan oleh Tim Pelaksana

5.6. SERAH TERIMA SARANA

Serah terima sarana dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota kepada mustahik setelah memastikan bahwa rekomendasi hasil uji fungsi ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana. Serah terima ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima. Kegiatan ini menandai bahwa pembangunan sarana sudah selesai dilakukan.

PASCA KONSTRUKSI

5.6.1. Operasional dan Pemeliharaan

- Untuk memastikan sarana yang dibangun digunakan dan berkelanjutan, Sanitarian bersama Kepala Desa/Kelurahan dan dibantu oleh BABINSA melakukan pemantauan dan memastikan sarana yang dibangun dimanfaatkan dan dipelihara oleh mustahik;
- Mustahik harus memahami kewajiban-kewajiban dalam memanfaatkan sarana sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh pengelola atau sesuai ketentuan regulasi yang sudah diatur, seperti ketentuan tarif, retribusi ataupun iuran;
- Memastikan mustahik melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama seperti membayar iuran untuk pemakaian air minum.

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN TANGKI SEPTIK

PENGOPERASIAN

- memastikan pipa ventilasi tidak tersumbat sama sampah atau benda lain yang dapat menimbulkan bau;
- menjaga agar sampah atau benda lain tidak menyumbat toilet, saluran, dan tangki septik;
- menjaga agar bahan kimia berbahaya tidak masuk ke tangki septik yang dapat mengganggu proses biologis;
- memantau kondisi lumpur dan scum di tangki septik serta kondisi lahan resapan paling sedikit 2 – 3 tahun; dan

PEMELIHARAAN

- mengamati perubahan area yang dapat mempengaruhi kondisi prasarana tangki septik, seperti gempa bumi, renovasi rumah, penurunan permukaan tanah;
- menjaga prasarana tangki septik dalam kondisi baik dengan memeriksa tinggi akumulasi lumpur, tidak menempatkan benda yang berat (contoh: mobil) di atas tangki septik dan bidang resapan;
- mengamati perubahan bau yang timbul di area tangki septik dan area bidang resapan yang dapat menjadi indikasi awal kondisi pengolahan tangki septik tidak optimal; dan
- memperhatikan luapan air pada saat penggelontoran, yang dapat menjadi indikasi kondisi tangki septik penuh.
- menyedot lumpur tinja secara berkala setidaknya 1 kali dalam 2-3 tahun

PERAWATAN SARANA AIR MINUM

- menjaga kebersihan sarana
- melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan
- memastikan tidak terjadi perubahan rasa, bau dan warna
- memastikan tidak terjadi pencemaran dari luar
- membayar iuran secara rutin, untuk sambungan rumah

5.6.2. Mewujudkan Desa ODF/SBS

- Sanitarian dan Kepala Desa/Kelurahan melakukan upaya untuk mendorong seluruh masyarakat Desa/Kelurahan tidak lagi melakukan BAB sembarangan. Alokasi anggaran dalam APBDes untuk mengembangkan media promosi kesehatan dan sanitasi serta membantu mustahik lainnya memiliki sarana sanitasi aman menjadi pilihan untuk mempercepat proses ODF.

- Jika perilaku ODF di masyarakat sudah terbangun, Sanitarian bersama Tim Kabupaten/Kota akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa semua orang di Desa/Kelurahan sudah melakukan BAB di sarana sanitasi aman.
- Jika berdasarkan hasil verifikasi Desa/Kelurahan sudah dinyatakan ODF, maka Kepala Desa/Kelurahan dapat melakukan deklarasi ODF yang ditandai dengan penyerahan Sertifikat ODF oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

5.6.3. Menuju Sanitasi Aman

1) Sosialisasi Sanitasi Aman

- Untuk mewujudkan sanitasi aman, masyarakat perlu diberikan penjelasan secara berkesinambungan.
- BAZNAS dapat memberikan dukungan dengan mengembangkan media-media promosi, khutbah-khutbah jumat dengan materi sanitasi aman serta melatih Da'i Sanitasi untuk melakukan sosialisasi.

2) Layanan Sedot Tinja

- Pendayagunaan dana ZIS dapat digunakan untuk membantu mustahik melakukan sedot tinja
- BAZNAS melakukan kerjasama dengan operator penyedotan tinja, baik pihak swasta maupun operator dari pemerintah.
- Mustahik akan diberikan bantuan dalam bentuk voucher, yang nanti akan diserahkan kepada operator setelah melakukan sedot tinja.
- Penagihan pembayaran akan dilakukan oleh operator kepada BAZNAS dengan melampirkan bukti voucher

3) Dukungan Regulasi

- Untuk mempercepat pencapaian target sanitasi aman ditingkat desa, dibutuhkan dukungan regulasi desa berupa Peraturan Desa
- Peraturan Desa mengatur agar masyarakat secara konsisten menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta memastikan warga melakukan penyedotan tinja secara rutin (2-3 tahun sekali).

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Eri, dkk. 2016. **Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat Tangki Septik Dengan Up-Flow Filter**, Jakarta. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR
- Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gerakan BASNO (Buang Air Besar Sembarangan Nol) Provinsi NTB, <https://dinkes.ntbprov.go.id/basno/>., diupload tanggal 4 September 2017, Diakses tanggal 06 Februari 2020 pukul 22.18
- Divisi Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2017. **SEBUAH KAJIAN ZAKAT ON SDGS; Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah**. Jakarta. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Idhom Addi M, Agung DH (ed). Peraturan Detail Septic Tank Ideal dan Jarak Aman dengan Sumur. <https://tirto.id/peraturan-detail-septic-tank-ideal-dan-jarak-aman-dengan-sumur-el3p>. Upload tanggal 20 November 2019. Download tanggal 10 Oktober 2020.
- Pamsimas, 2016. **Pedoman Umum Program Pamsimas**. Jakarta. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.
- Pamsimas, 2016. **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat Program Pamsimas**. Jakarta. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.
- Prabowo, Hayu. 2016. **Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air dan Sanitasi Masyarakat**. Jakarta. Majelis Ulama Indonesia.
- Puskas BAZNAS. 2019. **Indeks BAZNAS Untuk Keberlanjutan Air Bersih dan Sanitasi (BI-WAS) : Kajian Konseptual**. Jakarta. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS)
- Puslitbang Perumahan dan Permukiman, 2016. **Panduan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perdesaan - 07 :“Mandi Cuci Kakus Berbahan Daur Ulang”**. Puslitbang Perumahan dan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Republik Indonesia. 2020. **Ringkasan Eksekutif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan**. Sekretariat Negara, Jakarta
- Water and Sanitation Program East Asia and the Pacific (WSP-EAP). 2009. **Informasi Pilihan Jamban Sehat**. Jakarta. The World Bank
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- SNI 2398 Tahun 2017, **Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Pengolahan Lanjutan (Sumur Resapan, Bidang Resapan, Up-flow Filter, Kolam Sanita)**

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sanitasi Perdesaan Padat Karya (SANDES) tahun 2020, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR

Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi, 2012, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Lampiran IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Penyediaan Sistem Air Minum.

Puslitbang Permukiman, 2014. Modul Sosialisasi dan Diseminasi Standar Pedoman dan Manual :“Sumur Gali”. Puslitbang Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum

Puslitbang Permukiman, 2014. Modul Sosialisasi dan Diseminasi Standar Pedoman dan Manual :“Penampungan Air Hujan”. Puslitbang Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum

Puslitbang Permukiman, 2014. Modul Sosialisasi dan Diseminasi Standar Pedoman dan Manual :“Sumur Pompa Tangan untuk Air Bersih”. Puslitbang Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum

Puslitbang Permukiman, 2014. Modul Sosialisasi dan Diseminasi Standar Pedoman dan Manual :“Spesifikasi Meter Air”. Puslitbang Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum

Puslitbang Permukiman, 2014. Modul Sosialisasi dan Diseminasi Standar Pedoman dan Manual :“Terminal Air”. Puslitbang Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum

Lampiran 1

Metode Pengujian dengan BI-WAS²

Terdapat empat dimensi dalam indikator BAZNAS untuk sustainable clean and safe water and sanitation (BI-WAS). Setiap dimensi diterjemahkan kedalam beberapa variabel untuk pengukuran lebih dalam, seperti Tabel Indikator BAZNAS untuk Sustainable Clean and Safe Water and Sanitation (BI-WAS).

Tabel 1. Indikator BAZNAS untuk Sustainable Clean and Safe Water and Sanitation (BI-WAS)

1. DIMENSI FASILITAS AIR

Variabel	Skala Linkert Pengukuran					Sumber
	1	2	3	4	5	
1). Akses terhadap air	<20% rumah penduduk memiliki akses terhadap air (air ledeng, mata air atau sumur)	20%-39% rumah penduduk memiliki akses terhadap air (air ledeng, mata air atau sumur)	40%-59% rumah penduduk memiliki akses terhadap air (air ledeng, mata air atau sumur)	60%-80% rumah penduduk memiliki akses terhadap air (air ledeng, mata air atau sumur)	>80% rumah penduduk memiliki akses terhadap air (air ledeng, mata air atau sumur)	SDGs Index 2018 & Dimensi Kesehatan IDZ
2. Ketersediaan Sumber Air	<20% rumah penduduk memiliki sumber air (air ledeng, mata air atau sumur)	20-39% rumah penduduk memiliki sumber air (air ledeng, mata air atau sumur)	40-59% rumah penduduk memiliki sumber air (air ledeng, mata air atau sumur)	60-79% rumah penduduk memiliki sumber air (air ledeng, mata air atau sumur)	>80% rumah penduduk memiliki sumber air (air ledeng, mata air atau sumur)	SDGs Index 2018 & Dimensi Kesehatan IDZ
3. Air Layak Konsumsi	<20% rumah penduduk menggunakan air layak konsumsi untuk masak dan MCK	20%-39% rumah penduduk menggunakan air layak konsumsi untuk masak dan MCK	40%-59% rumah penduduk menggunakan air layak konsumsi untuk masak dan MCK	60%-79% rumah penduduk menggunakan air layak konsumsi untuk masak dan MCK	>80% rumah penduduk menggunakan air layak konsumsi untuk masak dan MCK	Dimensi Kesehatan IDZ & FGD

2. DIMENSI FASILITAS MCK

Variabel	Skala Linkert Pengukuran					Sumber
	1	2	3	4	5	

² Metode Pengujian dengan BI-WAS ini dicuplik dari Buku Kajian Koseptual Indeks BAZNAS untuk Keberlanjutan Air Bersih dan Sanitasi (BI-WAS) yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (ISBN: 978-602-5708-42-8) Tahun 2019. Cuplikan ini hanya menampilkan Indikator, Nilai Bobot Indikator dan Posisi Desa berdasarkan hasil Pengujian dengan BI-WAS.

Variabel	Skala Linkert Pengukuran					Sumber
	1	2	3	4	5	
4. Ketersediaan Kamar Mandi, Jamban atau fasilitas MCK di rumah	<20% rumah penduduk memiliki jamban atau fasilitas MCK di dalam rumah	20%-39% rumah penduduk memiliki jamban atau fasilitas MCK di dalam rumah	40%-59% rumah penduduk memiliki jamban atau fasilitas MCK di dalam rumah	60%-80% rumah penduduk memiliki jamban atau fasilitas MCK di dalam rumah	>80% rumah penduduk memiliki jamban atau fasilitas MCK di dalam rumah	SDGs Index 2018
5. Rasio Jamban dan MCK di Sekolah, Tempat Ibadah, & Tempat Umum Lainnya	<20% rasio 1:25 untuk WC perempuan dan rasio 1:40 untuk WC pria	20%-39% rasio 1:25 untuk WC perempuan dan rasio 1:40 untuk WC pria	40%-59% rasio 1:25 untuk WC perempuan dan rasio 1:40 untuk WC pria	60%-80% rasio 1:25 untuk WC perempuan dan rasio 1:40 untuk WC pria	>80% rasio 1:25 untuk WC perempuan dan rasio 1:40 untuk WC pria	Permenkes no. 3 tahun 2014 tentang STBM
6. Ketersediaan Septic Tank di area rumah	<20% rumah penduduk memiliki septic tank di sekitar rumah	20%-39% rumah penduduk memiliki septic tank di sekitar rumah	40%-59% rumah penduduk memiliki septic tank di sekitar rumah	60%-80% rumah penduduk memiliki septic tank di sekitar rumah	>80% rumah penduduk memiliki septic tank di sekitar rumah	SDGs Index 2018 & Permenkes No. 3 tahun 2014
7. Ketersediaan tempat cuci tangan di rumah	<20% rumah penduduk memiliki tempat cuci tangan di dalam rumah	20%-39% rumah penduduk memiliki tempat cuci tangan di dalam rumah	40%-59% rumah penduduk memiliki tempat cuci tangan di dalam rumah	60%-80% rumah penduduk memiliki tempat cuci tangan di dalam rumah	>80% rumah penduduk memiliki tempat cuci tangan di dalam rumah	Permenkes No. 3 tahun 2014 tentang STBM
8. Ketersediaan sabun cuci tangan	<20% rumah penduduk menyediakan sabun cuci tangan di dalam rumah	20%-39% rumah penduduk menyediakan sabun cuci tangan di dalam rumah	40%-59% rumah penduduk menyediakan sabun cuci tangan di dalam rumah	60%-80% rumah penduduk menyediakan sabun cuci tangan di dalam rumah	>80% rumah penduduk menyediakan sabun cuci tangan di dalam rumah	FGD with Experts, Permenkes No. 3 tahun 2014

3. DIMENSI KEBERSIHAN

Variabel	Skala Linkert Pengukuran					Sumber
	1	2	3	4	5	
9. Sumber Air Minum	<20% rumah penduduk memiliki sumber air minum yang bersih dan terlindungi meliputi air ledeng, tanki air, mata air atau air kemasan	20%-39% rumah penduduk memiliki sumber air minum yang bersih dan terlindungi meliputi air ledeng, tanki air, mata air atau air kemasan	40%-59% rumah penduduk memiliki sumber air minum yang bersih dan terlindungi meliputi air ledeng, tanki, mata air atau air kemasan	60%-80% rumah penduduk memiliki sumber air minum yang bersih dan terlindungi meliputi air ledeng, tanki air, mata air atau air kemasan	>80% rumah penduduk memiliki sumber air minum yang bersih dan terlindungi meliputi air ledeng, tanki air, mata air atau air kemasan	Kepmeni Kesehatan RI No.907/Menkes/SK/VII/2002
10. Jarak Septic Tank dengan sumber air	<20% rumah penduduk memiliki sumber air yang jaraknya 10	20-39% rumah penduduk memiliki sumber air yang jaraknya 10	40-59% rumah penduduk memiliki sumber air yang jaraknya 10	60-80% rumah penduduk memiliki sumber air yang jaraknya 10	>80% rumah penduduk memiliki sumber air yang jaraknya 10	Permenkes No. 3 tahun 2014 & Dimensi Kesehatan IDZ

Variabel	Skala Linkert Pengukuran					Sumber
	1	2	3	4	5	
	m dari septic tank	m dari septic tank	m dari septic tank	m dari septic tank	m dari septic tank	
11. Pembersihan Septic tank	<20% rumah penduduk melakukan pembersihan septic tank secara berkala	20%-39% rumah penduduk melakukan pembersihan septic tank secara berkala	40%-59% rumah penduduk melakukan pembersihan septic tank secara berkala	60%-79% rumah penduduk melakukan pembersihan septic tank secara berkala	>80% rumah penduduk melakukan pembersihan septic tank secara berkala	FGD with Experts & Permenkes No. 3 tahun 2014
12. Ketersediaan Tempat Sampah	<20% penduduk memiliki tempat pembuangan sampah	20%-39% penduduk memiliki tempat pembuangan sampah	40%-59% penduduk memiliki tempat pembuangan sampah	60%-79% penduduk memiliki tempat pembuangan sampah	>80% penduduk memiliki tempat pembuangan sampah	Permenkes No. 3 tahun 2014 tentang STBM

4. DIMENSI PERILAKU

Variabel	Skala Linkert Pengukuran					Sumber
	1	2	3	4	5	
13. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Rumah tangga tidak memiliki kepedulian dalam mengelola sampah	Rumah tangga membuang sampah dengan cara ditimbun dan/atau di-bakar dan/atau dibuang di sungai	Rumah tangga menggunakan layanan angkut sampah	Rumah tangga melakukan: (i) menggunakan layanan angkut sampah; (ii) pemilahan sampah organik dan non-organik	Rumah tangga : (i) menggunakan layanan angkut sampah; (ii) pemilahan sampah organik & non-organik; (iii) mengelola limbah sampah sehingga menghasilkan nilai ekonomis	Permenkes No. 3 tahun 2014 tentang STBM
14. Tidak melakukan Buang Air Besar dan kecil sembarangan	<20% penduduk tidak buang air besar dan air kecil sembarangan	20%-39% penduduk tidak buang air besar dan air kecil sembarangan	40%-59% penduduk tidak buang air besar dan air kecil sembarangan	60%-79% penduduk tidak buang air besar dan air kecil sembarangan	>80% penduduk tidak buang air besar dan air kecil sembarangan	FGD Resch. Puskas & Water. Org. , Permenkes No. 3 th 2014
15. Cuci tangan menggunakan sabun setelah buang air besar dan kecil	<20% penduduk cuci tangan menggunakan sabun setelah buang air besar dan kecil	20%-39% penduduk cuci tangan menggunakan sabun setelah buang air besar dan kecil	40%-59% penduduk cuci tangan menggunakan sabun setelah buang air besar dan kecil	60%-79% penduduk cuci tangan menggunakan sabun setelah buang air besar dan kecil	>80% penduduk cuci tangan menggunakan sabun setelah buang air besar dan kecil	Permenkes No. 3 tahun 2014 tentang STBM

Tabel. Nilai Bobot Indikator BI-WAS

No	Dimensi	Bobot (%)	Variabel	Bobot (%)
1	Fasilitas Air	27	1. Akses terhadap air	32
			2. Ketersediaan Sumber Air	36
			3. Air Layak Konsumsi	32

			Total Bobot	100
2	Fasilitas MCK	24	4. Ketersediaan dan Kamar Mandi Jamban atau fasilitas MCK di rumah	25
			5. Rasio Kamar Mandi dan Jamban dan MCK di Sekolah, Tempat Ibadah, dan Tempat Umum lainnya	21
			6. Ketersediaan Septic Tank di area rumah	22
			7. Ketersediaan tempat cuci tangan di rumah	16
			8. Ketersediaan sabun cuci tangan	16
			Total Bobot	100
3	Kebersihan	21	9. Sumber Air Minum	29
			10. Jarak Septic Tank dengan sumber air	23
			11. Pembersihan Septic tank	23
			12. Ketersediaan Tempat Sampah	25
			Total Bobot	100
4	Perilaku	28	13. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	32
			14. Tidak melakukan open Defecation Free (ODF – Buang Air Besar dan kecil Sembarangan)	37
			15. Cuci tangan menggunakan sabun setelah buang air besar dan kecil	31
Total Bobot Dimensi		100	Total Bobot	100

Hasil pengujian dengan BI-WAS akan menentukan posisi Desa/Kelurahan :

Rentang Nilai (%)	Definisi Rentang Nilai	Interpretasi	Implikasi
0 – 20	Keadaan daerah yang dikaji sangat tidak ideal dengan indikator BI-WAS	Kesadaran masyarakat dan kondisi sanitasi total tidak baik	Keberadaan program BAZNAS sangat dibutuhkan
21 – 40	Keadaan daerah yang dikaji tidak ideal dengan indikator BI-WAS	Kesadaran masyarakat dan kondisi sanitasi total kurang baik	Keberadaan program BAZNAS dibutuhkan
41 – 60	Keadaan daerah yang dikaji cukup ideal dengan indikator BI-WAS	Kesadaran masyarakat dan kondisi sanitasi total cukup baik	Keberadaan program BAZNAS cukup dibutuhkan
61 – 80	Keadaan daerah yang dikaji ideal dengan indikator BI-WAS	Kesadaran masyarakat dan kondisi sanitasi total baik	Keberadaan program BAZNAS kurang dibutuhkan*)
81 – 100	Keadaan daerah yang dikaji sangat ideal dengan indikator BI-WAS	Kesadaran masyarakat dan kondisi sanitasi total sangat baik	Keberadaan program BAZNAS tidak dibutuhkan*)
Keterangan: *) diperlukan validasi observasi lebih lanjut			

Lampiran 2

Metode Targeting 'Peringkat Kesejahteraan'³

- Tujuan** :
- Menentukan secara bersama peringkat kesejahteraan mustahik di wilayah setempat
 - Memutuskan secara bersama mustahik yang paling berhak menerima bantuan ZIS untuk pembangunan sarana penyediaan air minum dan/atau sanitasi
- Alat dan Bahan** :
1. Metaplan (kartu dari karton berbagai warna)
 2. Spidol besar permanent
 3. Paper clip
 4. Tali nilon kecil
 5. Palu dan paku dan/atau lainnya untuk memasang tali nilon
- Kebutuhan Waktu** : 60 menit

PROSES :

A. PERSIAPAN

1. Lobangi metaplan pada bagian tengah atas dan pasang paper clip pada lobang tersebut. Tujuannya adalah agar metaplan tersebut mudah dipasang dan/atau dibuka serta dipindahkan pada tali nilon
2. Tuliskan nama semua mustahik hasil verifikasi pada metaplan tersebut. Satu metaplan hanya untuk satu nama mustahik. Tulisan harus besar agar terbaca oleh peserta diskusi.
3. Bentangkan tali nilon kecil di ruangan diskusi (dari dinding ke dinding atau menggunakan tiang). Posisi pemasangan di depan peserta (mudah dilihat oleh semua peserta diskusi)

B. PELAKSANAAN DISKUSI

³ Metode ini diadopsi dari Metode Hybrida – Seluruh Masyarakat – Diskusi 10 Rumah Tangga Termiskin yang dikembangkan oleh Mitra Samya dan JPAL (2008). Metode ini merupakan salah satu opsi jika proses penentuan mustahik yang akan menerima dan ZIS untuk pembangunan air minum dan/atau sanitasi, terutama jika prosesnya berpotensi menimbulkan konflik.

1) Pengantar (5 menit)

- Sampaikan salam dan terimakasih kepada nasyarakat yang hadir untuk bersama-sama diskusi menyusun peringkat kesejahteraan masyarakat.
- Uraikan secara singkat mengapa kegiatan ini dilakukan : *"BAZNAS akan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shodakoh untuk membangun sarana air minum dan/atau sanitasi bagi mustahik di desa ini. Dari hasil verifikasi diperoleh data jumlah mustahik yang layak menerima sebanyak....orang, sementara Quota yang diberikan oleh BAZNAS sebanyak....orang. Jadi harus kita sepakati siapa yang paling berhak untuk menerima dana ZIS ini menurut warga sendiri"*

2) Updating daftar Mustahik Hasil Verifikasi (10 menit)

- Perlihatkan daftar Kepala Rumah Tangga Mustahik hasil verifikasi yang sudah ditulis dalam kartu metaplan.
- Baca satu persatu nama-nama Kepala Rumah Tangga Mustahik (Kepala Rumah Tangga dan Pendamping Kepala Rumah Tangga-nya) tersebut.
- Setelah membaca semua nama-nama Kepala Rumah Tangga Mustahik, tanyakan: *Apakah ada daftar Rumah Tangga Mustahik yang belum masuk?. Apakah ada Kepala Rumah Tangga Mustahik yang sudah disebutkan tinggal dalam satu rumah?.*
- Tuliskan nama Kepala Rumah Tangga Mustahik yang belum masuk dalam daftar.
- Jika ada kartu yang harus dicabut karena berbagai sebab seperti double penulisan, updating dan karena double Rumah Tangga, maka kartu tersebut harus dicabut sebelum masuk proses ranking.

3) Identifikasi/Diskusi Kategori dan Kriteria Sosial Ekonomi Masyarakat (10 menit)

- Jelaskan bahwa selanjutnya peserta akan menentukan dan menyusun kategori dan kriteria social ekonomi masyarakat menurut ukuran masyarakat desa ini dan bukan menurut ukuran orang luar.
- Tanyakan, *"Apakah ada perbedaan tingkat kehidupan satu Rumah Tangga dengan Rumah Tangga lainnya di desa ini?".* Tunggu sampai ada peserta yang menjawab "ada". Kemudian lanjutkan dengan pertanyaan *"Faktor-faktor apa saja yang membedakan kehidupan antar Rumah Tangga tersebut?".*
- Tulis saja faktor-faktor apapun yang disebutkan peserta kedalam kartu metaplan, 1 kartu untuk 1 faktor. Upayakan untuk menemukan seperti faktor perumahan, kesehatan, pendidikan, pendapatan, dll, tanpa harus menjelaskan.
- Jika faktor yang muncul lebih dari 4, maka ajak peserta untuk mencari "Faktor Utama" yang membedakan tingkat kehidupan antar rumah tangga di wilayah tersebut dengan bertanya "Faktor utama apa yang paling membedakan tingkat kehidupan rumah tangga di desa ini?".
- Selanjutnya faktor-faktor dikelompokkan menjadi maksimal 3 atau 4 faktor utama.
- Untuk menemukan kategori paling atas dan paling bawah, tanyakan: *"Berdasarkan faktor/aspek pembeda kehidupan satu rumah tangga dengan"*

rumah tangga lainnya di desa ini, biasa disebut apa untuk orang yang tingkat kehidupannya paling bawah?, dan disebut apa untuk orang yang tingkat kehidupannya paling atas?."

- Tulis ke-2 kategori paling bawah dan paling atas dengan 2 warna kartu berbeda. Misalnya paling bawah adalah "Tidak Mampu" dan paling atas adalah "Lebih Mampu". Warna ini juga akan digunakan pada saat menyusun ranking rumah tangga.

4) Diskusi Menyusun Peringkat Kesejahteraan Rumah Tangga (30 menit)

- Tuliskan istilah kategori 'tidak mampu' dan 'lebih mampu' ditempel pada 2 bagian ujung tali berseberangan. Pasang kartu kategori "lebih mampu" di bagian kanan ujung tali di hadapan peserta yang akan mendapat peringkat paling besar dan "tidak mampu" pada ujung bagian kiri.
- Ambil 2 kartu yang sudah bertuliskan nama kepala rumah tangga mustahik dan tunjukkan ke peserta diskusi. Minta peserta membandingkan keadaan 2 rumah tangga tersebut dengan menanyakan "*Rumah Tangga mana yang lebih mampu ?*". Ingatkan bahwa peserta harus membandingkan satu sama lain, karena semua rumah tangga pasti ada perbedaan sekecil apapun.
- Tunjuk ke sisi tali yang menunjukkan 'lebih mampu' dan disisi lain 'tidak mampu'. Tempatkan 2 kartu tersebut secara terpisah sesuai dengan posisi kecenderungan pendapat peserta ke arah lebih mampu atau tidak mampu miskin.
- Fasilitator mengambil kartu ke-3 dari tumpukan kartu dan menanyakan ke peserta "Apakah Rumah Tangga ini (sebut nama) lebih mampu dari kartu 1?" Setelah dijawab kemudian tanyakan juga "apakah lebih mampu dari kartu 2?". Kartu ketiga harus dibandingkan dengan ke 2 kartu yang sudah dipasang sebelumnya. Contohnya adalah seperti gambar berikut:



- Contoh : untuk masuk pada kartu ke-5 misalnya dengan nama rumah tangga "A". Tanyakan "*Apakah Rumah Tangga "A", lebih mampu dari Lina?*", Jika dijawab **ya** lanjutkan dengan pertanyaan "*apakah lebih mampu dari Titik?*" Jika dijawab **tidak**, maka kartu tersebut berada diantara kartu Lina dan Titik. Maka pastikan dengan pernyataan terakhir "*Berarti Rumah Tangga "A" lebih mampu dari Lina dan di bawah Titik, benar ini?*". Tetapi jika dijawab **ya...**, tanyakan lagi "*apakah lebih mampu dari Icha?*".

Proses ini terus untuk selalu membandingkan dengan mengambil di bagian tengah rangkaian kartu sampai posisi benar-benar berada diantara 2 kartu atau justru paling atas atau paling bawah.

- Proses ini terus dilakukan hingga semua kartu Rumah Tangga Mustahik diranking oleh peserta, dan akan membentuk gantungan kartu-kartu berdasarkan peringkatnya dari 'paling miskin' sampai 'lebih mampu' yang memanjang sepanjang tali.
- Pada akhir proses ranking, minta salah seorang peserta untuk membaca kembali urutan ranking tersebut.
- Minta peserta untuk mengoreksi hasil peringkat jika masih ada yang perlu dirubah atau salah penempatan. Jika ada perbaikan dan sudah dilakukan, tanyakan kembali "*Apakah hasil ini sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan?*".
- Berikan penghargaan dengan tepuk tangan dan sampaikan bahwa hasil yang dicapai sangat luar biasa, berkat pemikiran dan pendapat para peserta pertemuan.

5) Penandatanganan berita acara (3 menit)

- Setelah ranking disetujui, bacakan lembar berita acara, dan kemudian minta Ketua RT atau Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan dan 1 orang wakil peserta untuk membubuhkan tandatangan di atas lembar berita acara dan disaksikan peserta lainnya.
- Sampaikan bahwa karena keterbatasan kuota yang tersedia, maka mustahik yang akan menerima bantuan pembangunan sarana air bersih dan/atau sanitasi dari BAZNAS akan diambil dari urutan paling tidak mampu sampai terpenuhinya kuota.

6) Salam penutup (2 menit)

- Sampaikan terimakasih atas hasil luar biasa yang sudah diperoleh.
- Minta pejabat setempat untuk memberikan kesan dan pesan serta kata penutup.
- Sepakati jadwal untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya.

LAMPIRAN 3

OPSI TEKNOLOGI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Referensi:

- SK Gub 902-598 Tahun 2020 tentang SSH
- Permen PUPR No 04/2017
- WSP-EAP, 2019 tentang Pilihan Jamban Sehat
- SNI 2398 Tahun 2017

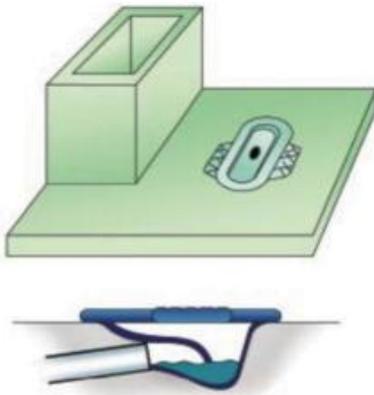
Tatacara Pemilihan Teknologi Air Limbah Domestik

1. Pemilihan opsi teknologi air limbah domestik disesuaikan dengan kebutuhan mustahik, yaitu:
 - Jika tempat tinggal mustahik berjauhan, maka sistem individual lebih diutamakan (tangki septik individual)
 - Jika beberapa mustahik tempat tinggalnya saling berdekatan, maka opsi tangki septik komunal direkomendasikan
 - Pemilihan opsi bangunan atas dilakukan jika mustahik telah memiliki fasilitas bangunan bawah sesuai standar (tangki septik kedap)
2. Pemilihan opsi teknologi air limbah domestik individual dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - Ketersediaan material atau bahan fabrikasi di lokasi mustahik sasaran & jumlah/kuantitas penyediaan sarana tangki septik
 - Jika jumlah sarana cukup banyak dan ketersediaan sarana fabrikasi mudah dilakukan, maka direkomendasikan material fabrikasi
 - Jika jumlah sarana sedikit dan penyediaan sarana fabrikasi dinilai tidak efisien, maka penyediaan dilakukan dengan membangun secara konvensional dengan mengikuti ketentuan spesifikasinya
3. Pemilihan opsi teknologi air limbah domestik secara komunal dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - Tempat tinggal mustahik saling berdekatan, maka sistem komunal direkomendasikan
 - Jika di lokasi sasaran telah tersedia jaringan IPAL perpipaan, maka direkomendasikan dengan fasilitas Sambungan Rumah (SR)

SARANA INDIVIDU

BANGUNAN ATAS - JAMBAN/KLOSET

Desain Tipikal



Rancangan Anggaran Biaya

No	Bahan/Upah	Ukuran Dipasar	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Bahan Lokal						
1.	Batu Bata	-	buah	250	1,066	266,500
2.	Pasir Pasang	-	m ³	1	188,175	188,175
3.	Kerikil	-	m ³	0,25	195,702	48,925
Bahan Toko						
4.	Semen	50 kg	zak	1	74,016	74,016
5.	Kloset Leher Angsa		unit	1	175,000	137,995
6.	Pipa Pvc Type-C Φ 3"	4 m	m	2	84,470	168,940
Upah						
7.	Tukang Terampil	-	oh	1	120,000	120,000
Jumlah Harga						1,004,551
Catatan : Dudukan jamban ukuran rata-rata 0,90 x 0,90 dengan kloset leher angsa dengan bak air						

Spesifikasi Teknis

- Menggunakan pasangan ½ batu bata dengan ukuran P = 1,25 m; L = 1,25 m; T = 2 m
- Dilengkapi dengan peralatan penampung air perapat dengan ukuran 50 mm-100 mm
- Tempat kaki harus dibuat
- Diameter lubang pemasangan tinja minimal 75 mm
- Jarak antar dinding bangunan sampai ke kloset minimum 20 cm - 25 cm
- Dudukan kloset jongkok ditinggikan minimum 10 cm dari lantai dengan kemiringan lantai 1% dan dilengkapi dengan floordrain

BANGUNAN ATAS – JAMBAN DALAM RUMAH

Desain Tipikal



Rancangan Anggaran Biaya

No	Bahan/Upah	Ukuran Dipasar	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
Bahan Lokal							
1	Batu Bata	-	buah	700	1,066	746,200	
2	Pasir Pasang	-	m ³	5	188,175	940,875	
3	Balok Kayu (kusen) 6 x 10 cm	4 m	m	4	80,000	320,000	
	Usuk Kayu 4 x 6 cm	4 m	batang	4	18,000	72,000	
4	Reng 3x4 cm	4 m	batang	6	41,399	248,394	
Bahan Toko							
5	Semen	50 kg	zak	3	74,016	222,048	
6	Tripleks 5 mm	90 x 210 cm	lembar	2	87,815	175,630	
7	Engsel Besi/Kupu-kupu	-	pasang	1	12,545	12,545	
8	Grendel Pintu	-	unit	1	18,818	18,818	
9	Tarikan Pintu	-	unit	1	131,000	131,000	
10	Paku		campuran	kg	0,25	25,090	6,272
Upah							
11	Tukang Terampil	-	OH	4	120,000	480,000	
Jumlah Harga						3,373,782	

SARANA INDIVIDU

BANGUNAN ATAS – JAMBAAN LUAR RUMAH

Desain Tipikal



Dinding Bambu

Rancangan Anggaran Biaya

No	Bahan/Upah	Ukuran Dipasar	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Bahan Lokal						
1	Dinding Bambu (Gedek)	2 x 3 m ²	lembar	3	147,278	441,834
2	Batang Bambu	4m	batang	12	29,481	353,772
3	Tali Bambu		meter	3	28,000	84,000
4	Atap rumbia/Nipah/Seng	Lembar		6	43.908	263,448
Bahan Toko						
5	Paku	3 cm	kg	0,25	25,090	6,272
Upah						
6	Tukang Sendiri		Oh	2	80,000	160,000
Jumlah Harga						1,309,326

Desain Tipikal



Dinding Kayu

Rancangan Anggaran Biaya

No	Bahan/Upah	Ukuran Dipasar	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Bahan Lokal						
1	Papan 4 m	3 x 20 cm	Lembar	20	177,500	3,550,000
2	Usuk Kayu 4 m	4 x 6 cm	Batang	8	18,000	144,000
Bahan Toko						
3	Paku	3 cm	kg	0,5	25,090	12,545
4	Paku Payung	4 cm	kg	0,5	56,453	28,226
5	Seng Gelombang 0,3 mm	90 x 240 cm	lembar	2	43,908	87,816
Upah						
6	Tukang Sendiri		oh	2	80,000	160,000
Jumlah Harga						3,982,587

SARANA INDIVIDU

BANGUNAN ATAS – JAMBAN LUAR RUMAH

Desain Tipikal



Dinding Batu Bata & Bambu

Rancangan Anggaran Biaya

No	Bahan/Upah	Ukuran Dipasar	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Bahan Lokal						
1	Dinding Bambu (Gedek)	3 x 4 m	lembar	1	147,278	147,278
2	Batu Bata	-	buah	250	1,066	266,500
3	Pasir Pasang	-	gerobak	2	188,175	376,350
4	Kayu 4 m	4 x 6 cm	batang	8	32,500	260,000
5	Papan 4 m (rangka pintu)	3 x 20 cm	lembar	2	177,500	355,000
6	Kayu 4 m	3 x 4 cm	batang	6	17,500	105,000
Bahan Toko						
7	Semen	50 kg	zak	1,5	74,016	111,024
8	Seng Gelombang 0,3 mm/asbes	90 x 240 cm	lembar	2	74,016	148,032
9	Tripleks 0,5 mm	80 x 210 cm	lembar	1	60,216	60,216
10	Engsel Besi/Kupu-kupu	-	pasang	1	12,545	12,545
11	Grendel Pintu	-	unit	1	18,818	18,818
12	Tarikan Pintu	-	unit	2	131,000	262,000
13	Paku	campuran	kg	0,25	25,090	6,272
Upah						
14	Tukang Terampil	-	oh	2	120,000	240,000
Jumlah Harga						2,369,035

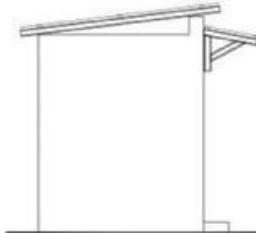
SARANA INDIVIDU

BANGUNAN ATAS – JAMBAN LUAR RUMAH

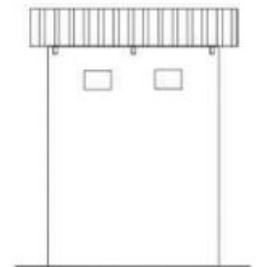
Desain Tipikal



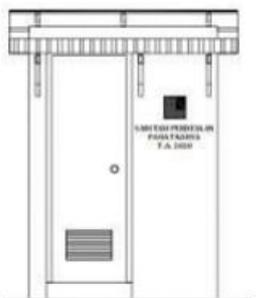
Dinding Batu Bata



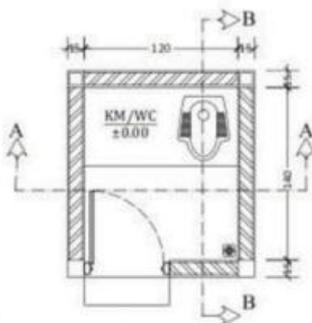
TAMPAK SAMPING



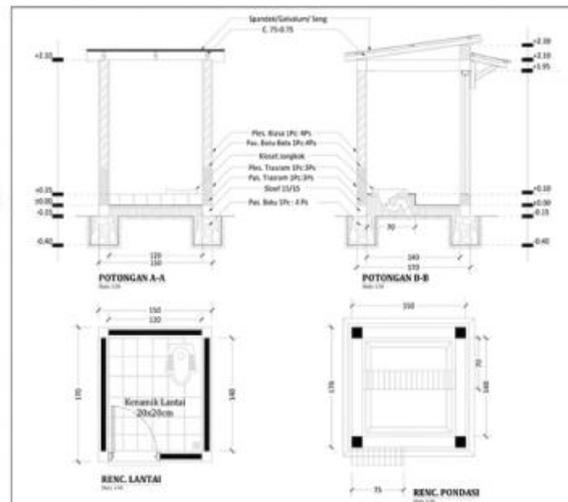
TAMPAK BELAKANG



TAMPAK DEPAN



DENAH



Rancangan Anggaran Biaya

No	Bahan/Upah	Ukuran Dipasar	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Bahan Lokal						
1	Batu Bata	-	buah	700	1,066	746,200
2	Pasir Pasang	-	m ³	4,5	188,175	846,787
3	Balok Kayu 4 m	6 x 10 cm	batang	4	80,000	320,000
4	Kayu 4 m	4 x 6 cm	batang	4	32,500	130,000
5	Papan 4 m (rangka pintu)	3 x 20 cm	lembar	2	177,500	355,000
6	Kayu 4 m	3 x 4 cm	batang	6	17,500	105,000
Bahan Toko						
7	Semen	50 kg	zak	2,5	74,016	185,040
8	Seng Gelombang 0,3 mm/asbes	90 x 240 cm	lembar	2	74,016	148,032
9	Tripleks 5 mm	80 x 210 cm	lembar	1	60,216	60,216
10	Engsel Besi/Kupu-kupu	-	pasang	1	12,545	12,545
11	Grendel Pintu	-	unit	1	18,818	18,818
12	Tarikan Pintu	-	unit	2	131,000	262,000
13	Paku	campuran	kg	0,25	25,090	6,272
Upah						
14	Tukang Terampil	-	oh	4	120,000	480,000
Jumlah Harga						3,675,910

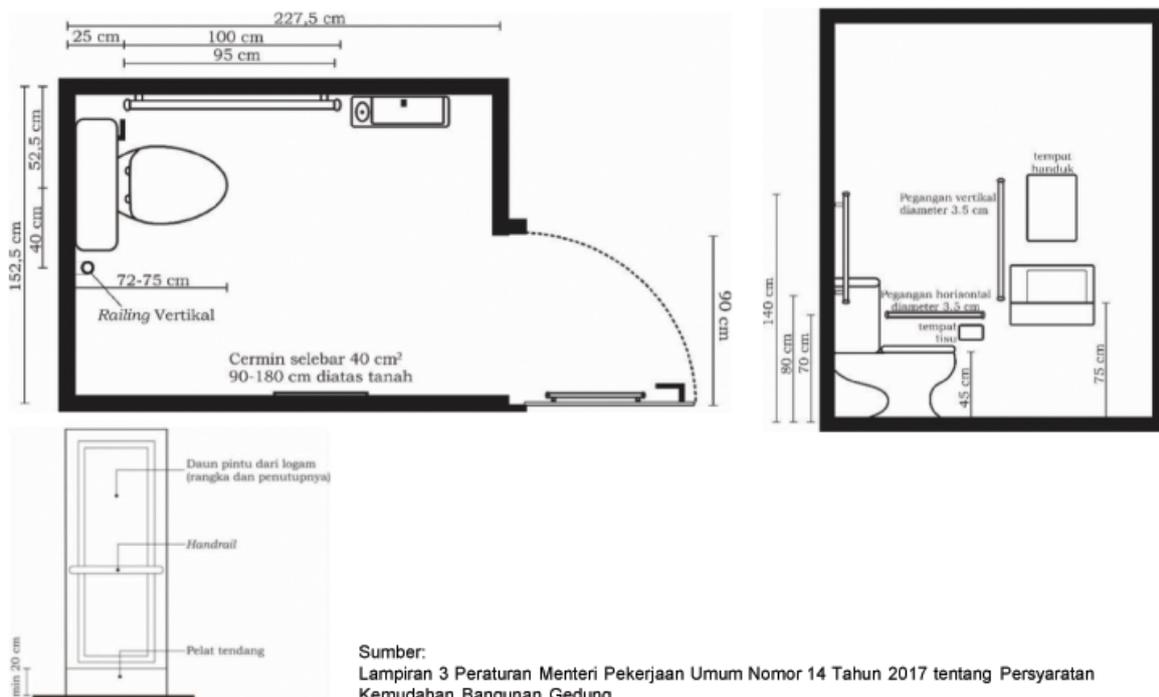
SARANA INDIVIDU

BANGUNAN ATAS – JAMBAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

Spesifikasi Teknis

- Luas ruang dalam minimum 152,5 cm x 227,5 cm dengan mempertimbangkan ruang gerak pengguna kursi roda
- Lebar bersih pintu toilet minimum 90 cm
- Daun pintu toilet:
 - a) Jika membuka kearah luar, maka harus menyediakan ruang bebas minimum 152,5 cm antara pintu dengan permukaan terluar kloset
 - b) Jika membuka kearah dalam, maka harus menyediakan ruang bebas yang cukup untuk pengguna kursi roda melakukan manuver berputar 180° dan membuka/menutup daun pintu
- Pintu toilet:
 - a) Material: kaca/logam
 - b) Dilengkapi dengan plat tendang di bagian bawah pintu untuk pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas netra
 - c) Dilengkapi dengan engsel yang dapat menutup sendiri
 - d) Disediakan lampu alarm (panic lamp) pada bagian atas luar yang akan diaktifkan oleh pengguna toilet dengan menekan tombol bunyi darurat (emergency sound button) atau menarik tuas yang tersedia ketika terjadi keadaan darurat
- Tuas di dalam toilet harus diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau
- Toilet harus dilengkapi dengan pegangan rambut untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda ke atas kloset ataupun sebaliknya

Desain Tipikal

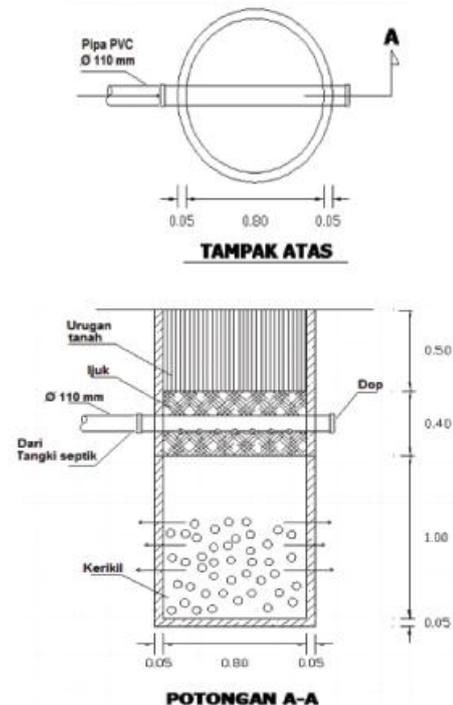


Sumber:
Lampiran 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

SARANA INDIVIDU

BANGUNAN BAWAH – TANGKI SEPTIK dengan Bidang Resapan

Desain Tipikal



Spesifikasi Teknis

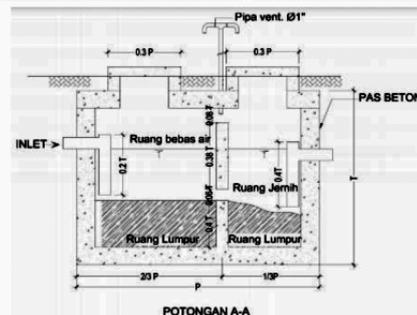
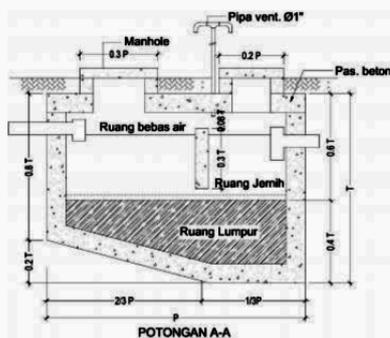
- Bangunan harus kedap air
- Ketinggian bangunan terhadap permukaan tanah \pm 5-10 cm
- Memiliki lubang control dan lubang ventilasi (tinggi min 30 cm) dengan diameter pipa 1.5 inci
- Diameter pipa inlet dan outlet 4 inci
- Menggunakan system T pada pipa inlet dan dan outlet
- Panjang pipa inlet kebawah setelah T shock 25 cm sedangkan panjang pipa outlet kebawah setelah T shock adalah 25 cm
- Kemiringan pipa min 2%
- Periode pengurasan lumpur yang berada di dasar bak adalah 2-3 tahun
- Jarak bidang resapan dari rumah 1.5 m, sumur air bersih 10 m dan sumur resapan air hujan 5 m
- Diameter bidang resapan 800 m, kedalamannya 1 m
- Bidang resapan diisi kerikil/batu pecah yang berdiameter 30-80 mm
- Pipa efluen dari tangki septik dipasang di bagian atas bidang resapan, efluen harus meresap ke dinding dan dasar bidang resapan

SARANA INDIVIDU

BANGUNAN BAWAH – TANGKI SEPTIK

Pasangan Batu Bata

Desain Tipikal



Rancangan Anggaran Biaya

Bahan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
- Semen Portlan	7 Zak	74,016.00	518,112
- Pasir	1 m ³	111,651.00	111,651
- Batu Pecah / Split	1 m ³	577,823	577,823
- Besi begel Ø 8 mm	14 Btg	50,000	700,000
- Besi begel Ø 6 mm	18 Btg	25,000	450,000
- Kawat Ikat	1 kg	31,363	31,363
- Paku 5 cm – 12 cm	1 kg	25,090	25,090
- Plywood 6 mm	1 kpg	102,869	102,869
- Batu Bata	650 bh	1,060.00	689,000
- Ijuk	2 kg	38,000	76,000
- Batu Korral	0.1 m ³	232,083	23,208
- Tee Hawa	2 Unit	15,000	30,000
- Pipa PVC 1 1/2"	0.50 m'	26,345	13,173
- Pipa PVC 4"	1 btg	127,199	127,199
- Pipa T PVC 4"	4 bh	25,000	100,000
- Lem Pipa	1 btl	15,000	15,000
- Disinpektan	1 Set	55,000	55,000
Sub Jumlah			3,645,488
Upah Kerja			
- Tukang	7 oh	120,000	840,000
Sub Jumlah			840,000
Total Jumlah			4,485,488

Spesifikasi Teknis

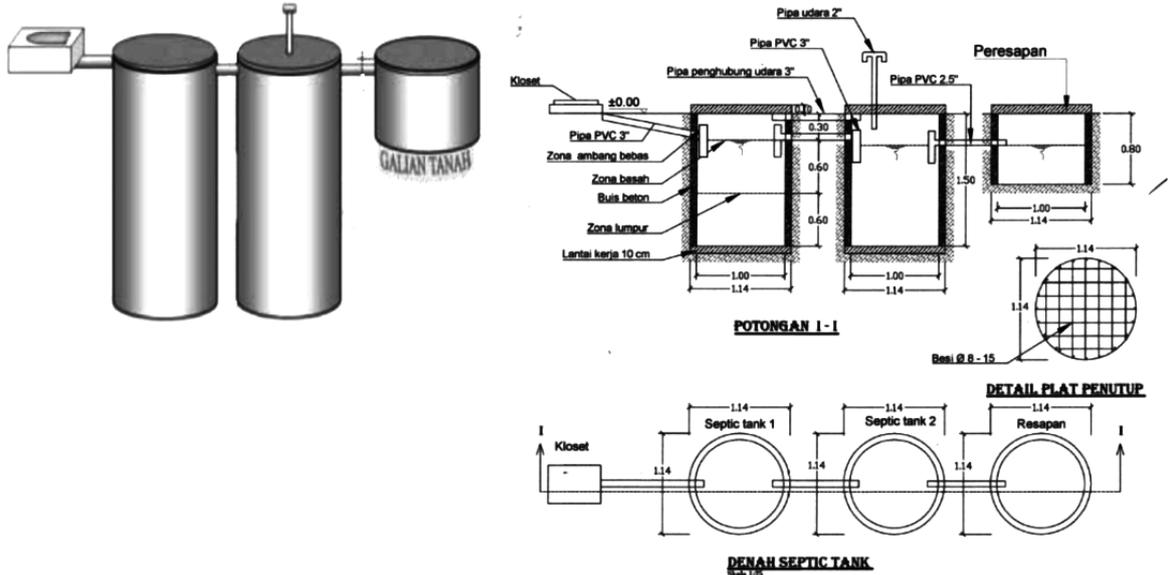
- Perbandingan panjang dan lebar tangki septik 2-3 : 1
- Lebar tangki septik minimal 0.75 m, panjang tangki septik min 1.50 m, tinggi tangki min 1.5 m termasuk ambang batas 0.3 m
- Zona basah, lumpur dan ambang bebas, yang masing-masing volumenya adalah 1.2 m³, 0.45 m³ dan 0.4 m³

SARANA INDIVIDU

BANGUNAN BAWAH – TANGKI SEPTIK

Buist Beton

Desain Tipikal



Rancangan Anggaran Biaya

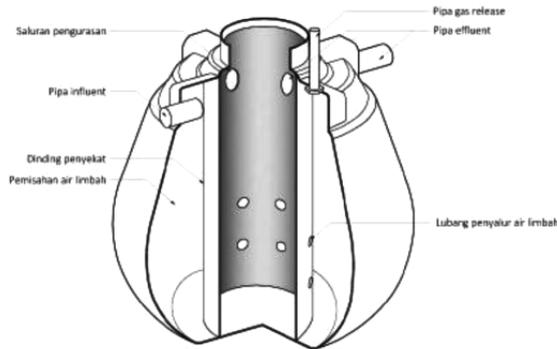
Pekerjaan Tangki Septik Cor Beton Bertulang dan Resapan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Bahan			
- Semen Portlan	14 Zak	74,016.00	1,036,224
- Pasir	2 m ³	111,651.00	223,302
- Batu Pecah / Split	2 m ³	577,823	1,155,646
- Besi begel Ø 8 mm	20 Btg	50,000	1,000,000
- Kawat Ikat	3 kg	31,363	94,089
- Paku 5 cm – 12 cm	1 kg	25,090	25,090
- Plywood 6 mm	5 kpg	102,869	514,345
- Ijuk	2 kg	38,000	76,000
- Batu Koral	0.1 m ³	232,083	23,208
- Tee Hawa	2 Unit	15,000	30,000
- Pipa PVC 1 1/2"	0.50 m ¹	26,345	13,173
- Pipa PVC 4"	1 btg	127,199	127,199
- Pipa T PVC 4"	4 bh	25,000	100,000
- Lem Pipa	1 btl	10,000	10,000
- Disinpektan	1 Set	55,000	55,000
Sub Jumlah			4,483,276
Upah Kerja			
- Tukang	7 oh	120,000	840,000
Sub Jumlah			840,000
Total Jumlah			5,323,276

SARANA INDIVIDU

BANGUNAN BAWAH – TANGKI SEPTIK

Biofilter/Pabrikasi

Desain Tipikal



Spesifikasi Teknis

- Harus mendapatkan sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional dan/atau Puslitbangkim (Pusat Penelitian Pengembangan Perumahan)
- Material: fiberglass, bioball dan honey comb PVC (media) dan pipa PVC
- Terdiri dari anaerobic chamber (primary dan secondary) dan filtrasi
- Kebutuhan lahan: 1.4 m x 1.4 m x 1.5 m
- Dimensi: diameter 85 cm, tinggi 125 cm, inlet dan outlet 94 cm, manhole 35 cm
- Pipa inlet dan outlet 4 inchi, pipa vent 2 inchi, cleaning tube 4 inchi, disinfectant tube 1.5 inchi

Kebutuhan Biaya

No	Kapasitas (orang)	Volume (liter)	Harga (Rp)*
1	2-4	1000	3.500.000 - 4.500.000
2	4-6	1850	5.300.000
3	6-8	2145	6.400.000
4	8-12	3000	8.600.000

*) Belum termasuk: Biaya pemasangan (Rp. 300.000 s/d Rp 700.000) dan biaya pemeliharaan /pengurasan Rp 160.000 per 4 tahun

Rancangan Anggaran Biaya

TANGKI SEPTIK BIOFIL 1 M3

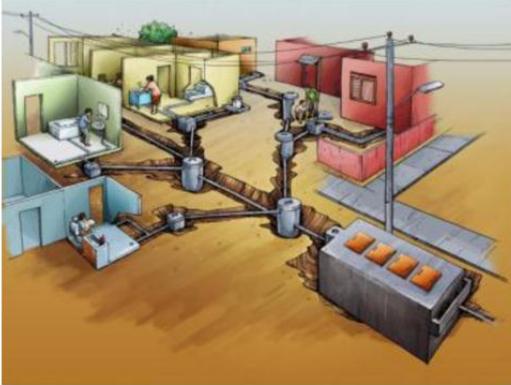
NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan				
	Penyiapan dan pembersihan Lahan		LS		100.000
	Sub Jumlah				100.000
II	A. Pekerjaan Landasan Tangki Septik BioFilter	Volume		Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Bahan				
	- Semen Portlan	56	Kg	1.505,40	84.724
	- Pasir	0,24	m ³	188.175,00	44.259
	- Batu Pecah / Split	0,02	m ³	350.000	5.408
	Sub Jumlah				334.390
	B. Pekerjaan Pemasangan Tangki Septik BioFilter	Volume		Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	- Tangki septik Biofilter 1 m3	1	Unit	6.580.000	6.000.000
	- Pipa PVC 4"	1	btg	127.199	127.199
	- Pipa T PVC 4"	2	bh	20.000	40.000
	- Pipa Y PVC 4"	1	bh	20.000	20.000
	- Elbow PVC 4"	1	bh	20.000	20.000
	Sub Jumlah				6.675.979
	C. Upah Kerja				
	- Tukang	1	oh	120.000	120.000
	- Pekerja	6	oh	80.000	510.400
	Sub Jumlah				630.400
	Total Jumlah				7.740.770
	Dibulatkan				7.750.000

SARANA KOMUNAL

TANGKI SEPTIK KOMUNAL

Pasangan Batu Bata

Desain Tipikal



Rancangan Anggaran Biaya

Kapasitas (m ³ /hari)	Harga (Rp Juta)*
5	113

*) Termasuk Biaya pemasangan

*) SSH Prov. NTB

Spesifikasi Teknis

- Untuk 2-10 KK
- Bisa secara aerob, anaerob maupun kombinasi aerob dan anaerob
- Bisa mengolah air limbah dari dapur dan kamar mandi (grey water) dan kloset (black water)
- Dimensi tangki septik berdasarkan jumlah pemakai:

No	Jumlah Pemakai (KK)	Zona Basah (m ³)	Zona Lumpur (m ³)	Zona Ambang Bebas (m ³)	Panjang Tangki (m)	Lebar Tangki (m)	Tinggi Tangki (m)	Volume Total (m ³)
2	2	2,4	0,90	0,6	2,1	1,0	1,8	3,9
3	3	3,6	1,35	0,9	2,5	1,3	1,8	5,8
4	4	4,8	1,80	1,2	2,8	1,4	2,0	7,8
5	5	6,0	2,25	1,4	3,2	1,5	2,0	9,6
6	10	12,0	4,50	2,9	4,4	2,2	2,0	19,4

Sumber:

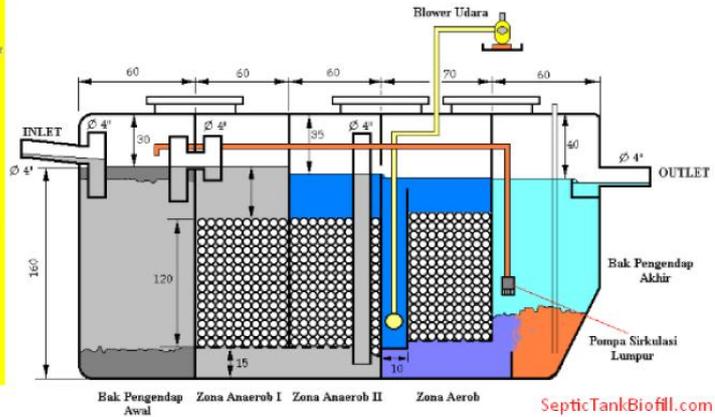
SNI 2398 : 2017 tentang Tata cara perencanaan tangki septik dengan pengolahan lanjutan
PermenPUPR No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

SARANA KOMUNAL

TANGKI SEPTIK KOMUNAL

Biofilter/Pabrikasi

Desain Tipikal



SepticTankBiofill.com

Spesifikasi Teknis

- Mengacu pada SNI 7504:2011
- Harus mendapatkan sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional dan/atau Puslitbangkim (Pusat Penelitian Pengembangan Permukiman)
- Material: fiberglass, bioball dan honey comb PVC (media) dan pipa PVC
- Terdiri dari anaerobic chamber (primary dan secondary) dan filtrasi
- Detail dimensi:

Pengguna (orang)	8	15	20
Diameter (cm)	110	135	160
Tinggi (cm)	145	165	180
Inlet (cm)	115	140	155
Outlet (cm)	110	130	150
Manhole (cm)	50	50	50
Pipa inlet (inchi)	4	4	4
Pipa outlet (inchi)	4	4	4
Pipa vent (inchi)	2	2	2
Cleaning tube (inchi)	4	4	4
Disinfectan tube (inchi)	1.5	1.5	1.5

Kebutuhan Biaya

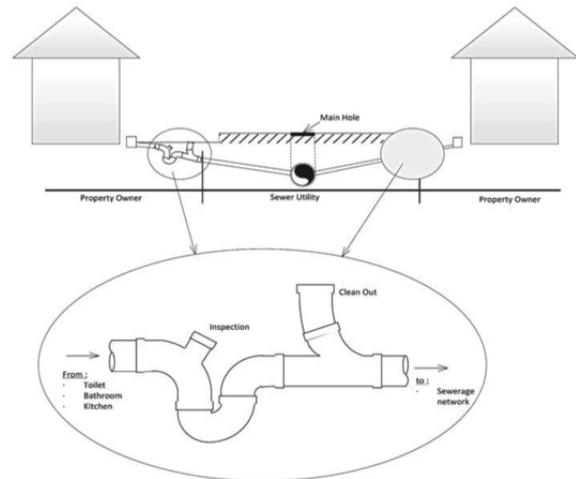
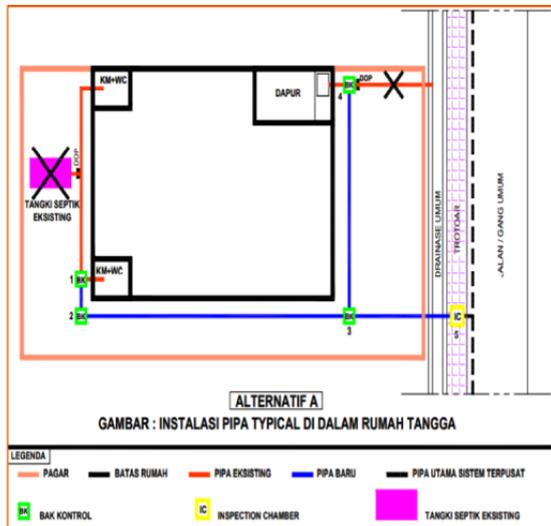
Pengguna (orang)	8	15	20
Kisaran harga	Rp 3,750,000.00	Rp 5,850,000.00	Rp 8,650,000.00

Belum termasuk biaya pemasangan

SARANA KOMUNAL

SAMBUNGAN RUMAH ke SPALD-T Skala Permukiman

Desain Tipikal



Spesifikasi Teknis

- Kecepatan aliran minimum 0.6 m/det, kemiringan minimum pipa servis/retikulasi/lateral 1% dan kemiringan minimum pipa induk 0.5%
- Diameter minimum pipa untuk servis/retikulasi 150 mm, lateral dan induk 200 mm
- Bak control: bisa berbentuk persegi berukuran 60 x 60 cm atau persegi panjang 40 x 60 cm bila kedalaman kurang dari 90 cm atau berbentuk bulat dengan diameter 60-90 cm bila kedalaman >1m

Kebutuhan Biaya

Biaya pengadaan dan pemasangan pipa dari Inspection Chamber ke WC dan biaya bongkar pasang jalur pipa dalam rumah disesuaikan dengan tarif biaya Sambungan Rumah masing-masing lembaga layanan

No	Kabupaten/kota	Tarif Pemasangan SR
1	Kota Mataram	
2	Kab. Lombok Barat	
3	Kab. Lombok Tengah	
4	Dst	

Lampiran 4

Tata Cara Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik⁴

A. CUBLUK KEMBAR

Pembangunan cubluk kembar hanya bisa dilakukan di daerah perdesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa per hektar. Dengan demikian, di perkotaan tetap harus dibangun tanki septik aman/kedap.

Pelaksanaan konstruksi Cubluk Kembar dapat dilaksanakan dengan cara: 1. pelaksanaan konstruksi cubluk kembar in-situ; dan 2. pelaksanaan konstruksi cubluk kembar pra-cetak.

Komponen bangunan cubluk kembar terdiri dari:

- a) toilet leher angsa;
- b) bangunan ruang toilet;
- c) cubluk;
- d) penutup cubluk;
- e) sistem perpipaan (air buangan dan air bersih);
- f) sistem ventilasi cubluk; dan
- g) bidang resapan.

Bahan bangunan yang digunakan dalam pembuatan cubluk kembar, seperti tabel berikut :

Tabel 1 Bahan Bangunan Untuk Cubluk Kembar

No	Bahan Komponen	Pasangan Batu Cetak/ Batu Merah Diplester	Pasangan Batu Cetak/ Batu Merah Dengan Siar Tegak Kosong	Pipa Beton Kedap Air/ Pipa PVC	Beton Bertulang
1.	Lubang Sumuran				
	• Dinding Atas	✓			
	• Dinding Bawah		✓		
2.	Tutup Cubluk				✓
3.	Tutup Bak Kontrol				✓
4.	Saluran Penghubung			✓	
5.	Bak Kontrol	✓			✓

⁴ Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Lampiran III, Konstruksi SPALD

1. Cubluk Kembar In-situ

1.1. Persiapan Konstruksi

Tahapan persiapan konstruksi pada cubluk kembar in-situ meliputi:

a. Pekerjaan persiapan

Persiapan pembangunan cubluk dimulai dari penentuan lokasi cubluk sesuai dengan kriteria teknis perencanaan cubluk kembar. Pekerjaan persiapan meliputi penyiapan tanah, penempatan patok dan pengadaan bahan bangunan.

b. Pekerjaan tanah

Pekerjaan penggalian tanah dilakukan untuk cubluk dan jaringan pipa air buangan. Untuk penggalian lubang cubluk, tahapan yang perlu dilakukan:

- 1) galian tanah sesuai dengan batas patoknya;
- 2) apabila kedalaman galian tanah telah sesuai dengan rencana, kemudian periksa apakah dindingnya sudah tegak lurus;
- 3) ratakan dan padatkan tanah disekeliling dasar cubluk supaya datar dan padat untuk dipakai sebagai pondasi dinding cubluk.

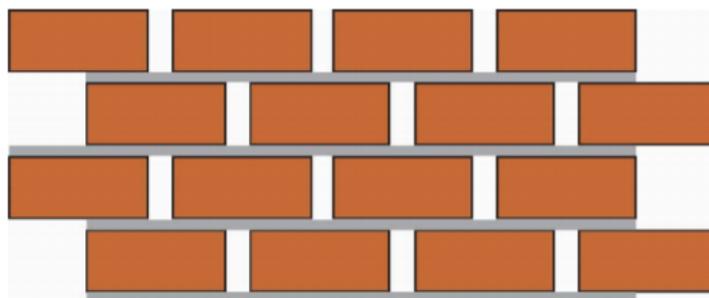
1.2. Pelaksanaan Konstruksi

a. Dinding Cubluk

Setelah lubang cubluk selesai, tahapan selanjutnya memasang dinding cubluk dengan pasangan batu bata. Hal penting yang harus menjadi perhatian, dinding bagian bawah harus didesain agar air dapat meresap ke dalam tanah.

Tahapan pemasangan dinding sebagai berikut:

- 1) Berikan torehan dengan pacul dan linggis pada dinding cubluk agar diperoleh daya rekat dan daya resap yang lebih baik.
- 2) Letakkan pasangan batu bata atau batako pertama dengan arah melintang di atas tanah dan diberi adukan semen : pasir = 1 : 5, celah pasangan antara bata 1 - 2 cm, apabila menggunakan batako celah pasangan diambil 1 - 3 cm yang berfungsi untuk meresapkan cairan tinja.
- 3) Isi celah pasangan antar bata atau batako dengan adukan spesi (mortar).



Gambar. Susunan Pasangan Batu Bata untuk Dinding Bawah Cubluk

4) Melapisi dinding di atas permukaan tanah sampai bibir cubluk sebagai berikut:

- (1) Tarik benang untuk meluruskan pemasangan batu bata atau batako tersebut.
- (2) Pasang batu bata atau batako berikutnya diatas pondasi.

Bibir cubluk merupakan bagian dinding cubluk atas yang diplester kedap air setinggi 30 - 40 cm. Bibir cubluk atas yang diplester terbuat dari batu bata atau batako dengan adukan semen : pasir = 1 : 3. Bagian atas cubluk harus dihaluskan dengan cairan semen (aci). Perlu diperhatikan agar sekeliling dinding cubluk diberi tambahan lapisan tanah setinggi 5 cm agar air tidak tergenang di sekitar cubluk.

b. Tutup Cubluk

Penutup cubluk dapat terbuat dari material beton atau bahan lain yang mudah didapatkan di area setempat.

2. Cubluk Kembar Pra-cetak

2.1. Persiapan Konstruksi

Tahapan persiapan konstruksi pada cubluk kembar pra-cetak meliputi:

a. Membuat Cetakan

- 1) Carilah tempat yang rata, teduh, dan tidak terganggu kegiatan lain.
- 2) Tancapkan patok sebagai titik pusat titik cubluk (untuk tutup cubluk bentuk lingkaran).
- 3) Ikatkan tali pada patok, rentangkan tali tersebut, dan putar mengelilingi patok, beri tanda pada patok garis yang dibuat melingkar, sedangkan untuk cubluk yang berbentuk bujur sangkar dapat menggunakan patok sebanyak 4 buah yang dibuat siku.
- 4) Pakailah triplek dengan lebar 5 cm sebagai cetakan untuk pembatas pengecoran dan tulangan.
- 5) Pasang triplek sebagai cetakan itu bagian dalam patok dan patok harus lebih rendah dari cetakan agar mudah meratakan adukan nantinya.
- 6) Buat cetakan lubang untuk pipa ventilasi dengan menggunakan pipa.

b. Menyiapkan Tulangan Beton

- 1) Gunakan besi beton yang bebas karat.
- 2) Rakit besi beton dalam cetakan agar ukurannya sesuai dengan yang diinginkan.
- 3) Jarak antara tulangan beton 15 cm.

- 4) Jika setiap persilangan tulangan dengan kawat pengikat, beri ganjalan dengan kerikil setinggi 2 cm dari lantai cetakan.
 - 5) Siapkan 2 buah cincin untuk pegangan cubluk.
- c. Menyiapkan Beton
- Bahan untuk pembuatan beton harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Semen yang akan dipakai harus sesuai.
 - 2) Pasir dan kerikil yang digunakan harus bersih dari kotoran/zat organik sesuai.
 - 3) Gunakan air bersih untuk adukan campuran beton sesuai SNI.
- d. Mengaduk beton dan mengecor beton
- Cara pembuatan beton sebagai berikut:
- 1) Takar dan aduk sampai rata, dengan mutu beton K 225.
 - 2) Buat lekukan di tengah adukan, tuangkan air perlahan dan aduk setiap kali air ditambah.
 - 3) Setelah adukan matang, segera tuangkan adukan beton pada bagian dasar cetakan yang telah diberi lapisan plastik atau kertas semen dan hindari kontak langsung dengan tanah.
 - 4) Ratakan beton dengan papan.
 - 5) Setelah adukan mulai mengering \pm 3 jam dari pengecoran, tutuplah pencetakan beton tersebut dengan karung goni atau kertas semen kemudian siramkan air setiap 12 jam agar beton tetap lembab.
 - 6) 3 (tiga) hari setelah itu baru cetakan dapat dibuka dan tutup cubluk dapat diangkat

2.2. Pelaksanaan konstruksi dan pemasangan peralatan pada cubluk

a. Membuat Saluran Penghubung

Saluran penghubung antara kloset jongkok ke cubluk dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tutuplah cubluk untuk sementara dengan papan atau lembaran plastik agar tidak terjadi kecelakaan dan air tidak masuk ke dalamnya.
- 2) Patok bak kontrol dan tempat kloset jongkok.
- 3) Gali parit dengan kemiringan 2%, mulai dari lubang masuk ke cubluk sampai ke plat jongkok melalui bak kontrol.
- 4) Galilah lubang dengan ukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm di tempat yang disediakan untuk bak kontrol, lokasi bak kontrol di tengah antara plat jongkok dan cubluk.

- 5) Pipa harus dibuat menjorok masuk ke cubluk minimal 10 cm.
- 6) Semua pipa menjorok masuk ke cubluk minimal 10 cm.
- 7) Jarak plat jongkok dengan dinding belakang jamban minimal 20 cm.

b. Membuat Bak Kontrol

Bak kontrol dapat dibuat sebagai berikut:

- 1) Lubang bak kontrol minimal 10 cm di bawah mulut pipa dan pipa pembawa harus menjorok 10 cm ke dalam lubang bak kontrol.
- 2) Bangunan bak kontrol 40 cm x 40 cm x 40 cm dibuat dari pasangan batu/batako, sesuai gambar rencana.
- 3) Apabila plesteran sudah kering, periksa kelancaran aliran air dengan cara menyiramkan satu ember air ke dalam plat jongkok.

c. Membuat Pipa Penghubung Leher Angsa ke Cubluk

Pipa yang menghubungkan jamban ke cubluk dipasang dengan komposisi adukan semen : pasir = 1 : 3 dan ditutup dengan urukan tanah:

- 1) Pasang pipa di bak kontrol.
- 2) Pasang dan plester pipa masuk ke cubluk agar kedap air.
- 3) Leher angsa harus dipasang mendatar.
- 4) Ganjal pelat dengan bata apabila kedudukannya sudah tepat.
- 5) Pasang leher angsa ke pipa penyalur tinja.
- 6) Pasang leher angsa ke dalam pasir atau adukan encer.
- 7) Periksa semua sambungan pipa jangan ada bocor, bila ada yang bocor ditambah dengan adukan.

d. Pipa Ventilasi

Pipa ventilasi disambungkan dengan lubang pada tutup cubluk yang telah dibuat. Pipa ventilasi maksimal setinggi bangunan toilet dengan ujungnya dipasang sambungan U atau T dan dipasang kawat untuk mencegah binatang masuk ke dalam cubluk.

B. TANKI SEPTIK

1. Persiapan Konstruksi

Komponen bangunan tangki septik terdiri dari : Tangki Septik; dan Sistem Resapan. Tahapan Persiapan Konstruksi pada Tangki Septik meliputi:

a. Pekerjaan persiapan

Persiapan pembangunan tangki septik dimulai dari penentuan lokasi tangki septik sesuai dengan kriteria teknis perencanaan tangki septik. Pekerjaan persiapan meliputi penyiapan lahan, penempatan patok dan mobilisasi/pengadaan bahan bangunan.

b. Pekerjaan tanah

Pekerjaan penggalian tanah dilakukan untuk tangki septik dan jaringan pipa air buangan. Untuk penggalian lubang tangki septik, tahapan yang perlu dilakukan:

- 1) galian tanah sesuai dengan batas patoknya;
- 2) apabila kedalaman galian tanah telah sesuai dengan rencana, kemudian periksa apakah dindingnya sudah tegak lurus;
- 3) ratakan dan padatkan tanah disekeliling dasar tangki septik supaya datar dan padat untuk dipakai sebagai pondasi dinding tangki septik

2. Pelaksanaan Konstruksi

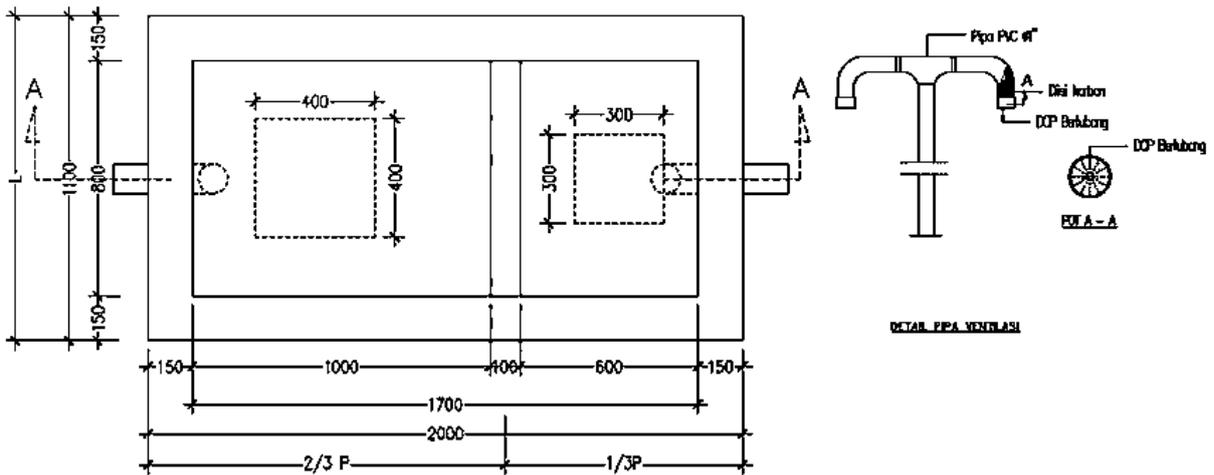
Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Tangki Septik terdiri dari :

a. Pembuatan Kompartemen

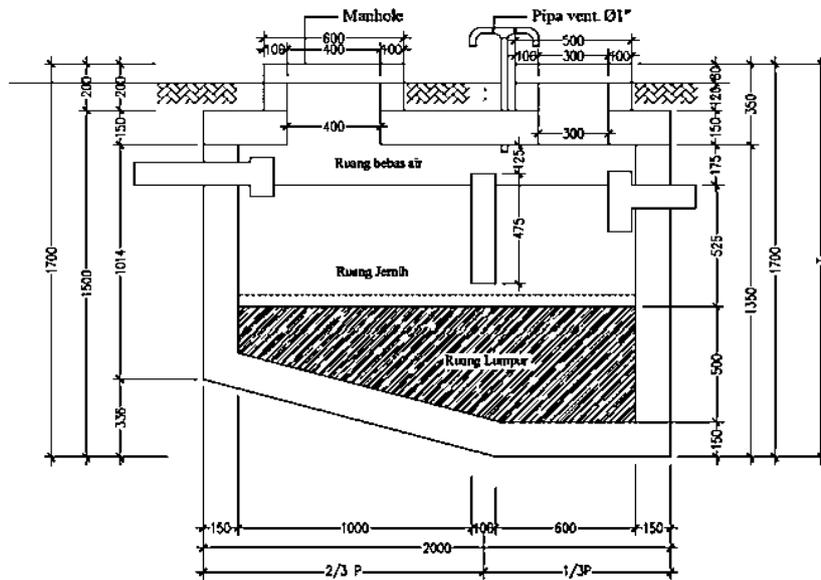
- 1) Lokasi kompartemen ditempatkan di elevasi yang paling rendah dari sumber air limbah domestik.
- 2) Tanah digali sedalam rencana settler dan kompartemen.
- 3) Pasang lantai kompartemen dan settler dengan konstruksi beton bertulang tebal 12 cm.
- 4) Buat dinding kompartemen dan settler dari pasangan beton/batu bata dengan ukuran $\frac{1}{2}$ bata.
- 5) Buat plat penutup dengan konstruksi beton bertulang tebal 12 cm atau disesuaikan kebutuhan pembebanan di atasnya jika dibangun di bawah jalan.
- 6) Pasang perpipaan dari settler dan antar kompartemen.

b. Penyediaan Sarana Penunjang

- 1) Buatkan aliran keluar dari kompartemen ke bidang atau sumur resapan.
- 2) Disetiap kompartemen dibuatkan lubang kontrol dengan penutup yang terbuat dari beton berbentuk segi empat.
- 3) Hindari penggunaan pompa.
- 4) Siapkan fasilitas untuk penyedotan lumpur.



DENAH TANGKI SEPTIK SATU KOMPARTEMEN



POTONGAN A-A

Gambar 3 Contoh Struktur Tangki Septik

C. MANDI CUCI KAKUS (MCK)

Komponen bangunan MCK terdiri dari:

- a. Bangunan atas

Bangunan ruang untuk mandi terdiri dari bangunan tembok, ventilasi dan atap dilakukan dengan mengacu pada standar pembangunan dalam SNI.

Bangunan atas terdiri dari bangunan atas untuk MCK; dan bangunan ruang cuci.

- b. Bangunan bawah

Bangunan bawah MCK berupa tangki septik sesuai dengan SNI termasuk bidang resapan atau sumur resapan.

- c. Fasilitas pendukung
- 1) Sumur, apabila kebutuhan air bersih tidak dilayani oleh PDAM;
 - 2) saluran drainase/pematusan;
 - 3) reservoir bawah dan/atau atas apabila diperlukan; dan
 - 4) sistem plumbing dan pompa.

1. Persiapan Konstruksi MCK

- a. Persiapan pembangunan MCK dimulai dari penentuan lokasi MCK sesuai dengan kriteria teknis perencanaan MCK.
- b. Pekerjaan persiapan meliputi penyiapan lahan, penempatan patok dan mobilisasi/pengadaan bahan bangunan.

2. Pelaksanaan Konstruksi MCK

a. Pekerjaan tanah

Pekerjaan tanah terdiri dari:

1) Pekerjaan galian

Pekerjaan galian meliputi galian untuk perpipaan, *grease trap*, *Anaerobic Baffled Reactor (ABR)*, *wetland* dan bak penampung, bak kontrol akhir, *manhole*, dan lain-lain. Pekerjaan ini termasuk pekerjaan untuk mengisi kembali lubang kelebihan galian dengan material yang baik dan telah disetujui. Metode pelaksanaan galian konstruksi meliputi:

- a) Sebelum mulai mengerjakan pekerjaan galian, ketinggian penampang/pile dapat ditentukan. Pengukuran dapat dilakukan pada keadaan tanah yang belum terganggu. Dasar galian harus digali sampai batas kemiringan dan pile yang dicantumkan pada gambar rencana.
- b) Apabila dijumpai kondisi yang tak memuaskan pada kedalaman yang diperlihatkan pada gambar, maka penggalian harus diperdalam atau diubah sesuai persetujuan dengan pemberi tugas.
- c) Jika menggunakan peralatan berat untuk pemindahan tanah, pemadatan atau keperluan lainnya, alat berat tersebut tidak berada atau beroperasi lebih dekat dari 1,5 m dari tepi galian terbuka atau galian pondasi, kecuali apabila pipa atau struktur lainnya telah dipasang dan ditutup dengan minimal 60 cm urukan yang telah dipadatkan.

2) Pekerjaan pemindahan tanah

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan pekerjaan pemindahan tanah yaitu:

- a) tanah hasil galian dipindahkan ke lokasi yang telah ditentukan; dan
- b) untuk kebutuhan penimbunan kembali, 1/3 dari hasil galian dapat dimanfaatkan untuk timbunan tersebut.

3) Pekerjaan urukan tanah/timbunan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan pengurukan tanah:

- a) Timbunan dilaksanakan pada semua bekas lubang galian, semua bagian yang harus ditinggikan. Urukan tanah dilaksanakan menurut gambar serta pile yang telah ditetapkan termasuk kegiatan perataan dan penyelesaian disekitarnya.
- b) Semua bahan timbunan terdiri dari bahan galian yang baik dan telah disetujui oleh pengawas/penanggung jawab pelaksana konstruksi.
- c) Bahan timbunan yang berisi tumbuhan lapuk serta bahan yang dapat membusuk atau batu yang besarnya melebihi 100 mm tidak menggunakan untuk timbunan. Bahan timbunan tidak boleh diambil dari tanah bekas dari pembersihan lahan dan pengupasan humus.
- d) Apabila bahan timbunan yang sesuai di lokasi tidak cukup tersedia, maka kekurangannya harus didatangkan dengan bahan sesuai spesifikasi teknis.
- e) Sisa tanah/material bekas galian, setelah pengurukan selesai harus diangkat dan dibuang sehingga bersih dan rapi.

4) Pekerjaan urukan pasir

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat melaksanakan pengurukan pasir:

- a) Urukan pasir harus dipadatkan lapis demi lapis secara manual.
- b) Urukan pasir dilakukan pada seluruh bagian yang telah ditentukan pada gambar pelaksanaan.
- c) Tebal urukan pasir disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum pada gambar pelaksanaan.
- d) Pasir uruk tidak boleh mengandung kadar lumpur lebih dari 30% dan bebas dari batu dan kerikil.

5) Pekerjaan pemadatan tanah

Setelah pekerjaan penggalian, tanah runtuhan dan serpihan bekas galian digunakan untuk pemadatan tanah pada dasar tanah.

Material timbunan dihamparkan lapis demi lapis kemudian dipadatkan dalam keadaan cukup basah (kalau perlu disiram air secukupnya), pemadatan dilakukan dengan stamper atau pemberat yang ditentukan oleh pengawas/penanggung jawab pelaksana konstruksi.

b. Pekerjaan Konstruksi MCK

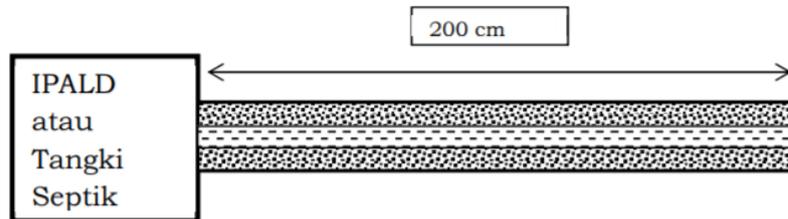
- 1) Tahapan konstruksi bangunan atas MCK, terdiri dari:

- a) Pemasangan toilet mengacu pada SNI.
 - b) Bangunan saluran pematusan/drainase disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sesuai dengan gambar perencanaan. Tata cara dan prosedur pembangunan mengacu pada standar pembangunan dalam SNI.
 - c) Pemasangan peralatan meliputi:
 - (1) pemasangan valve dan kran (plumbing fixture); dan
 - (2) pemasangan pompa apabila diperlukan.
- 2) Tahapan konstruksi bangunan bawah MCK
- a) Pemasangan batas rencana bangunan sesuai gambar desain.
 - b) Pekerjaan tanah yang meliputi penggalian, pembuangan tanah dan pemadatan tanah dilakukan sesuai dengan prosedur standar yang ditetapkan atau sesuai dengan rencana kerja dan syarat yang tertuang dalam dokumen perencanaan.
 - c) Pembangunan tangki septik sesuai dengan SKSNI Nomor T.07-1989-T mengenai tata cara perencanaan tangki septik. Pekerjaan pembuatan tangki septik meliputi:
 - (1) pekerjaan tutup tangki;
 - (2) pekerjaan galian tanah;
 - (3) pekerjaan lapisan dasar galian pondasi, pemberian pasir uruk setebal 5 cm, diratakan dan dipadatkan;
 - (4) pekerjaan dinding batu bata dengan komposisi semen : pasir = 1 : 3;
 - (5) pekerjaan lantai;
 - (6) pemasangan pipa masuk dan keluar, dengan mengikuti pada petunjuk di gambar desain, atau dibuat perbedaan antara posisi pipa masuk dan pipa keluar;
 - (7) pembuatan dinding penyekat dari pasangan batu bata dengan ketebalan $\frac{1}{2}$ bata;
 - (8) pekerjaan plesteran lantai dan dinding; dan
 - (9) pemasangan tutup, pipa ventilasi dan pengurukan dengan tanah.
- 3) Tahapan konstruksi peresapan MCK
- a) Konstruksi bidang resapan

Bidang resapan terdiri dari pipa PVC diameter 4 inch berlubang berfungsi menyebarkan atau mendistribusikan cairan, yang diletakkan dalam parit dengan lebar 60 cm – 90 cm. Pipa berlubang ditempatkan dan dikubur dengan kerikil selanjutnya berturut-turut ke atas yaitu lapisan ijuk untuk mencegah material halus masuk ke kerikil, lapisan pasir untuk mencegah

bau dan pertumbuhan akar tanaman agar tidak mencapai - 23 - kerikil dan pipa, lapisan tanah secukupnya untuk mengurangi infiltrasi air hujan. Untuk bidang resapan lebih dari 1 lajur maka jarak minimal antar lajur yaitu 150 cm. Pipa harus diletakkan 5 – 15 cm dari permukaan agar air limbah domestik tidak naik ke atas. Parit ini harus digali dengan panjang tidak lebih dari 20 meter.

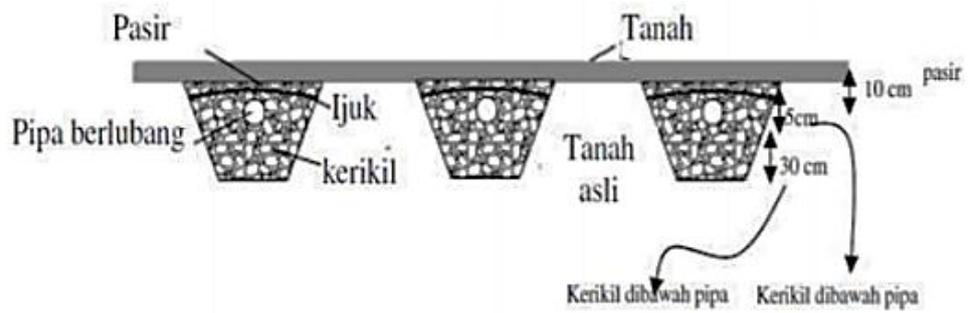
(1) Bidang resapan dengan sistem perpipaan



(2) Bidang resapan paralel



(3) Penampang Bidang resapan



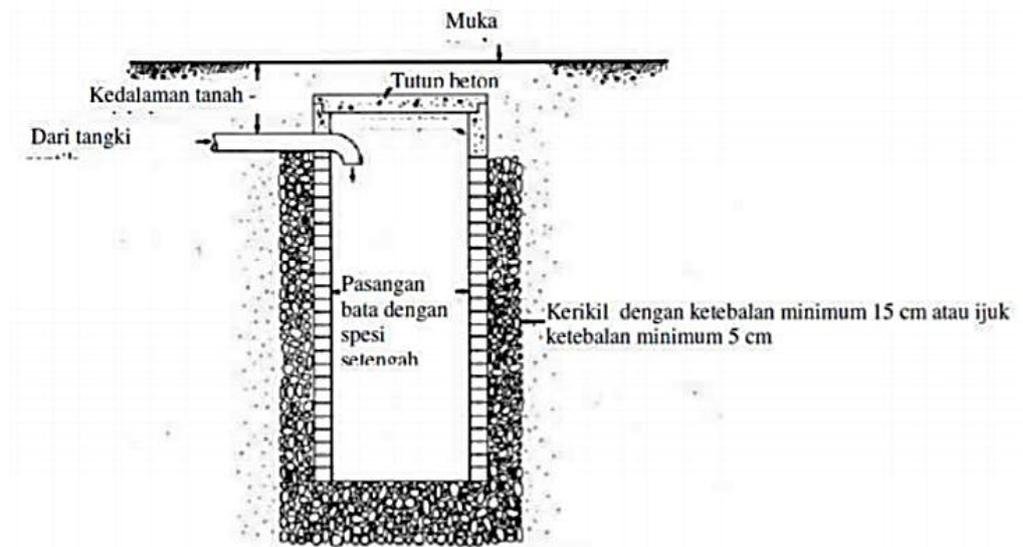
Gambar. Resapan sistem perpipaan

b) Konstruksi sumur resapan

Secara umum sumur resapan lebih sederhana dibanding dengan bidang resapan sebagaimana terlihat dalam gambar tipikal sumur resapan pada Gambar dibawah ini. Sumur resapan dapat dibiarkan kosong dan dilapisi dengan bahan yang dapat menyerap (untuk penopang dan mencegah longsor), atau dilapisi dan diisi dengan batu dan kerikil kasar. Batu dan kerikil akan menopang dinding agar tidak runtuh, tetapi masih memberikan ruang yang mencukupi untuk air limbah. Dalam kedua kasus ini, lapisan pasir dan krikil halus harus disebarakan diseluruh bagian dasar untuk membantu penyebaran aliran. Kedalaman sumur resapan harus (1.5 – 4)

meter, tidak boleh kurang dari 1.5 meter di atas tinggi permukaan air tanah, dengan diameter (1.0 – 3.5) meter.

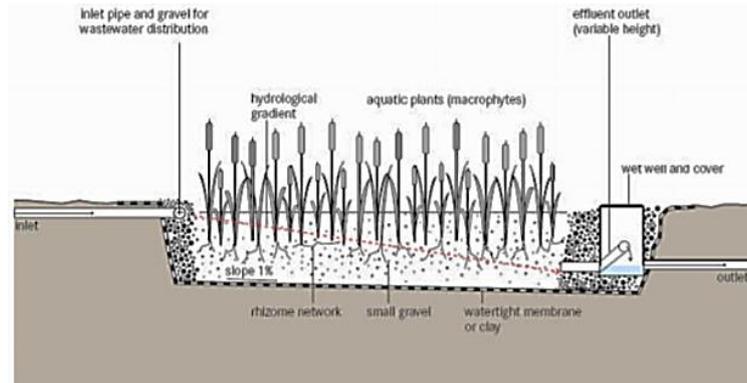
Sumur ini harus diletakkan lebih rendah minimal 15 meter dari sumber air minum dan sumur. Sumur resapan harus cukup besar untuk menghindari banjir dan luapan air. Kapasitas minimal sumur resapan harus mampu menampung semua air limbah yang dihasilkan dari satu kegiatan mencuci atau dalam satu hari, volume manapun yang paling besar.



Gambar. Tipikal Sumur Resapan

c) Konstruksi bangunan lahan basah buatan (*Wetland*)

Lahan basah buatan (aliran horizontal di bawah permukaan) merupakan saluran yang diisi pasir dan kerikil dan ditanami dengan vegetasi air. Air limbah domestik mengalir horizontal melalui saluran yang berisi material penyaring yang mendegradasi zat organik. Tujuannya untuk meniru proses alami yang terjadi di daerah rawa dan payau. Sistem ini memiliki dasar dengan lapisan atau saluran yang diisi dengan pasir atau media (batu, kerikil, pasir, tanah). Saluran atau mangkuk dilapisi dengan penghalang yang tidak tembus air (tanah liat atau geotekstil) untuk mencegah rembesan air limbah domestik. Vegetasi asli (seperti cattail, alang-alang dan/atau sulur-sulur) dibiarkan tumbuh di bagian dasar volume bak lahan basah buatan secara mudahnya dapat dihitung berdasarkan kriteria waktu penahanan hidrolis 3-7 hari.



Gambar. Tipikal Sumur Resapan

c. Pemasangan Peralatan

Pemasangan peralatan pada MCK yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- 1) pemasangan pompa air untuk mengangkat air dari tandon air bawah ke tandon air atas, apabila diperlukan;
- 2) pemasangan ventilator pada tangki septik;
- 3) pemasangan lampu bilik mandi dan bilik kakus; dan
- 4) pemasangan shower apabila disediakan tandon air atas

D. REHABILITASI SEPTIC TANK

Rehabilitasi pada Sub-sistem Pengolahan Setempat dilakukan terhadap tangki septik, dengan indikasi kerusakan sebagai berikut:

1. Saluran air buangan ke tangki septik tidak berfungsi atau aliran air limbah domestik tidak mengalir atau limbah balik naik ke atas. Untuk mengetahui penyebab dan cara penyelesaian-annya perlu dilihat level muka air pada tangki septik.
 - a. Jika kondisinya normal (± 30 cm dari bagian atas tangki atau lebih di bawah), ada beberapa kemungkinan penyebabnya, antara lain:
 - 1) Terjadi sumbatan saluran air limbah domestik dari rumah ke tangki septik. Jika penyebab sumbatan berupa lapisan scum yang menutupi bagian inlet maka tangki septik harus dikuras. Inlet ini harus tetap terjaga dari sumbatan scum.
 - 2) Saluran air limbah domestik tersumbat oleh kotoran atau akar tumbuhan yang masuk ke dalam pipa, jika kondisi ini yang terjadi maka harus dilakukan perbaikan.
 - 3) Jika ketidaklancaran aliran ini terjadi pada sistem yang baru dan kemungkinan sutan kotoran tidak ada, maka kemungkinan desain kemiringan yang dibangun untuk air dapat mengalir kurang baik. Untuk kondisi ini maka perlu perbaikan saluran agar slope yang ada cukup untuk mengalirnya air limbah domestik.
 - 4) Jika saluran air limbah domestik tidak tersumbat, kemungkinan terjadi sumbatan pada pipa vent. Dengan tersumbatnya pipa vent sebagai keluarannya udara

menyebabkan udara terjebak dalam pipa menyebabkan gangguan aliran dalam pipa, dimana aliran dalam pipa termasuk aliran tak bertekanan.

- b. Jika ternyata di dalam tangki septik lebih tinggi dari kondisi normal maka kemungkinan penyebabnya antara lain tersumbatnya saluran dari tangki septik ke lahan resapan yang dapat disebabkan karena:
 - b. outlet tangki septik tersumbat oleh scum yang cukup tebal atau baffle sebagai pemisah scum dengan aliran air rusak, jika kondisi ini yang terjadi maka pengurasan tangki septik harus dilakukan atau perbaikan baffle;
 - c. saluran ke lahan pengumpul tersumbat atau terhalang oleh kotoran atau akar sehingga perlu perbaikan saluran; atau
 - d. lahan resapan mengalami penyumbatan sehingga aliran resapan tidak normal.
2. Lahan resapan tergenang air dan lama meresap, Tidak berfungsinya lahan resapan ini disebabkan oleh beberapa kondisi antara lain:
 - a. Lahan resapan terlalu kecil untuk menerima beban aliran dari tangki septik. Untuk mengatasi hal ini maka perlu perluasan lahan resapan, namun jika tidak mungkin maka perlu dicari teknologi lain untuk memanfaatkan air yang dibuang misalnya untuk penyiraman tanaman atau dibuat water garden.
 - b. Tanah untuk peresapan tersumbat, kondisi ini normal terjadi, tanah akan mengalami penyumbatan setelah beberapa tahun karena permeabilitas tanah berkurang. Untuk mengantisipasi ini dapat dibuat dua sistem resapan sebagai cadangan. Biasanya setelah tersumbat sistem resapan dihentikan pemakaiannya untuk mengembalikan permeabilitas tanah dengan adanya aktifitas bakteri pengurai.
 - c. Tingginya muka air tanah pada saat musim hujan sehingga kondisi tanah menjadi jenuh dan fungsi resapan akan terganggu. Jika kondisi ini yang terjadi maka outlet dari tangki septik pada musim hujan dialirkan ke saluran drainase yang cukup besar.
 - d. Penyebab lain tersumbatnya sistem resapan yaitu terbawanya lumpur atau padatan dari tangki septik, hal ini merupakan indikasi bahwa tangki septik perlu pengurasan.
(e) Kebocoran sistem plumbing menyebabkan air masuk ke sistem tangki septik sehingga beban air yang masuk cukup tinggi, untuk mencegah hal ini perlu dilakukan pengecekan sistem plumbing dari kebocoran.

LAMPIRAN 5

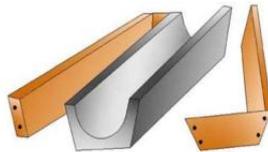
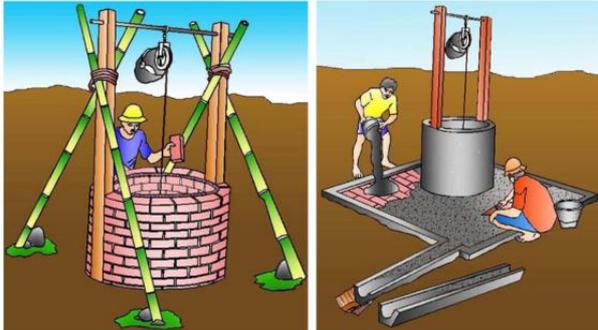
OPSI TEKNOLOGI PENYEDIAAN AIR MINUM

Referensi:

- SK Gub 902-598 Tahun 2020 tentang SSH
- Permen PUPR No 01/2009

SUMUR GALI

Desain Tipikal

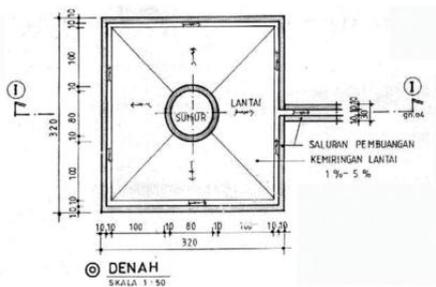


Spesifikasi Teknis

- Dasar sumur menggunakan granular material pack ukuran 3-5 cm setebal 50 cm dari dasar sumur
- Penampang: diameter 80 cm, sisi 80 cm
- Lantai sumur gali harus kedap air dan permukaannya tidak licin
- Ukuran lantai min 100 cm dan dinding sumur atas bagian luar kemiringan lantai 1-nya 5% kearah saluran pembuangan
- Saluran pembuangan dibuat kedap air dan licin dengan kemiringan 2% kearah sarana pengolahan air buangan dan badan air penerima
- Bahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan:
 - a) Semen protland (PC) tipe 1
 - b) Bata merah min kelas 25 kg/cm²
 - c) Kadar lumpur maks dalam pasir 5%
 - d) Dimensi kerikil untuk beton 2-3 cm
 - e) Batako pejal min kelas 25 kg/cm²

SUMUR GALI – Tipe I A

Desain



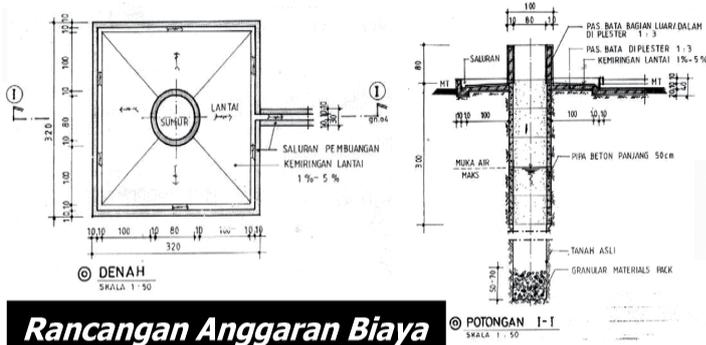
Rancangan Anggaran Biaya

Spesifikasi Teknis

- Untuk keadaan tanah yang tidak menunjukkan gejala mudah retak/runtuh
- Dinding atas dibuat dari pasangan bata/batako/batu belah yang di plester bagian luar dan dalam setinggi 80 cm dari permukaan lantai (adukan 1PC:2PS, tebal plesteran 1 cm)
- Dinding bawah dari bahan yang sama sedalam min 300 cm dari permukaan lantai
- Tebal dinding atas dan bawah ½ bata

SUMUR GALI – Tipe IB

Desain Tipikal



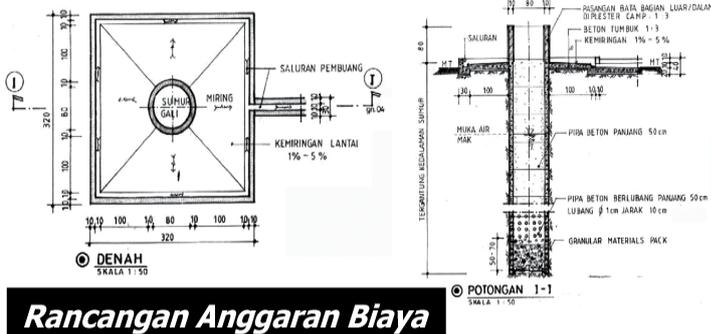
Rancangan Anggaran Biaya

Spesifikasi Teknis

- Untuk keadaan tanah yang tidak menunjukkan gejala mudah retak/runtuh
- Dinding atas dibuat dari pasangan bata/batako/batu belah yang diplester bagian luar dan dalam setinggi 80 cm dari permukaan lantai (adukan 1PC:2PS, tebal plesteran 1 cm)
- Dinding bawah dari pipa beton (kedap air, diameter 80 cm) sedalam min 300 cm dari permukaan lantai
- Tebal dinding atas ½ bata, dinding bawah 10 cm

SUMUR GALI – Tipe II

Desain Tipikal



Rancangan Anggaran Biaya

Spesifikasi Teknis

- Untuk keadaan tanah yang menunjukkan gejala mudah retak/runtuh
- Dinding atas dibuat dari pasangan bata/batako/batu belah yang diplester bagian luar dan dalam setinggi 80 cm dari permukaan lantai (adukan 1PC:2PS, tebal plesteran 1 cm)
- Kedalaman dinding bawah yang berbahan pipa beton (kedap air untuk permukaan lantai – diameter 80 cm, sisanya berlubang – diameter 80 cm) tergantung muka air tanah terendah
- Tebal dinding atas ½ bata, dinding bawah 10 cm

Rancangan Anggaran Biaya**SUMUR GALI TYPE 1 (KEDALAMAN 3 M')**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	SUMUR GALI TYPE-1 (kedalaman 3,00 M)				
	I PEKERJAAN PERSIAPAN				112.905
	Bahan				
1	Papan bauwplank	M3	0,05	2.258.100	112.905
II	PEKERJAAN BUIS BETON DAN BATA				2.415.345
	Bahan				
1	Pasir Pasang	m3	3	111.651	334.953
2	Semen	Kg	600	1.505	903.240
3	Buis Beton dia 80 cm-50 cm	unit	6	137.995	827.970
4	Media batu diameter 5-10 cm	m3	0,314	288.000	90.432
5	Bata merah	Bh	250	1.035	258.750
III	PEKERJAAN LANTAI SUMUR				6.782.700
	Bahan				
1	Pasir Pasang	m3	3,072	111.651	342.992
2	Semen	Kg	2000	1.505	3.010.800
3	Bata merah	Bh	700	1.035	724.500
4	Lantai keramik anti slip 20x20 cm	m2	24	68.998	1.655.952
5	Saluran air buangan pipa PVC dia 4 inci	m'	8	131.057	1.048.456
IV	UPAH				4.200.000
1	Pekerja	OH	25	120.000	3.000.000
2	Tukang	OH	15	80.000	1.200.000
	Jumlah (I+II+III+IV)				13.510.950
	Dibulatkan				13.500.000

Rancangan Anggaran Biaya**SUMUR GALI TYPE 2 (KEDALAMAN 9 M')**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
B	SUMUR GALI TYPE-2 (kedalaman 9,00 M)				
	I PEKERJAAN PERSIAPAN				112.905
	Bahan				
1	Papan bouwplank	M3	0,05	2.258.100	112.905
	II PEKERJAAN BUIS BETON DAN BATA				7.065.171
	Bahan				
1	Pasir Pasang	m3	9	111.651	1.004.859
2	Semen	Kg	1800	1.505	2.709.720
3	Buis Beton dia 80 cm-50 cm	unit	18	137.995	2.483.910
4	Media batu diameter 5-10 cm	m3	0,314	288.000	90.432
5	Bata merah	Bh	750	1.035	776.250
	III PEKERJAAN LANTAI SUMUR				6.782.700
	Bahan				
1	Pasir Pasang	m3	3,072	111.651	342.992
2	Semen	Kg	2000	1.505	3.010.800
3	Bata merah	Bh	700	1.035	724.500
4	Lantai keramik anti slip 20x20 cm	m2	24	68.998	1.655.952
5	Saluran air buangan pipa PVC dia 4 inci	m'	8	131.057	1.048.456
	IV UPAH				12.040.000
1	Pekerja	OH	75	120.000	9.000.000
2	Tukang	OH	38	80.000	3.040.000
	Jumlah (I+II+III+IV)				26.000.776
	Dibulatkan				26.000.000

SUMUR POMPA TANGAN

Desain Tipikal

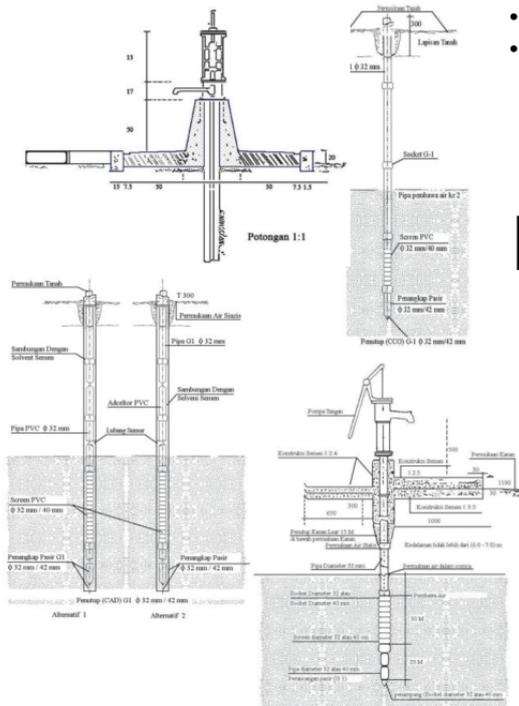


Spesifikasi Teknis

- Dibangun di daerah yang mempunyai sumber air dangkal dengan kedalaman 7 m dari permukaan tanah, di lokasi yang tidak terkena banjir
- Jarak sumber air ke daerah pelayanan maks 50 m, radius pelayanan <200 m
- Jarak sumur harus lebih 10 m dan lebih tinggi dari sumber pencemaran (kaku, empang, lubang galian sampah, dll), bila lebih rendah letak sumur harus >15 m
- Lantai sumur harus kedap air, tidak licin, dibuat dengan kemiringan 1-3% kearah saluran pembuangan
- Badan pompa dapat bekerja sebagai pompa hisap
- Bahan yang digunakan: bata merah/batako kelas 25 kg/cm, pipa hisap dan selubung, saringan pipa PVC dengan diameter sama dengan diameter pipa hisap dan diberi lubang
- Saluran pembuang harus kedap air, kemiringan 2% kearah sarana pengolahan air buangan
- Kebutuhan lahan: 2 m x 2 m
- Berdasarkan kedalaman sumur, dibagi menjadi 2 tipe yaitu sumur dangkal (SPT tipe 1) dan dalam (SPT tipe 2), berdasarkan kedalaman air dan pemompaannya, SPT tipe 2 dibagi lagi menjadi 3 system yaitu system I, II dan III

SUMUR POMPA TANGAN – Dangkal

Desain Tipikal



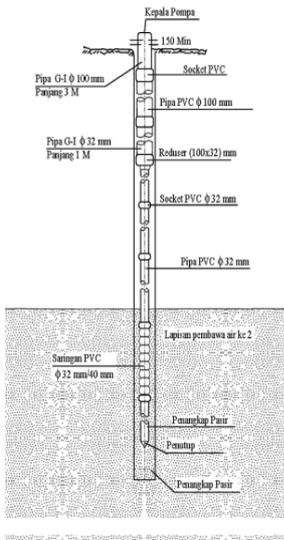
Spesifikasi Teknis

- Bahan: GIP, PVC, pompa tangan
- Ukuran penampang dan diameter pipa: pipa hisap PVC diameter 30 mm kedalaman 9 m, pipa selubung PVC diameter 75 mm kedalaman 12 m, saringan PVC diameter 30 mm kedalaman 2.5 m, pipa hisap PVC diameter 30 mm kedalaman 21 m

Rancangan Anggaran Biaya

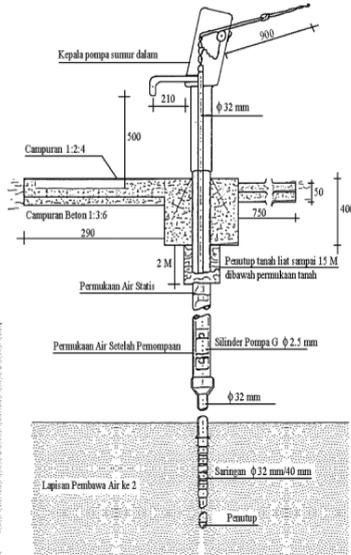
SUMUR POMPA TANGAN – Dalam

Desain Tipikal



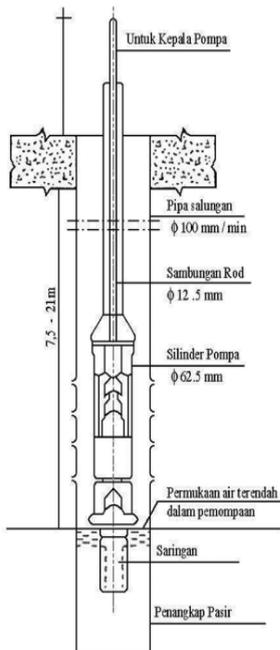
Spesifikasi Teknis

- Bahan: PVC



SUMUR POMPA TANGAN – Sistem I

Desain Tipikal



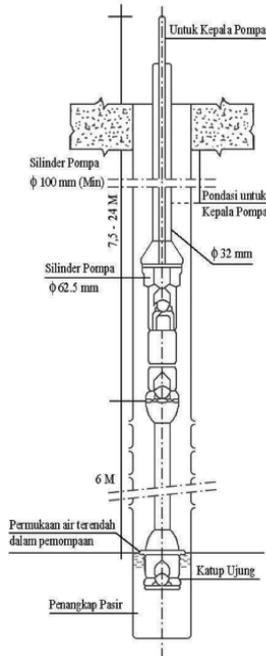
Spesifikasi Teknis

- Ukuran penampang dan diameter pipa:
 pipa hisap PVC diameter 30 mm kedalaman 9 m,
 pipa selubung PVC diameter 75 mm kedalaman 28 m,
 saringan PVC diameter 30 mm kedalaman 2.5 m
- Digunakan bila permukaan air statis 7.5 – 9 m dibawah permukaan tanah
- Fluktuasi penurunan Mukai air tanah <12 m

Rancangan Anggaran Biaya

SUMUR POMPA TANGAN – Sistem II

Desain Tipikal



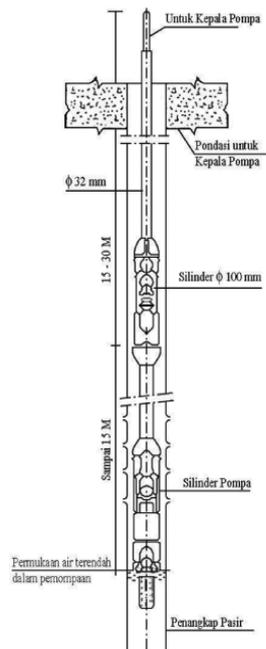
Spesifikasi Teknis

- Ukuran penampang dan diameter pipa: pipa hisap PVC diameter 30 mm kedalaman 12 m, pipa selubung PVC diameter 75 mm kedalaman 28 m, saringan PVC diameter 30 mm kedalaman 2.5 m
- Digunakan bila permukaan air statis 9-12 m dibawah permukaan tanah
- Fluktuasi penurunan Mukai air tanah <math>< 18 \text{ m}</math>

Rancangan Anggaran Biaya

SUMUR POMPA TANGAN – Sistem III

Desain Tipikal



Spesifikasi Teknis

- Ukuran penampang dan diameter pipa: pipa hisap PVC diameter 30 mm kedalaman 21 m, pipa selubung PVC diameter 75 mm kedalaman 28 m, saringan PVC diameter 30 mm kedalaman 2.5 m
- Digunakan bila permukaan air statis > 18 m dibawah permukaan tanah
- Bila digunakan satu atau lebih silinder pompa tangan tergantung dari kedalamannya

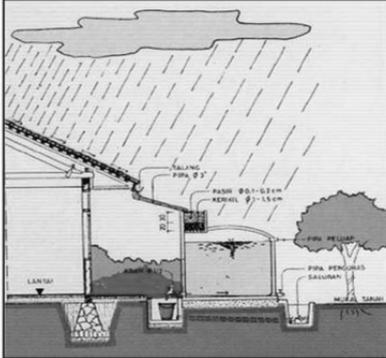
Rancangan Anggaran Biaya

Rancangan Anggaran Biaya**SUMUR POMPA TANGAN**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
ASUMUR POMPA TANGAN					
I PEKERJAAN PERSIAPAN					112.905
1	Papan bawplank	m3	0,05	2.258.100	112.905
II PEKERJAAN PENGEBORAN					4.951.000
1	Pengeboran Lubang Awal Dia. Ø 4"	m	10,0	200.000	2.000.000
2	Pemasangan Pipa Dia. Ø 4"	m	10,0	199.363	1.993.625
3	Pemasangan Pipa Sumur Dia. Ø 1 1/4"	m	10,0	53.906	539.063
4	Instalasi Pipa Penyebaran Dia. Ø 1 "	m	10,0	41.831	418.313
III PEKERJAAN PEMASANGAN POMPA TANGAN					717.107
Bahan					
1	Pompa Tangan Dragon	unit	1	450.000	450.000
2	Pasir Pasang	m3	0,05	188.175	9.409
3	Split	m3	0,12	642.083	77.050
4	Semen	Kg	120	1.505	180.648
IV PEKERJAAN LANTAI SUMUR					1.754.540
Bahan					
1	Pasir Pasang	m3	3,072	188.175	578.074
2	Bata merah	Bh	200	1.035	207.000
3	Semen	Kg	200	1.505	301.080
4	Lantai keramik anti slip 20x20 cm	m2	6	68.998	413.988
5	Pipa PVC dia 4 inci	Btg	2	127.199	254.398
V UPAH					12.000.000
1	Pekerja	OH	90	80.000	7.200.000
2	Tukang	OH	40	120.000	4.800.000
Jumlah (I+II+III+IV+V)					19.535.551
Dibulatkan					19.500.000

PENAMPUNGAN AIR HUJAN (PAH)

Desain Tipikal

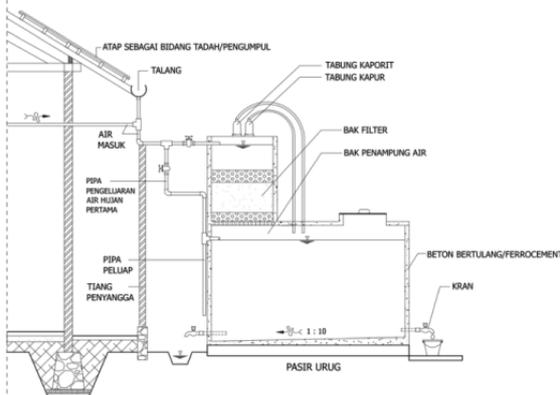


Spesifikasi Teknis

- Diletakkan di tanah datar/keras dan dekat dengan talang rumah
- Terdiri dari bidang penangkap air, talang air, saringan, manhole, bak penampung, pipa masukan, pipa peluap, kran pengambil air, kran/pipa penguras, saluran pembuangan, pipa udara, dan lantai
- Media penyaring: pasir (ketebalan 300-400 mm, diameter efektif 0.3-1.2 mm, koefisien keseragaman 1.2-1.4 mm, dan porositas 0.4) dan kerikil (ketebalan 200-350 mm, diameter 10-40 mm)
- Bak penampung air hujan dapat terbuat dari ferro semen, pasangan bata atau *fiberglass reinforced plastic* (FRP)

PAH – Ferro Semen

Desain Tipikal



Rancangan Anggaran Biaya

Spesifikasi Teknis

- Bentuk bak adalah silinder
- Bak PAH harus diletakkan diatas tanah yang stabil
- Ukuran bak PAH

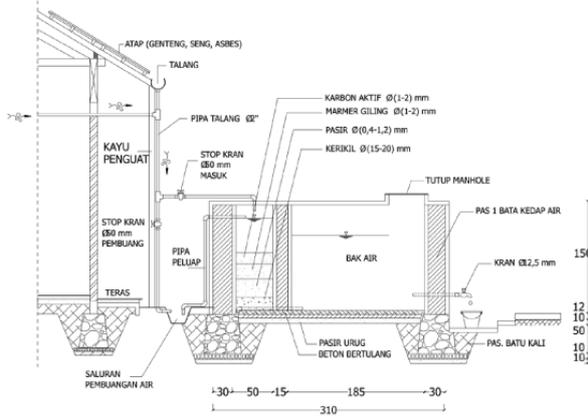
Volume (m ³)	Tinggi (cm)	Diameter (cm)	Tebal dinding (cm)	Lapis tulangan		Pipa peluap (cm)
				Kawat ayam	Kawat seng	
2,0	160	130	3,0	1	1	25
4,0	160	180	3,0	1	1	40
6,0	160	220	3,5	1	1	40
8,0	160	225	4,0	2	1	50
10,0	160	290	4,5	2	2	50

- Ukuran elemen bak PAH: lantai kerja tebal 10 cm; lantai dasar 5 cm; dinding 3-5 cm, penutup 4 cm; bak penyaring tebal 4 cm panjang 50 cm, lebar 50 cm; ubang periksa tebal 4 cm, panjang 60 cm, lebar 60 cm; saringan pasir dan kerikil; pipa penguras d:63 mm; pipa masukan d:100 mm; pipa keluaran d:15-20 mm; dan pipa udara d: 20-50 mm
- Konstruksi bak PAH

Elemen	Penulangan		
	Jenis/ukuran	Jarak (cm)	Jumlah lapisan
Lantai kerja	-	-	-
Lantai dasar	Kawat seng 5 mm	10	1
Dinding	Kawat ayam	-	1-2
	Kawat seng 5 mm	5-15	1-2
Penutup	Kawat seng 5 mm	10	1

PAH – Pasangan Batu Bata

Desain Tipikal



Rancangan Anggaran Biaya

Spesifikasi Teknis

- Bentuk bak adalah empat persegi
- Ukuran bak PAH

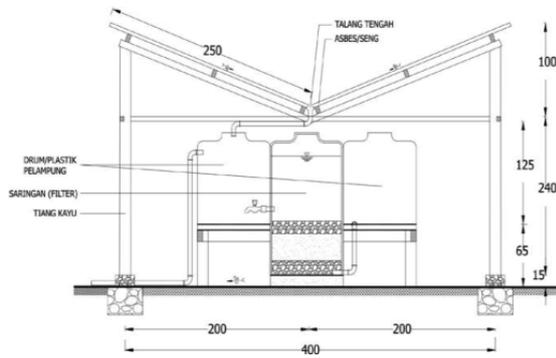
Volume (m ³)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Tebal plesteran (cm)	Tebal dinding (cm)	Pipa peluap (cm)
2,0	130	130	120	2,0	14,0	25
4,0	180	180	125	2,0	14,0	40
6,0	210	210	140	2,5	15,0	40
8,0	225	225	160	2,5	15,0	50
10,0	250	250	160	2,5	15,0	50

- Ukuran elemen bak PAH: lantai kerja tebal 10 cm; lantai dasar 5 cm; dinding 14-15 cm, penutup 7-10 cm; bak penyaring tebal 4 cm panjang 50 cm, lebar 50 cm; ubang periksa tebal 4 cm, panjang 60 cm, lebar 60 cm; saringan pasir dan kerikil; pipa penguras d:63 mm; pipa masukan d:100 mm; pipa keluaran d:15-20 mm; dan pipa udara d: 25-50 mm
- Konstruksi bak PAH

Elemen	Penulangan		Kuat tekan (kg/cm ²)
	Jenis/ukuran	Jarak (cm)	
Lantai kerja	-	-	100
Lantai dasar	Baja tulang 6 mm	10	200
Dinding pasangan bata	-	-	50
Penutup	Baja tulang 8 mm	10	150

PAH – FRP

Desain Tipikal



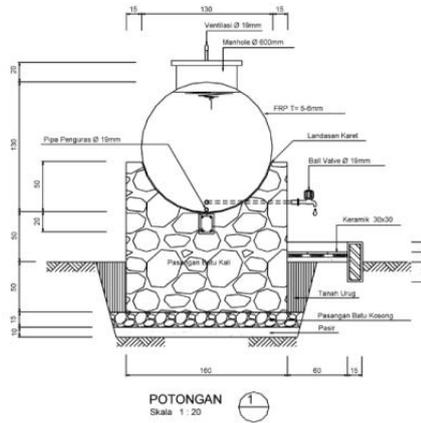
Spesifikasi Teknis

Rancangan Anggaran Biaya

- Kriteria cetakan dengan kapasitas 4m³: ketebalan min 8 mm, tinggi 1800 mm, diameter cetakan luar 1960 mm, diameter cetakan dalam 1800 mm
- Cetakan dibagi menjadi 3 bagian yang dapat disetel, dipasang atau dibuka dengan cara mengencangkan baut

TERMINAL AIR/HIDRAN UMUM

Desain Tipikal



Spesifikasi Teknis

- Tangki HU terbuat dari bahan *fiberglass reinforced plastic* (FRP), *polyethylene* (PE), pasangan batu bata, kayu ulin kedap air, plastik, atau bahan kedap air lainnya (*food grade*)
- Ketinggian terminal air terhadap permukaan tanah min 60 cm
- Tebal dinding tangki dari bahan FRP untuk volume 3 m³ adalah 5 mm dan untuk volume 4 m³ adalah 6 mm, kandungan serat gelas FRP min 30%
- Bentuk terminal air berbentuk silinder
- Pondasi terminal air dari pasangan batu kali/batu belah campuran 1 pc : 3 ps dan/atau beton bertulang campuran 1 pc : 2 ps : 3 krl
- Tangki dilengkapi dengan alat pemantau ketinggian air dari pipa transparan
- Kelengkapan terminal air:

No.	Ukuran	Volume TA	
		3 m ³	4 m ³
1.	Lubang pemeriksa dan penutup atau <i>manhole</i> (mm)	600	600
3.	Ø pipa outlet (mm)	19	19
4.	Ø pipa ventilasi (mm)	19	19
5.	Ø pipa penguras (mm)	19	19
6.	Ø pipa pelimpah (mm)	19	19
7.	Kran penutup (mm)	19	19

Catatan :

Jumlah pipa outlet untuk TA sebanyak 3 buah

Rancangan Anggaran Biaya

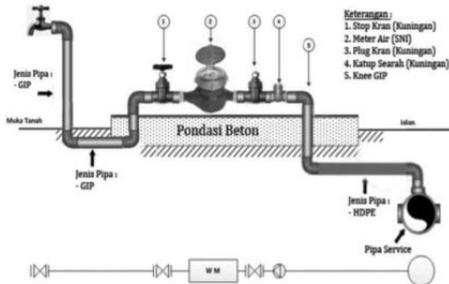
Rancangan Anggaran Biaya

PEMASANGAN HIDRAN UMUM/ TERMINAL AIR

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	PEMASANGAN HIDRAN UMUM/ TERMINAL AIR				
	I PEKERJAAN PERSIAPAN				180.648
	Bahan				
1	Papan bouwplank	m3	0,08	2.258.100	180.648
II	PEKERJAAN LANDASAN/PONDASI HU				3.345.735
	Bahan				
1	Semen	Kg	1375	1.505	2.069.925
2	Pasir Pasang	m3	1,2	188.175	225.810
3	Batu Pondasi	m3	3	350.000	1.050.000
IV	PEKERJAAN PEMASANGAN TANDON HU DAN PERPIPAAN				4.146.586
	Bahan				
1	Tandon HU Kap 5 m3	Bh	1	3.000.000	3.000.000
2	Pipa 3/4" dan kran	Bh	6	75.500	453.000
3	Pasir Pasang	m3	0,3	188.175	56.453
4	Semen	Kg	75	1.505	112.905
5	Pipa PVC dia 4 inci	m'	4	131.057	524.228
	V UPAH				2.840.000
1	Pekerja	OH	25	80.000	2.000.000
2	Tukang	OH	7	120.000	840.000
	Jumlah (I+II+III+IV+V)				10.512.969
	Jumlah Total				10.512.969
	Dibulatkan				10.500.000

TAPPING PDAM atau PAMDES/ KPSPAMS

Desain Tipikal



Spesifikasi Teknis

Komponen utama untuk SR adalah:

- Meter Air
- Pelindung Meter Air
- Stop Kran
- Pipa, fitting, dan kran pengatur Bahan pipa adalah plastik PVC/PE atau besi galvanized dengan diameter 3/4 - 1"(inchi) memenuhi SNI yang sesuai serta mampu menahan tekanan kerja minimal 8 bar.

Spesifikasi Teknis Konstruksi:

- Jarak 1 SR ke pipa distribusi tidak melebihi 4 meter
- Jika penyambungan melebihi ketentuan tersebut, maka tiap satu tapping harus lebih dari satu SR
- Dimensi SR dipilih pipa 1/2 inchi, satu bak meter ukur dan satu klem sadel
- Penyambungan dilakukan hingga halaman rumah/persil
- Standar Minimal Sambungan Rumah (Pipa HDPE dan GIP)
- Pipa SR harus ditanam sesuai kedalaman yang ditentukan untuk mencegah kerusakan dan kebocoran
- Pipa sebaiknya diklem di dinding tembok jika penanaman pipa tidak memungkinkan
- Pipa SR yang melintasi saluran (biasanya di depan rumah) harus dilindungi atau diberi pipa pelindung (*casing*) untuk mencegah agar tidak patah akibat diinjak atau tertimpa benda keras
- Dudukan SR dicor
- Meter air dilengkapi Box Meter

Rancangan Anggaran Biaya

Kabupaten/Kota	Tarif Sambungan Rumah (SR)*	Keterangan
Kota Mataram		
Kab. Lombok Barat		
Kab. Lombok Tengah		
Dst		

*) Disesuaikan tarif sambungan rumah masing-masing lembaga pengelola (PDAM, PAMDES, KPSPAMS, dsb)